



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan, sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan diperlukan sebuah dokumen perencanaan yang terpadu.
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, serta target prioritas pembangunan Kabupaten Magetan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 perlu dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah.
 - c. bahwa dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2017, dan Rancangan APBD 2017 harus mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 11 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2017

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2017 yang dimulai dari 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

(2) RKPD Tahun 2017 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;

Bab III : Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;

Bab IV : Prioritas dan sasaran pembangunan;

Bab V : Rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

Bab VI : Penutup.

(3) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

RKPD Tahun 2017 menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS APBD 2017, selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Kabupaten Magetan tahun 2017.

Pasal 3

RKPD Tahun 2017 merupakan acuan untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017.

Pasal 4

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja Triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 30 Mei 2016

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 30 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017**

**BAB I
P E N D A H U L U A N**

1.1 Latar Belakang

Proses pembangunan dirancang agar dalam implementasinya dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh kabupaten/ kota, provinsi maupun nasional akan sangat menentukan arah pembangunan yang ingin dicapai dan dijalankan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjadi acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras baik antara pusat dengan daerah, dan daerah dengan daerah.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah diterjemahkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Konsekuensinya adalah dituntut adanya paradigma perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Tindak lanjutnya adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka panjang, menengah maupun jangka pendek, sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun disebut Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), jangka menengah 5 tahun yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perencanaan pembangunan di Kabupaten/ Kota harus terjadi keselarasan dan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat Provinsi dan pusat. Oleh karena itu Penyusunan RKPD Kabupaten/ Kota harus mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional.

RKPD merupakan penjabaran rencana penyelenggaraan pembangunan untuk mencapai visi dan misi daerah. RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah yang merupakan landasan serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat, yang tercermin pada program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMD sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu dalam penyusunan dokumen RKPD dan penentuan program dan kegiatan dalam RKPD harus perpedoman pada Program dan prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD, sehingga terjadi konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan pembangunan, serta konsep pembangunan dapat lebih terarah.

RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan tahun 2009 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2013 – 2018, dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, perkembangan kondisi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan masyarakat yang ada, isu strategis yang mungkin akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antarwilayah serta penjaringan aspirasi masyarakat, dengan pendekatan dalam perencanaan yaitu partisipatif, teknokratis, *Top-Down Planning* dan *Bottom-up Planning* serta politik.

Penyusunan RKPD Kabupaten Magetan tahun 2017 dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Perumusan Rancangan awal RKPD

Dilaksanakan evaluasi kinerja RKPD tahun 2015, permasalahan pembangunan yang dihadapi tahun 2015, perumusan sasaran, arah

kebijakan, program prioritas tahun 2017 untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Perumusan Rancangan awal RKPD dilaksanakan tim Kabupaten pada Minggu I – II Januari 2015.

2. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/ Kelurahan

Merupakan tahap penggalian dan penjaringan aspirasi/ usulan kegiatan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat desa/ kelurahan untuk diusulkan dalam APBD Kabupaten, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat Desa/ kelurahan, meliputi unsur Pemerintah Desa, BPD, LPM, Ketua RW, Ketua RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, dan lainnya yang koordinasikan dari unsur Kecamatan. Musrenbang tingkat desa/ Kelurahan dilaksanakan pada Minggu III – IV Januari 2016.

3. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk menginventarisasi, membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan dari kecamatan hasil kompilasi usulan kegiatan pembangunan hasil musrenbang seluruh Kelurahan/desa dalam satu wilayah Kecamatan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magetan. Unsur yang dilibatkan meliputi unsur Kecamatan, Lurah/Kepala Desa beserta Perwakilan perangkat kelurahan/desa, Bappeda Kab. Magetan, Anggota DPRD Asal Dapil Kecamatan bersangkutan, SKPD Kabupaten yang melaksanakan tupoksi program prioritas daerah DITATA INDAH plus INSANI, Tokoh Perempuan/PKK, Organisasi Masyarakat tingkat kecamatan (Ormas Keagamaan, KNPI, dll), LSM, dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan. Kebijakan perencanaan pembangunan Kab. Magetan tahun 2017 memberikan anggaran khusus untuk mengakomodir usulan hasil Musrenbang Kecamatan. Musrenbang tingkat Kecamatan dilaksanakan pada Minggu I – II Pebruari 2016.

4. Forum SKPD

Tahap ini mempertemukan seluruh Kepala SKPD dengan tim Bappeda, yang dipimpin Asisten Sekda/ Staf Ahli Bupati guna dilakukan sinkronisasi dan verifikasi seluruh usulan program dan kegiatan SKPD dalam rancangan Renja SKPD dan usulan hasil Musrenbang tingkat kecamatan, untuk menyelaraskan dengan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten. Forum SKPD dilaksanakan pada Minggu III Pebruari 2016

5. Pra-Musrenbang Kabupaten

Forum ini dikoordinasikan oleh Bappeda dengan mempertemukan seluruh Kecamatan dengan SKPD dalam membahas dan mencermati usulan-usulan hasil musrenbang kecamatan untuk dapat atau tidaknya ditetapkan dalam usulan program dan kegiatan SKPD tahun anggaran 2017, berdasarkan kesesuaian dengan program prioritas pembangunan Daerah maupun program prioritas SKPD. Pra-Musrenbang Kabupaten dilaksanakan pada Minggu IV Pebruari 2016.

6. Konsultasi Publik

Merupakan forum konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan aspirasi terutama secara teknokratis (keilmuan), dengan mengundang akademisi, organisasi profesi, pengusaha, LSM, insan pers dan lainnya, diharapkan diperoleh rumusan untuk penyempurnaan sasaran dan program prioritas yang telah disusun agar lebih tepat sasaran. Konsultasi publik dilaksanakan pada awal bulan Maret 2016

7. Sinkronisasi Rancangan Renja SKPD

Merupakan tahapan lanjutan hasil Forum SKPD, dengan melakukan penajaman dan sinkronisasi antara Rancangan Renja SKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten. Kegiatan Sinkronisasi Rancangan Renja SKPD dilaksanakan pada Minggu I – II Maret 2016.

8. Penyusunan Rancangan awal RKPD

Dokumen rancangan awal RKPD merupakan kompilasi hasil forum SKPD, Pra-Musrenbang, Konsultasi Publik dan sinkronisasi Rancangan Renja SKPD, merupakan materi yang dibahas dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, sehingga wajib disiapkan saat pelaksanaan Musrenbang kabupaten, yaitu pada tanggal 10 Maret 2016.

9. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dari pembangunan daerah, yaitu Pemerintah Daerah, DPRD, Instansi vertikal, Unsur Pemerintah Provinsi, seluruh SKPD, Desa/ Kelurahan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan lainnya dalam forum musyawarah bersama untuk memperoleh masukan dan aspirasi dari seluruh peserta musrenbang, dan nantinya untuk menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Magetan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2016.

10. Perumusan Rancangan Akhir RKPD (Sinkronisasi Rancangan awal RKPD terhadap pokok-pokok pikiran DPRD dan masukan-masukan Musrenbang Kabupaten)

Merupakan tahapan lanjutan dan penyempurnaan rancangan awal RKPD, memadukan dan harmonisasi dengan pokok-pokok pikiran DPRD serta pengintegrasian dengan program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD beserta pagu indikatifnya. Selanjutnya juga dilaksanakan harmonisasi dan sinergi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Penyusunan rancangan akhir RKPD ini dilakukan oleh Kepala Bappeda beserta tim, berkoordinasi dengan Kepala SKPD, yang dilaksanakan selama bulan April 2016 sampai dengan awal Bulan Mei 2016.

11. Telaahan terhadap RKPD Provinsi Jatim dan RKP Nasional

Tahap sinkronisasi dan harmonisasi program prioritas pembangunan dalam Rancangan RKPD Kab. Magetan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan provinsi Jawa Timur dalam Musrenbang RKPD Provinsi, sehingga terjadi keselarasan program pembangunan. Telaahan tersebut dilaksanakan setelah pelaksanaan Musrenbang Tingkat Provinsi pada tanggal 13 April 2016.

12. Pembahasan Rancangan akhir RKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Rancangan Akhir RKPD dibahas di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan sinkronisasi akhir terkait kemampuan APBD, Program prioritas pemerintah Daerah dan Sinkronisasi dengan pokok-pokok pikiran DPRD. Pembahasan oleh TAPD dilaksanakan pada Minggu III Bulan Mei 2016.

13. Reviu Rancangan Akhir RKPD

Sesuai dengan Permendagri nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, mengamanatkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melaksanakan reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan dilaksanakan reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD Kab. Magetan tahun 2017 oleh Inspektorat Kab. Magetan pada minggu ke IV Bulan Mei 2016.

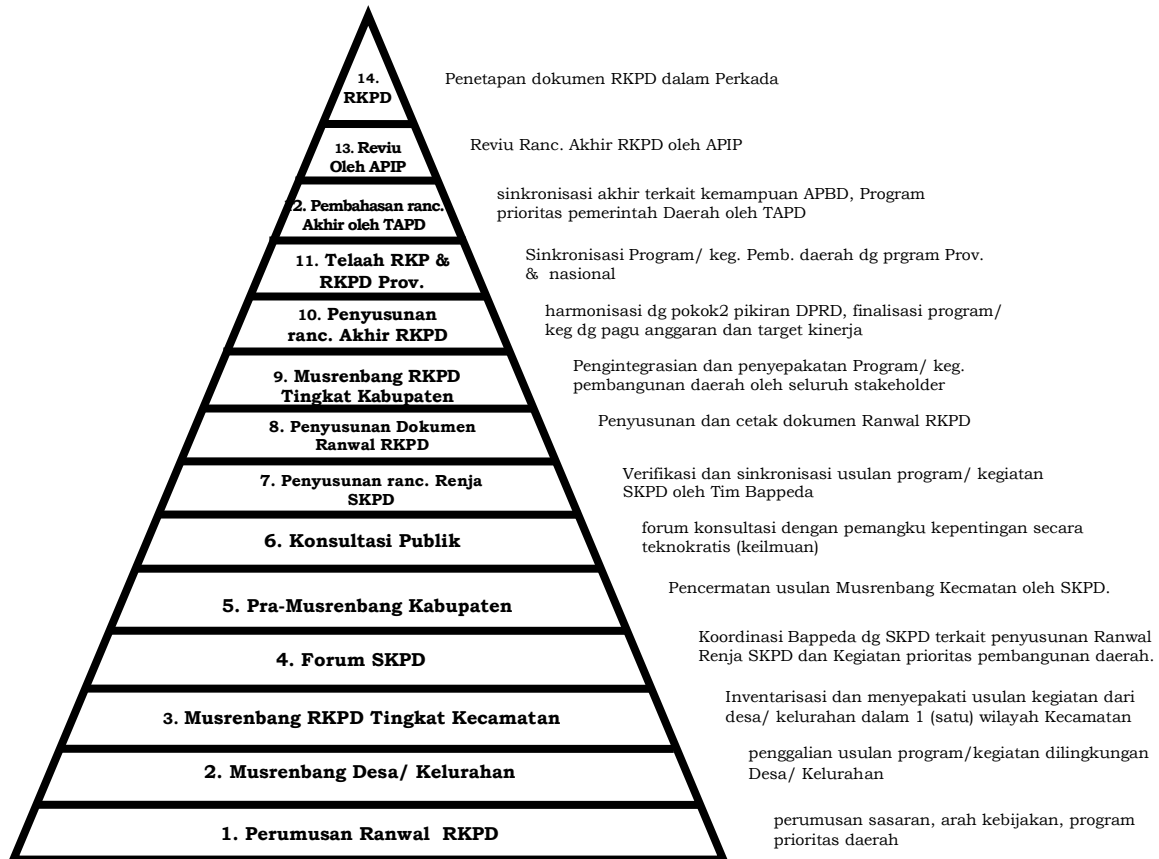
14. Penetapan dokumen RKPD

Tahap akhir dari kegiatan penyusunan RKPD adalah penyajian rancangan akhir RKPD menjadikan dokumen final RKPD, untuk selanjutnya di tetapkan dengan Peraturan Bupati Magetan, yang memuat

seluruh rencana program dan kegiatan Pembangunan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran 2017.

Secara diagramatik, tahapan penyusunan RKPD Kab. Magetan tahun 2017 dapat dibuat dalam bentuk Piramida sebagai berikut :

GAMBAR 1.1
DIAGRAM TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD KAB. MAGETAN TAHUN 2017



Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magetan, menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2017, untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD tahun 2017.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 3);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 518)
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 03 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019.
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2017.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2009 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan tahun 2012 – 2032. (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2012 Nomor 24)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 42);
19. Keputusan Bupati Magetan Nomor 14 tahun 2015 tentang pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD tahun 2013 – 2018 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan

1.3 Hubungan Antar Dokumen

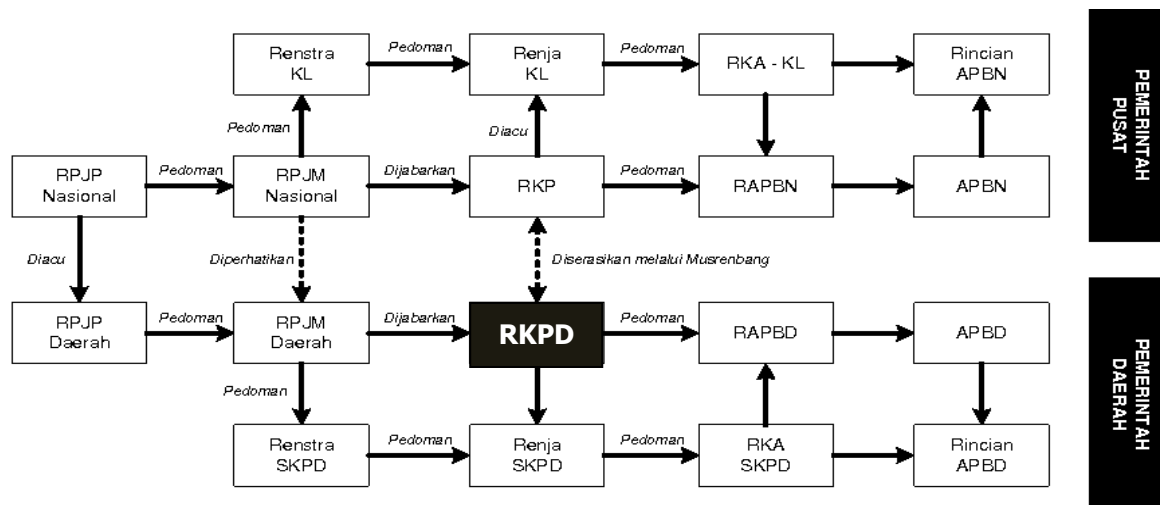
Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Secara hierarkis RKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD dan RPJMD, dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun Provinsi, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran di Daerah meliputi :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 20 tahunan,
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 5 tahunan,
- 3) Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD) periode 5 tahunan,
- 4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode 1 tahunan , dan
- 5) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) periode 1 tahunan.

Seluruh dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan dokumen perencanaan yang membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut :

GAMBAR 1.2
HUBUNGAN KETERKAITAN ANTARA RKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN LAINNYA



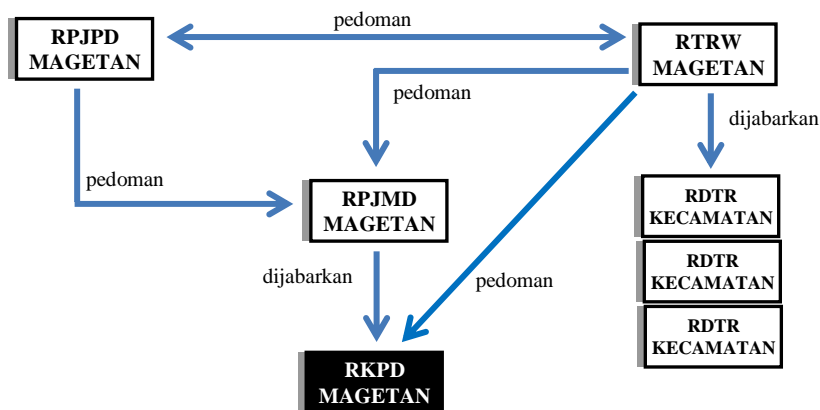
Mengacu pada Gambar diatas dapat diketahui bahwa secara rinci Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- RKPD disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional dan RKPD Provinsi melalui mekanisme Musrenbang RKPD
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah
- RKPD disusun dengan memperhatikan dan mengacu Renstra SKPD, terkait program dan kegiatan serta target capaian kinerja.
- RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD dan RKA SKPD yang disusun terkait program dan kegiatan, capaian kinerja dan pagu anggaran yang tersedia, sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing - masing SKPD
- Selanjutnya RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD dengan memperhatikan Renja SKPD dan kemampuan keuangan daerah.

Pembangunan daerah sebagai upaya yang sistematis untuk mengubah kondisi menuju arah lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien dan efektif melalui proses yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan di Kab. Magetan harus diarahkan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan, mewujudkan keterpaduan pembangunan

antar sektor, mengembangkan potensi lokal agribisnis, industri, dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan (alam). Maka, perencanaan pembangunan senantiasa berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan tahun 2012 – 2032.

GAMBAR 1.3
HUBUNGAN KETERKAITAN ANTARA RKPD DENGAN DOKUMEN TATA TUANG

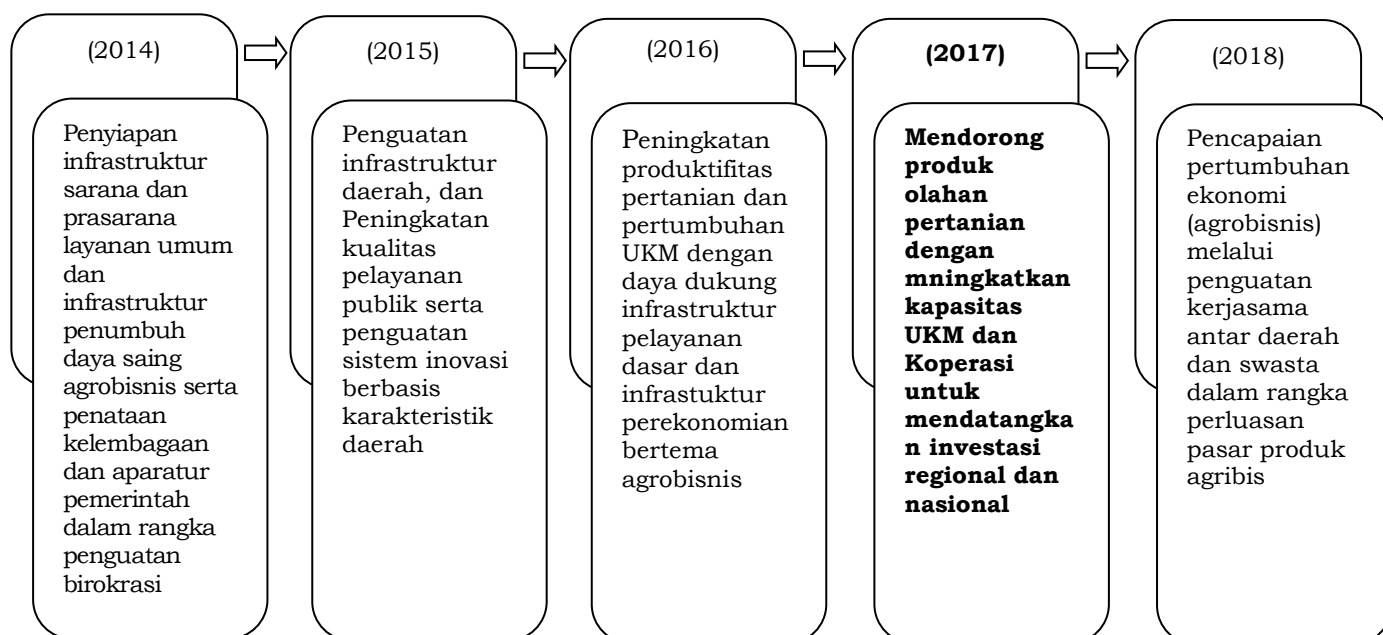


Mengacu pada Gambar diatas dapat diketahui bahwa hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan tata ruang, adalah sebagai berikut :

- RKPD disusun dengan mempedomani RPJMD, dengan RPJMD memperhatikan dan mengacu Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)
- RKPD disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan.

RKPD Kab. Magetan tahun 2017 merupakan Arah kebijakan pembangunan daerah tahun keempat dari perodesasi RPJMD Kab. Magetan tahun 2013 – 2018, diprioritaskan dalam rangka mendorong produk olahan pertanian dengan meningkatkan kapasitas UKM untuk mendatangkan investasi regional dan nasional. Indikasi capaian dalam arah kebijakan adalah meningkatnya Industri Kecil Menengah (IKM).

GAMBAR 1.4
ARAH KEBIJAKAN TAHUNAN SELAMA 5 TAHUN MASA RJPMD



1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Merujuk pada lampiran V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, maka penyajian dokumen RKPD Kab. Magetan tahun 2017 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN		
1.1.	Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, kedudukan RKPD dalam periode dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD.
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
1.3.	Hubungan antar Dokumen	hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan (RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kab, Renstra SKPD, Renja SKPD, RTRW Kab.) beserta penjelasannya.
1.4	Sistematika Dokumen RKPD	Berisi tentang sistematika penyajian/ penyusunan RKPD
1.5	Maksud dan Tujuan	Berisi tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		
2.1	Gambaran Umum Kondisi Daerah	Menjelaskan dan meyajikan dasar-dasar analisis, kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	Menjelaskan kondisi geografi dan demografi daerah, dan analisis kaitannya terhadap perencanaan pembangunan
2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Berisi pengantar analisis dan penjasalan kondisi umum aspek kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.
2.1.3	Aspek Pelayanan Umum	Berisi pengantar analisis dan penjesalan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	Berisi pengantar analisis dan penjesalan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	Mencakup evaluasi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/ pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja, keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu dan tahun berjalan terhadap RPJMD.
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD, serta gambaran solusi yang ditawarkan.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi dan kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD - Menggambarkan kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah
3.1.1	Kondisi Ekonomi Daerah	Menggambarkan Kondisi Ekonomi Daerah Tahun (n-2 s/d n-1) dan Indikator Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi yang tersedia di Daerah.
3.1.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	Menjelaskan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi eksternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian pembangunan daerah (Tahun n s/d n+1)
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kapasitas keuangan daerah dengan kerangka pendanaan yang disusun dalam RPJMD (Pendapatan, Belanja, Pembiayaan) - Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan (Tahun n-3 s/d n+1) - Arah Kebijakan Keuangan Daerah (Arah Kebijakan Pendapatan Daerah; Arah Kebijakan Belanja Daerah; Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah) (Tahun n-3 s/d n+1)

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Menjelaskan tentang hubungan visi/ misi dan tujuan/ sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD
4.2	Prioritas dan Pembangunan	Gambaran Prioritas pemb daerah dan kaitannya dengan RPJMD
4.2.1	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	telaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD yang terkait dengan arahan prioritas program/ kegiatan untuk tahun yang direncanakan
4.2.2	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas pemb daerah korelasinya dg prioritas dan sasaran pemb. Nasional dan regional, pengembangan sektor unggulan daerah, dan isu strategis daerah, serta review (dibandingkan) dg prioritas pemb dlm RPJMD tahun rencana, dan target capain kinerja tahun direncanakan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	
	Memberikan informasi program & kegiatan tahun rencana setiap SKPD, target capaian kinerja beserta pagu indikatifnya
BAB VI PENUTUP	

1.5 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan tahun 2017 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk jangka 1 (satu) tahun.

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2017 :

- a. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan daerah.
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
- c. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan.
- d. Memberikan arah dan menyatukan tujuan kegiatan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Magetan dan SKPD dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2016, dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magetan.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2017 :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan yang terukur.
- b. Sebagai acuan bagi Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Magetan tahun anggaran 2017.
- c. Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan dalam penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2017.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Kondisi Geografis dan Demografi

a. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Magetan yang terletak di ujung barat Propinsi Jawa Timur, dan berada di ketinggian antara 60 s/d 1.660 meter di atas permukaan laut, berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah tepatnya di sebelah selatan dengan Kabupaten Wonogiri dan sebelah barat dengan Kabupaten Karanganyar. Sedangkan disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, sebelah Timur dengan Kabupaten Madiun dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo.

GAMBAR 2.1
PETA WILAYAH KABUPATEN MAGETAN



Magetan merupakan Kabupaten terkecil ke dua se-Jawa Timur setelah Kabupaten Sidoarjo, dengan luas wilayah 688,85 km², terbagi dalam 18 Kecamatan, dengan Kecamatan Parang merupakan Kecamatan terluas dengan luas 71,64 km², sedang Kecamatan Karangrejo dengan luas 15,15 Km² merupakan kecamatan dengan luas terkecil, dengan rata-rata luas tiap kecamatan sebesar 38,27 Km². Jarak antar Ibu kota kecamatan yang tidak terlau jauh merupakan salah satu faktor yang menguntungkan untuk pelaksanaan pembangunan. Jarak terpendek adalah kecamatan Poncol dan Plaosan yang berjarak 3,4 Km dan jarak terjauh kecamatan Parang – Kartoharjo sejauh 41 Km. Sedang jarak terpendek dari Ibu kota kabupaten ke Kecamatan, adalah dengan kecamatan Magetan sejauh 2 Km dan jarak

terjauh dengan kecamatan Kartoharjo dengan jarak 26 Km. Terletak di sekitar 7 ° 38' 30" LS dan 111 ° 20' 30" BT bujur timur, dengan suhu udara berkisar antara 16° - 20° C di daerah pegunungan dan 22° - 26° C di dataran rendah, Magetan merupakan daerah yang berpotensi di bidang Pertanian dan Pariwisata, dengan memiliki curah hujan mencapai 1.481 – 2.345 mm per tahun di dataran tinggi dan 867 – 1.551 mm per tahun untuk dataran rendah.

b. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Magetan bervariasi, dengan kedudukan tanah terletak pada ketinggian antara 25 sampai 100 meter di atas permukaan air laut sekitar 20,28% dari luas wilayah; ketinggian antara 100 sampai 500 meter di atas permukaan air laut sekitar 49,47% dari luas wilayah; sedangkan ketinggian 500 – 1000 meter di atas permukaan air laut luasnya sekitar 16,27% dari luas wilayah, serta ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut luasnya 13,44% dari luas wilayah

Selain itu Kabupaten Magetan mempunyai topografis sebagai berikut:

- a. Wilayah pegunungan dengan kondisi subur di Kecamatan Plaosan, kondisi sedang berada di Kecamatan Panekan, Kecamatan Poncol bagian barat dan Kecamatan Sidorejo, wilayah sedang di Kecamatan Parang, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Poncol bagian timur dan Kecamatan Kawedanan bagian selatan termasuk daerah pegunungan yang kurang subur.
- b. Wilayah dataran rendah dengan kondisi subur di Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Barat, Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Takeran. Kondisi sedang berada di Kecamatan Maospati, Kecamatan Magetan, sebagian Kecamatan Sukomoro. Sedangkan sebagian Kecamatan Bendo dan sebagian Kecamatan Sukomoro termasuk daerah dataran rendah yang kurang subur.

Dilihat dari luas wilayah Magetan 68.884,74 ha, terbagi atas 28.297,24 hektar tanah sawah dan 39.587,50 hektar tanah kering. Pertanian merupakan sektor yang paling dominan di Kabupaten Magetan karena sebagian besar penduduk Magetan hidup dari bidang bercocok tanam. Komoditas tanaman bahan makanan, utamanya padi masih merupakan produk yang besar peranannya bagi masyarakat Magetan.

c. Kondisi Geologi

Kabupaten Magetan merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak di kaki Gunung Lawu. Selain itu endapan batuan vulkanik Kwartir juga ditempati oleh gunung-gunung lain yang berada di Kabupaten Magetan seperti Gunung Lumpang, Gunung Bulusungsang, Gunung Banyuurip, Gunung Puntukpelok, Gunung Sidoramping, Gunung Jobolarangan, Gunung Cemoropenganten, sedangkan Gunung Blego dan Gunung Butak di daerah perbatasan Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Wonogiri tepatnya di Kecamatan Poncol. Keberadaan Gunung Bancak dan Gunung Bungkuk di Kecamatan Parang mewakili batuan gunung api pada jaman Tersier. Gunung Lawu merupakan jenis gunungapi Kwartir yang sudah tidak aktif atau dalam fase istirahat. Oleh sebab itu, bahaya yang dapat ditimbulkan dengan keberadaan gunung-gunung tersebut adalah aliran lahar. Aliran lahar merupakan hasil rombakan batuan dan tanah yang berasal dari gunungapi tersebut. Bahan rombakan tersebut diangkut ke bawah melalui aliran sungai yang mempunyai hulu di gunung-gunung tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan, aliran sungai yang mengalir ke arah timur laut merupakan sungai yang banyak membawa aliran lahar dari Gunung Lawu.

d. Kondisi Potensi Rawan Bencana

Kabupaten Magetan merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak di kaki Gunung Lawu. Selain itu endapan batuan vulkanik Kwartir juga ditempati oleh gunung-gunung lain yang berada di Kabupaten Magetan seperti Gunung Lumpang, Gunung Bulusungsang, Gunung Banyuurip, Gunung Puntukpelok, Gunung Sidoramping, Gunung Jobolarangan, Gunung Cemoropenganten, sedangkan Gunung Blego dan Gunung Butak di daerah perbatasan Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Wonogiri tepatnya di Kecamatan Poncol. Keberadaan Gunung Bancak dan Gunung Bungkuk di Kecamatan Parang mewakili batuan gunung api pada zaman Tersier.

TABEL 2.2
PETA DAERAH RAWAN BENCANA KAB. MAGETAN

No	TITIK LOKASI LOKASI BENCANA ALIRAN LAHAR LEWAT MEDIA SUNGAI
1.	Kali Gonggang, Desa Tunggur, Kecamatan Lembeyan
2.	Kali Gonggang Kecamatan Poncol dan Kecamatan Parang
3.	Gunung Bancak, Kecamatan Parang, Kecamatan Lembeyan, dan Kecamatan Kawedanan
4.	Perpotongan Sungai Trinil, Desa Taji, Kecamatan Sukomoro
5.	Jembatan Ginuk, Desa Ginuk, sungai Trinil, Kecamatan Sukomoro
6.	Jembatan Sedran, Kali Trinil, Desa Sedran, Kecamatan Panekan
7.	Kali Trinil Kecamatan Karas
8.	Kali Ginuk, Desa Ginuk, Kecamatan Karas
9.	Jembatan Milangsri, Kali Catur, Desa Milangsri, Kecamatan Panekan

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Magetan

Sebagian wilayah Kabupaten Magetan adalah wilayah yang rawan bencana alam, seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung dengan tingkatan rendah, menengah dan tinggi. Rawan tanah longsor disebabkan karena kondisi topografi sebagian besar wilayah Kabupaten Magetan adalah pegunungan dengan kontur yang cukup rapat sehingga wajar apabila bencana tanah longsor lebih intens terjadi di kabupaten Magetan. Di beberapa wilayah dengan topografi rendah berpotensi terjadi bencana banjir dengan kategori rendah dan menengah saat terjadi hujan dengan intensitas sangat tinggi. Di beberapa wilayah lain merupakan jalur angin puting beliung.

TABEL 2.3
PEMETAAN KAWASAN RAWAN BENCANA KABUPATEN MAGETAN

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	ANCAMAN BENCANA	TINGKAT KERAWANAN				
				TINGGI	SEDANG	RENDAH		
1	PONCOL	Alastuwo	tanah longsor	√				
		Genilangit	tanah longsor	√				
		Gonggang	tanah longsor	√				
		Cileng	tanah longsor		√			
		Poncol	tanah longsor		√			
		Plangkrongan	tanah longsor	√				
		Sombo	tanah longsor		√			
		Janggan	tanah longsor		√			
		2	PLAOSAN	Puntukdoro	tanah longsor	√		
				Plumpung	tanah longsor	√		
Bulugunung	tanah longsor			√				
Plaosan	tanah longsor			√				
Ngancar	tanah longsor			√				
Sarangan	tanah longsor			√				
Dadi	tanah longsor			√				
Pacalan	tanah longsor				√			
Sidomukti	tanah longsor				√			
Randugede	tanah longsor			√				
3	SIDOREJO	Buluharjo	tanah longsor			√		
		Bogoarum	tanah longsor			√		
		Sumbersawit	tanah longsor	√				
		Sidokerto	tanah longsor		√			
		Sambirobyong	tanah longsor		√			
		Durenan	tanah longsor		√			
4	PANEKAN	Sidomulyo	tanah longsor	√				
		Sumberdodol	tanah longsor		√			

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	ANCAMAN BENCANA	TINGKAT KERAWANAN		
				TINGGI	SEDANG	RENDAH
5	NGARIBOYO	Tapak	tanah longsor		√	
		Bedagung	tanah longsor		√	
		Ngiliran	tanah longsor		√	
		Jabung	tanah longsor	√		
		Pendem	tanah longsor		√	
6	PARANG	Selotinatah	tanah longsor		√	
		Ngaglik	tanah longsor		√	
7	KARTOHARJO	Troso	tanah longsor		√	
		Jajar	banjir	√		
		Ngelang	banjir	√		
		Pencol	banjir		√	
8	LEMBEYAN	Sukowidi	banjir		√	
		Kedungpanji	banjir		√	
		Dukuh	banjir		√	
9	PANEKAN	Banjarejo	puting beliung		√	
		Sidowayah	puting beliung		√	
10	SUKOMORO	Wates	puting beliung		√	
		Milangsari	puting beliung		√	
		Bandar	puting beliung		√	
		Bibis	puting beliung		√	
		Sukomoro	puting beliung		√	
		Bulu	puting beliung		√	
		Tambakmas	puting beliung		√	
		Tamanan	puting beliung		√	
		Kembangan	puting beliung		√	
		Jungke	puting beliung		√	
11	KARAS	Temboro	puting beliung		√	
		Kleco	puting beliung		√	
12	BENDO	Belotan	puting beliung		√	
		Dukuh	puting beliung		√	
		Duwet	puting beliung		√	
13	TAKERAN	Bulugledeg	puting beliung		√	
		Sawojajar	puting beliung		√	
		Madigondo	puting beliung		√	
		Waduk	puting beliung		√	
		Jomblang	puting beliung		√	
14	NGUNTORONA DI	Tawangrejo	puting beliung		√	
		Driyorejo	puting beliung		√	
		Semen	puting beliung		√	
		Nguntoronadi	puting beliung		√	
		Goranggareng	puting beliung		√	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Magetan

Kekeringan lahan merupakan salah satu bencana alam yang disebabkan oleh daerah tersebut kekurangan suplai air permukaan baik dalam bentuk sungai maupun saluran irigasi. Kekeringan lahan di daerah tersebut dapat ditanggulangi dengan adanya suplai air dari daerah lain. Suplai air dari daerah lain dapat dilakukan dengan melakukan pemboran air tanah atau pengambilan air bawah tanah. Faktor-faktor penyebab kekeringan lahan tersebut adalah keterbatasan aliran permukaan (sungai dan irigasi), keterbatasan mata air, dan curah hujan kecil.

Berdasarkan hasil analisis, kecamatan di Kabupaten Magetan yang termasuk dalam klas kekeringan lahan rendah adalah Kecamatan Barat, Kecamatan Bendo, Kecamatan Karas, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Maospati, Kecamatan Panekan, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Nguntoronadi, Kecamatan Poncol, dan Kecamatan Plaosan.

e. Kondisi Penggunaan Lahan dan Potensi Pengembangan Wilayah

Di Kabupaten Magetan kawasan yang didefinisikan sebagai kawasan permukiman perkotaan adalah ibukota Kabupaten Magetan, Kota Maospati, Kecamatan Plaosan serta kecamatan sesuai dengan peraturan daerah tentang penetapan batas wilayah kota di lingkungan Kabupaten Magetan. Pada wilayah yang didominasi kegiatannya untuk kegiatan yang bersifat kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan bagi penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya.

Lahan yang termasuk dalam kategori subur di perbukitan terdapat di Kecamatan Plaosan, sedangkan lahan subur yang berada di dataran rendah terdapat di Kecamatan Karangmojo, Karangrejo, Barat, Karas, Kartoharjo, dan Takeran. Lahan yang termasuk dalam kategori kesuburan sedang yang berada di perbukitan terdapat di Kecamatan Panekan dan Kecamatan Poncol bagian barat. Sementara itu, lahan dengan tingkat kesuburan sedang yang berada di dataran rendah terdapat di Kecamatan Magetan, Maospati, sebagian Kecamatan Bendo, sebagian Kecamatan Sukomoro, dan sebagian Kecamatan Kawedanan.

Lahan yang termasuk dalam kategori kurang subur/kritis di perbukitan terdapat di Kecamatan Parang, kecamatan Lembeyan, Kecamatan Poncol bagian timur dan Kecamatan Kawedanan bagian selatan. Sementara itu, di dataran rendah, lahan yang termasuk dalam kategori kurang subur/kritis terdapat di Kecamatan Bendo dan sebagian Kecamatan Sukomoro. Ditinjau dari segi karakteristik tanah wilayah dengan potensi sebagai kawasan budidaya pengembangan tanaman perkebunan, Kabupaten Magetan cukup mempunyai andil dalam meningkatkan pemasukan daerah apabila dikelola secara berkelanjutan. Adapun jenis tanaman yang mempunyai potensi sebagai produk unggulan di wilayah ini adalah:

- Budidaya tanaman tahunan tebu (Karangrejo, Karas, Sukomoro, Kawedanan, Takeran)
- Budidaya tanaman jeruk pamelon (Bendo, Takeran, Sukomoro, Kawedanan)
- Budidaya kopi (Poncol, Plaosan)
- Budidaya tembakau (Plaosan, Poncol)
- Budidaya kelapa (Parang, Poncol)
- Budidaya jambu mente (Poncol)
- Budidaya tanaman sayur dan buah durian tawin (Plaosan, Poncol, dan Panekan)

Budidaya jeruk pamelu berkembang pada daerah dengan istilah BETASUKA yang diuraikan menjadi kawasan dengan potensi unggulan jeruk/sebagai sentra pengembangan di mana wilayahnya adalah Kecamatan Bendo, Takeran, Sukomoro dan Kawedanan. Sebenarnya penyebaran tanaman jeruk tersebut banyak terdapat di wilayah Kabupaten Magetan

Kawasan yang banyak digali dalam pengembangan hasil tambang batu adalah di sekitar Plaosan, Poncol, Parang, Sukomoro, dan Bendo yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, tapi pemanfaatan/ pengelolaan hasil tambang tersebut masih dilakukan secara sederhana oleh masyarakat, sehingga sulit untuk dipantau keberadaannya. Untuk pengembangan bahan galian C diharapkan adanya pemantauan secara berkala untuk menghindari pelongsoran tanah yang dapat menyebabkan melebarnya sungai, begitu juga dengan proses pembuatan batu bata yang memanfaatkan tanah dimana pada tanah tersebut memiliki unsur kesuburan, maka apabila tanah tersebut terus digali sebagai bahan pembuatan batu bata dan tidak mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan akan menimbulkan kerusakan tatanan tanah dan lingkungan, seperti pada kawasan Bendo.

f. Kondisi Demografi

Kabupaten Magetan terbagi dalam 18 Kecamatan, 207 Desa, 28 Kelurahan, 1.048 RW dan 4.653 RT, yang berdasarkan klasifikasinya seluruh Desa/ Kelurahan berklasifikasi swadaya. Jumlah penduduk Kabupaten Magetan tahun 2015 sebanyak 677.703 jiwa, jumlah penduduk yang tertinggi di Kecamatan Panekan 56.934 jiwa dan terendah di Kecamatan Nguntoronadi 20.578 Jiwa.

Secara umum kepadatan penduduk di kabupaten Magetan tahun 2015 adalah 989 Jiwa/ Km², sedang Kecamatan yang paling jarang penduduknya di Kecamatan Poncol dengan kepadatan 594 jiwa/ Km² dan penduduk paling padat adalah di Kecamatan Magetan dengan kepadatan penduduk 2.121 Jiwa/ Km².

Dari data kependudukan yang ada, diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Kab. Magetan tahun 2015 mengalami minus, sebesar -0,026%, dibandingkan dengan tahun 2014 yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,07%. Data kependudukan Kabupaten Magetan lebih rinci tersaji dalam tabel berikut :

TABEL 2.4
PENDUDUK AKHIR TAHUN MENURUT KECAMATAN
TAHUN 2013 – 2015

No.	Kecamatan	Penduduk			Pertumbuhan		
		2013	2014	2015*)	2013	2014	2015*)
1	Poncol	30.264	30.414	30.501	22	150	87
2	Parang	46.483	46.482	44.524	117	-1	-1.958
3	Lembeyan	41.293	41.439	41.741	92	146	302
4	Takeran	39.383	39.510	38.908	91	127	-602
5	Kawedanan	46.069	46.006	42.978	93	98	-3.028
6	Nguntoronadi	24.053	24.151	20.578	-143	-63	-3.573
7	Magetan	47.695	47.683	45.391	-26	-12	-2.292
8	Ngariboyo	40.291	40.372	38.121	-33	81	-2.251
9	Plaosan	53.598	53.657	51.429	-144	59	-2.228
10	Sidorejo	28.857	28.942	27.315	201	85	-1.627
11	Panekan	56.412	56.529	56.934	235	117	405
12	Sukomoro	34.506	34.479	32.904	-61	-27	-1.575
13	Bendo	40.974	40.943	42.286	205	-31	1.343
14	Maospati	46.707	46.706	46.856	-9	-1	150
15	Karangrejo	26.209	26.133	24.564	-69	-76	-1.569
16	Karas	32.669	33.038	35.776	--	369	2.738
17	Barat	33.283	33.174	31.348	30	-109	-1.826
18	Kartoharjo	26.412	26.409	25.549	26	-363	-860
Jumlah		695.158	695.707	677.703	627	549	-18.004

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Magetan 2016; *) angka sementara

Penduduk Kabupaten Magetan mayoritas memeluk agama Islam. Namun demikian ada juga pemeluk agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Kerukunan umat beragama sebagai landasan utama kegotongroyongan, senantiasa terbina sehingga gesekan dan permasalahan antar umat beragama hampir tidak pernah terjadi.

TABEL 2.5
KOMPOSISI PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN YANG DIANUT
TAHUN 2013 – 2015

No.	Uraian	Tahun (Jiwa)			Prosentase		
		2013	2014	2015*)	2013	2014	2015*)
1.	Islam	701.099	690.897	670.180	98,68 %	99,00 %	98,89%
2.	Kristen	4.235	2.651	5.151	0,5%	0,38 %	0,76%
3.	Katholik	4.625	3.389	1.626	0,6%	0,49 %	0,24%
4.	Hindu	190	155	136	0,03 %	0,02 %	0,02%
5.	Budha	325	676	542	0,05 %	0,10 %	0,08%
6.	Lain-lain	-	34	68	-	0,01 %	0,01%
JUMLAH		710.474	697.802	677.703	100 %	100%	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Magetan 2016; *) angka sementara

Sebagian besar wilayah Kabupaten Magetan merupakan kawasan pedesaan. Masyarakatnya masih merupakan masyarakat homogen yang didominasi berasal dari suku Jawa. Interaksi sosial masih sangat tinggi. Kondisi sosial budaya Kabupaten Magetan sangat kondusif, dimana rasa kegotongroyongan dan toleransi masih sangat dijunjung tinggi. Oleh sebab itu rasa aman, damai, guyub rukun dan saling menghormati antar

masyarakat dan antar pemeluk agama sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari, dan merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan mampu memberikan dampak positif bagi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Magetan.

Budaya masyarakat Magetan sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan kegotongroyongan, serta Juga dipengaruhi oleh adat Kejawen yang masih diwarnai kepercayaan-kepercayaan kepada hal-hal gaib, sehingga beberapa budaya leluhur masih tetap lestari, seperti upacara labuhan sarangan, ledhug suro, acara bersih desa, prosesi pernikahan dan pemakaman, acara napak tilas dan lainnya. Hal tersebut justru menjadikan kekayaan budaya daerah yang mampu dijadikan sajian wisata budaya menarik dan bernilai ekonomi.

Jumlah pekerja menurut lapangan usaha hingga tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah pekerja di sektor pertanian masih mendominasi sebesar 41,88 % dari total pekerja, sektor lain yang juga cukup besar ditekuni oleh 22,93 % pekerja adalah sektor perdagangan, hotel dan rumah makan, sedang sektor jasa sosial kemasyarakatan menempati urutan ke tiga sebesar 13,90 % pekerja , lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut :

TABEL 2.6
JUMLAH PEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA
TAHUN 2013 - 2015

NO.	KETERANGAN	TAHUN (JIWA)			TAHUN (%)		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
1.	Pertanian	198.789	208.728	138.836	62,38	67,74	41,88
2.	Pertambangan dan penggalian	21	22	2.067	0,06	0,01	0,62
3.	Industri pengolahan	25.124	2640	32.304	7,88	0,86	9,74
4.	Listrik, gas dan air minum	391	411	1620	0,12	0,13	0,49
5.	Konstruksi	9.831	10323	21.884	3,06	3,35	6,60
6.	Perdagangan, hotel & rumah makan	49.371	51840	76.015	15,49	16,82	22,93
7.	Angkutan dan komunikasi	4.798	4702	8.989	1,51	1,53	2,71
8.	Keuangan, asuransi dan usaha persewaan bangunan	952	1001	3.686	0,30	0,32	1,11
9.	Jasa sosial kemasyarakatan	28.593	27735	46.092	8,97	9,00	13,90
10.	Lain-lain	791	751	-	0,25	0,24	-
JUMLAH		318.661	308.153	331.493	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Magetan 2016
(Swei angkatan kerja nasional 2015)

Selama tiga (3) tahun terakhir telah terjadi pergeseran struktur angkatan kerja, dengan semakin bergesernya pekerja di bidang pertanian ke bidang lain yang mengalami peningkatan cukup signifikan, yaitu

perdagangan, hotel dan rumah makan, industri pengolahan konstruksi dan jasa sosial kemasyarakatan.

Komposisi penduduk menurut pendidikan merupakan isu sentral, karena dengan pembangunan Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kemampuan sumber daya manusia.

TABEL 2.7
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2011 - 2015

No	Tingkat Pendidikan	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1.	Tidak Sekolah	15,85	16,91	15	22,24	17,21
2.	SD/ MI	39,86	40,85	39	30,74	30,31
3.	SMP/ MTs	24,54	16,69	16	18,95	20,83
4.	SMA/ SMK/ MA	16,20	21,12	22	21,47	25,64
5.	D1/ D3	0,00	1,21	2	} 6,59	1,41
6.	S1	0,77	3,09	4		4,41
7.	S2/ S3	0,00	0,13	0,21		0,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Magetan 2016

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Sosial

2.1.2.1 Kondisi Perekonomian

a. Struktur Perekonomian

Untuk melihat struktur perekonomian suatu wilayah dapat diketahui dari distribusi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Tiga sektor utama : Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri Pengolahan, konstruksi dan administrasi pemerintahan menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Magetan dengan kontribusi sebesar 73,73 % pada tahun 2015.

TABEL 2.8
STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2011 - 2015

Sektor	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
PRIMER					
1. Pertanian	34,21	34,32	34,44	34,76	34,36
2. Pertambangan dan penggalian	1,78	1,67	1,59	1,64	1,60
SEKUNDER					
3. Industri Pengolahan	9,82	9,64	9,58	9,61	9,63
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
5. Air Bersih	0,24	0,23	0,21	0,19	0,19
6. Konstruksi	7,87	7,77	7,77	7,88	7,83
TERSIER					
7. Perdagangan Besar dan Eceran	13,88	13,96	14,18	13,92	14,21
8. Transportasi dan Pergudangan	1,22	1,19	1,24	1,32	1,37
9. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,16	2,32	2,51	2,59	2,65
10. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,62	3,72	3,88	4,06	4,19
11. Informasi dan Komunikasi	6,19	6,40	6,48	6,28	6,33
12. Real Estate	1,39	1,37	1,39	1,37	1,39

Sektor	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
13. Jasa Perusahaan	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33
14. Administrasi Pemerintahan	9,21	9,10	8,48	7,90	7,70
15. Jasa Pendidikan	4,03	4,11	4,08	4,16	4,13
16. Jasa Kesehatan dan Sosial	0,76	0,76	0,78	0,83	0,84
17. Jasa – jasa lainnya	3,23	3,06	3,03	3,14	3,22
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan Tahun 2016; (SNA 2010)

Perekonomian Kabupaten Magetan yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 pada tahun 2014 sebesar Rp.10.296 Milyard dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 10.826 Milyard atau naik sebesar 5,15 %.

TABEL 2.9
NILAI PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 TAHUN 2013 – 2015

Sektor	Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)			Laju Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2014	2015
PRIMER					
1. Pertanian	3.171.895,2	3.278.700,0	3.388.323,0	3,37%	3,34
2. Pertambangan dan penggalian	161.302,2	166.163,0	170.388,4	3,01%	2,54
SEKUNDER					
3. Industri Pengolahan	951.855,7	1.003.981,8	1.057.042,3	5,48%	5,29
4. Pengadaan Listrik dan Gas	6.595,8	6.907,6	6.809,8	4,73%	-1,42
5. Air Bersih	23.769,6	24.400,5	25.358,6	2,65%	3,93
5. Konstruksi	768.091,4	819.750,6	852.908,8	6,73%	4,04
TERSIER					
7. Perdagangan Besar dan Eceran	1.437.353,2	1.527.098,3	1.632.557,6	6,24	6,91
8. Transportasi dan Pergudangan	130.481,5	144.829,0	156.281,6	11,00	7,91
9. Jasa Keuangan dan Asuransi	244.164,1	264.278,3	283.860,3	8,24	7,41
10. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	382.482,4	415.213,2	447.684,8	8,56	7,82
11. Informasi dan Komunikasi	713.886,4	771.782,5	837.717,1	8,11	8,54
12. Real Estate	140.404,7	150.562,3	158.337,3	7,23	5,16
13. Jasa Perusahaan	31.770,8	34.757,3	36.843,0	9,40	6,00
14. Administrasi Pemerintahan	824.814,4	828.707,5	858.292,3	0,47	3,57
15. Jasa Pendidikan	397.154,4	423.471,5	450.392,4	6,63	6,36
16. Jasa Kesehatan dan Sosial	78.157,0	86.543,6	93.889,3	10,73	8,49
17. Jasa – jasa lainnya	325.400,7	349.598,0	370.032,3	7,44	5,85
PDRB	9.789.579,7	10.296.744,9	10.826.718,9	5,18	5,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan tahun 2016; (SNA 2010)

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik) kabupaten Magetan cenderung stabil dan fluktuasinya searah dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur meskipun selalu lebih rendah dibandingkan Jawa Timur, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah :

TABEL 2.10
PERTUMBUHAN EKONOMI MAGETAN DAN JAWA TIMUR TAHUN 2011 – 2015

No	Tahun	Magetan	Jawa Timur
1.	2011	5,64	6,44
2.	2012	5,79	6,64
3.	2013	5,82	6,08
4.	2014	5,18	5,86
5.	2015	5,15	5,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan tahun 2016; (SNA 2010)

Kontribusi kelompok sektor primer (sektor pertanian, pertambangan dan penggalian) terhadap tahun PDRB dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 cenderung stagnan dikisaran sebesar 35,95 %. Kontribusi kelompok sektor sekunder (sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air minum , sektor konstruksi) juga cenderung tetap dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 di kisaran 17,50%. Kontribusi di kelompok sektor tersier juga bergerak sangat tipis dari 46,62 % pada tahun 2011 menjadi 46,35 % pada tahun 2015.

TABEL 2.11
PERANAN SEKTORAL PDRB ATAS HARGA BERLAKU TAHUN 2011 – 2015

Sektor	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
PRIMER					
1. Pertanian	34,21	34,32	34,44	34,76	34,36
2. Pertambangan dan penggalian	1,78	1,67	1,59	1,64	1,60
SKUNDER					
3. Industri Pengolahan	9,82	9,64	9,58	9,61	9,63
4. Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
5. Air Bersih	0,24	0,23	0,21	0,19	0,19
6. Konstruksi	7,87	7,77	7,77	7,88	7,83
TERSIER					
7. Perdagangan Besar dan Eceran	13,88	13,96	14,18	13,92	14,21
8. Transportasi dan Pergudangan	1,22	1,19	1,24	1,32	1,37
9. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,16	2,32	2,51	2,59	2,65
10. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,62	3,72	3,88	4,06	4,19
11. Informasi dan Komunikasi	6,19	6,40	6,48	6,28	6,33
12. Real Estate	1,39	1,37	1,39	1,37	1,39
13. Jasa Perusahaan	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33
14. Administrasi Pemerintahan	9,21	9,10	8,48	7,90	7,70
15. Jasa Pendidikan	4,03	4,11	4,08	4,16	4,13
16. Jasa Kesehatan dan Sosial	0,76	0,76	0,78	0,83	0,84
17. Jasa – jasa lainnya	3,23	3,06	3,03	3,14	3,22
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan tahun 2016; (SNA 2010)

Kondisi diatas menunjukkan bahwa sektor pertanian masih sangat dominan dalam menyumbang PDRB Kabupaten. Sektor tersier, terutama

sektor perdagangan besar dan eceran menunjukkan perkembangan semakin cepat.

TABEL 2.12
PERTUMBUHAN DAN SUMBER PERTUMBUHAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2013 – 2015

Lapangan Usaha	Pertumbuhan (%)			Sumber Pertumbuhan (%)		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Pertanian	3,18	3,37	3,34	1,09	1,16	1,16
2. Pertambangan dan pengalihan	1,46	3,01	2,54	0,02	0,05	0,04
3. Industri pengolahan	5,94	5,48	5,28	0,57	0,52	0,51
4. Pengadaan Listrik dan Gas	6,06	4,73	-1,42	0,00	0,00	0,00
5. Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah	4,23	2,65	3,93	0,01	0,01	0,01
6. Konstruksi	6,26	6,73	4,04	0,49	0,52	0,32
7. Perdagangan Besar dan Eceran	8,61	6,24	6,91	1,20	0,89	0,96
8. Transportasi dan Pergudangan	10,46	11,00	7,91	0,12	0,14	0,10
9. Jasa Keuangan dan Asuransi	13,90	8,24	7,41	0,32	0,21	0,19
10. Jasa lainnya	6,88	7,44	5,85	0,21	0,23	0,18
PDRB	5,82	5,18	5,15	5,82	5,18	5,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan tahun 2015; (SNA 2010)

c. Laju Inflasi

Inflasi di Kabupaten Magetan terjadi fluktuatif. terendah tahun 2014 sebesar 6,08% membaik pada tahun 2015 menjadi sebesar 4,89%. Fluktuasi inflasi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pusat seperti kenaikan harga BBM dan kewajiban perpajakan yang menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga juga menaikkan harga jual produk.

Sektor jasa mempunyai laju inflasi tertinggi 7,06 persen, sektor transportasi dan pergudangan sebesar 6,13 persen dan sektor pertanian mempunyai laju inflasi 5,49 persen. Laju inflasi menurut sektor dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 3.13
LAJU INFLASI MENURUT SEKTOR TAHUN 2011 – 2015

No	Sektor	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1.	Pertanian	7,27	6,05	7,98	8,94	5,49
2.	Pertambangan dan Penggalian	4,48	2,46	3,96	11,91	5,04
3.	Industri Pengolahan	5,34	3,84	4,07	6,08	5,05
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	-3,39	-4,94	-5,26	0,32	5,15
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah	1,57	0,12	-3,45	2,28	2,06
6.	Konstruksi	6,84	2,55	4,49	5,93	5,31
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	5,03	2,36	3,78	3,13	5,30
8.	Transportasi dan Pergudangan	1,82	1,11	4,20	7,05	6,13
9.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,16	5,75	5,68	6,21	4,99
10.	Jasa lainnya	1,94	0,54	2,74	7,61	7,06
	Inflasi	5,56	4,35	4,91	6,08	4,89

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan 2016; (SNA 2010)

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

a. Pendidikan

Perkembangan Pendidikan di Kabupaten Magetan tiap tahun terus mengalami peningkatan, ditandai dengan terus meningkatnya jumlah lulusan dari strata pendidikan yang lebih tinggi. Sarana dan prasarana pendidikan tiap tahun terus ditingkatkan, terutama melalui renovasi gedung sekolah dan peningkatan prasarana penunjang, peningkatan kualitas tenaga pengajar dari semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemerataan akses pendidikan terutama di daerah-daerah pinggiran. Namun demikian, angka hanya lulus di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) masih cukup tinggi.

Pembangunan pendidikan di kabupaten Magetan telah menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya indeks pendidikan kabupaten Magetan. Keberhasilan ini karena telah dilakukan upaya untuk menekan angka putus sekolah antara lain dengan memberikan bantuan kepada siswa miskin dan memberikan penyuluhan berkelanjutan mengenai pentingnya pendidikan serta siswa diberikan bekal pelajaran ketrampilan dan memberikan tambahan mata pelajaran *life skill* (kecakapan hidup) agar siswa memiliki daya saing manakala tidak mampu melanjutkan pendidikan berikutnya.

TABEL 2.14
PROSENTASE JUMLAH LULUSAN SEKOLAH TAHUN 2013 - 2015

No	Jenis Sekolah	Banyaknya Peserta Ujian			ProsentaseLulus			
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	
1	SD	a. Negeri	7.681	7.424	6.923	95,77%	100 %	100 %
		b. Swasta	285	349	411	89,82%	100 %	100 %
2.	SLTP	a. Negeri	6.177	6.245	6.744	93,90%	100 %	100 %
		b. Swasta	322	235	226	90,06%	100 %	100 %
3.	SLTA	a. SMU Negeri	2.355	2.363	2.239	100,00%	100 %	100 %
		b. SMU Swasta	133	72	79	100,00%	100 %	100 %
		c. SMK Negeri	1.702	1.857	2.035	100,00%	100 %	100 %
		d. SMK Swasta	1.552	1.866	1.865	87,50%	100 %	100 %

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Magetan tahun 2016

b. Kesehatan

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Pemerintah Kabupaten Magetan secara terus menerus dan berkesinambungan membangun program meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, baik dengan pengembangan sarana & prasarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik), dan juga peningkatan sistem pelayanan kesehatan yang mengutamakan kemudahan, pelayanan murah dan berkualitas. Penyediaan akses kesehatan sampai dengan tingkat desa terus ditingkatkan dengan menempatkan tenaga medis di tiap desa dan pembangunan Poskedes. Juga dengan memperbanyak tenaga medis dengan berbagai spesialisasi, baik di Rumah Sakit maupun puskesmas.

Perkembangan pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari indeks kesehatan masyarakat sebagai pembangunan pelayanan dasar kesehatan yang terus meningkat tiap tahun, sebagaimana data berikut:

TABEL 2.15
PERKEMBANGAN INDEKS KESEHATAN MASYARAKAT KAB. MAGETAN
TAHUN 2011 - 2015

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka Harapan Hidup (dalam tahun)	71,71	71,79	71,87	71,91	72,01
2.	Angka Kematian bayi (Per 1000 kelahiran)	23,21	12	11,15	10,35	10,53
3.	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran)	118,50	35,3	89,2	113,79	59,8
4.	Status Gizi Buruk (%)	0,31	0,32	0,43	0,42	0,37

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Magetan tahun 2016

c. Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Magetan cukup tinggi, hal ini memunculkan masalah tersendiri, dimana jumlah pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan kesempatan/ lapangan pekerjaan, sehingga mengakibatkan jumlah pengangguran semakin meningkat tiap tahun. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertumbuhan angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Magetan tahun 2011-2015 adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.16
RASIO PENDUDUK YANG BEKERJA TAHUN 2011 – 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah penduduk yang bekerja	452,599	360.098	401.974	328.845	331.493
2.	Angka pengangguran Terbuka	3,16 %	3,86 %	3,02 %	4,28 %	6,05 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Magetan tahun 2016

TABEL 2.17
**JUMLAH PENCARI KERJA, PENEMPATAN DAN PERMINTAAN KERJA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2011 – 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pencari Kerja	6.621	9.350	5.463	4.135	5.391
2.	Penempatan	987	1.436	1.591	1.338	3.296
3.	Penghapus Pencari Kerja	5.425	5.158	0	0	0
4.	Pencari Kerja yang belum ditempatkan	18.014	7.914	3.872	2.819	3.211
5.	Permintaan lowongan kerja	987	1.436	1.591	1.338	3.296
6.	Dipenuhi	987	1.436	1.591	1.338	3.296

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Magetan tahun 2016

d. Aspek Daya Beli

Pertumbuhan ekonomi selain ditentukan oleh peningkatan pengeluaran pemerintah, investasi, juga dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, dimana peningkatan konsumsi akan meningkat jika daya beli masyarakat juga meningkat. Indeks daya beli masyarakat Magetan meningkat dari 64,03 % di tahun 2010 menjadi 67,08 % pada tahun 2014. Hal ini juga dapat menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan.

Keberhasilan dalam pembangunan manusia, ditunjukkan besaran Indeks Pembangunan manusia (IPM). IPM berdasarkan standart perhitungan tahun 2010 dibangun atas 4 komponen yakni Angka Harapan Hidup, Harapan lama Sekolah, Rata-rata Lama sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magetan terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

TABEL 2.18
**REALISASI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2011 – 2015**

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1. Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,71	71,79	71,87	71,91	72,01
2. Harapan lama Sekolah (Tahun)	12,42	12,54	12,57	12,77	13,60
3. Rata2 Lama Sekolah (Tahun)	7,23	7,33	7,43	7,55	7,65
4. Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	9.635	10.375	10.484	10.539	10.594
IPM Kab. Magetan	68,52	69,56	69,86	70,29	71,39

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Magetan tahun 2016; (SNA 2010)

Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui program-program pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Magetan 2013 – 2018, selain menggerakkan pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui upaya: revitalisasi pertanian, peningkatan nilai tambah industri, peningkatan investasi, dan peningkatan pariwisata, maka kebijakan dan program yang lain untuk mendukung pemerataan pembangunan baik aspek ekonomi maupun aspek sosial, antara lain adalah Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.

Gambaran umum bidang kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi Kab. Magetan, meliputi aspek pendidikan, kesehatan, sosial, seni budaya dan olahraga serta pembangunan ekonomi juga tersaji dalam tabel berikut ini :

TABEL 2.19
GAMBARAN UMUM BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PEMERATAAN EKONOMI TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	CAPAIAN KINERJA RPJMD		
					TARGET AKHIR (TAHUN 2018)	CAPAIAN TH. 2015	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
Otoda							
Pertumbuhan ekonomi	5,79	5,82	5,18	5,15	6,95	Penentuan target masih menggunakan perhitungan standart tahun 2000, sedangkan realisasi sudah menggunakan standart tahun 2010.	
Pertumbuhan PDRB	5,79	5,82	5,18	5,15			
PDRB per kapita ADHB (Rp. Juta)	16,32	20,4	20,14	22,19	22,16		
PDRN perkapita ADHK (Th. 2000 Rp. juta)	3,694	3,941	5,884		7,401		
Laju Inflasi	4,35	4,91	6,08	4,89			
Angka kemiskinan	11,45	12,14	11,8	11,8	7,17		
Angka pengangguran terbuka	3,86	3,02	4,28	6,05	2,56		
IPM	69,56	69,86	70,29	71,39	77,19		
Fokus Kesejahteraan Sosial							
Pendidikan							
Angka melek huruf	91,03%	97,82%	99,37%	99,46%	100%	99,46%	
Angka rata-rata lama sekolah			6,29 Tahun	6,73 Tahun	12 thn		
Angka partisipasi kasar							
- Anak usia dini			46,65%	47,54%	55,68%	85,38%	
- SD/MI	111,04%	111,39%	112,01%	105,73%	111,62%	94,72%	
- SMP/MTs	100,02%	101,24%	102,00%	104,11%	101,37%	102,70%	
- SMA/SMK/MA			94,92%	86,65%	97,5%	88,87%	
Angka Partisipasi Murni							
- SD/MI	97,51%	98,03%	98,49%	98,86%	100	0,99%	
- SMP/MTs	91,11%	91,81%	92,46%	92,61%	95	0,97%	
- SMA/SMA/SMK/MA	75,84%	76,59%	77,18%	77,24%	80,35	0,96%	
Angka putus sekolah							
- SD/MI	0,04%	0,02%	0,01%	0,01%	0,02	0,50%	
- SMP/MTs	0,09%	0,07%	0,08%	0,06%	0,02	3,00%	
- SMA/SMK/MA	0,21%	0,19%	0,26%	0,27%	0,1	2,70%	
Kesehatan							
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	12	11,15	10,35	10,53	23	45,78%	
Angka kematian neonatal per 1000	5,17	6,87	7,17	7,53	14	53,79%	

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	CAPAIAN KINERJA RPJMD	
					TARGET AKHIR (TAHUN 2018)	CAPAIAN TH. 2015
kelahiran hidup						
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	35,3	89,2	113,79	59,8	102	58,63%
Angka usia harapan hidup	71,79	71,87	71,91	72,01	72	0,00%
Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	13,53	11,93	11,26	11,72	32	36,63%
Persentase balita gizi buruk	0,61	0,57	0,509	0,37	<1%	
Prosentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	97,22	99,01	95,36	96,25	88	109,38%
Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kelahiran terlatih	85,52	91,87	91,29	95,00	90	0,00%
FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA						
Kebudayaan						
Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	2	2	2	2	2	100,00%
Pemuda dan olah raga						
Jumlah klub olah raga	21	21	21	21	28	75,00%
Jumlah gedung olah raga	35	35	35	35	30	116,67%

2.1.3 Kondisi Pelayanan Umum

a. Pendidikan

1. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia sekolah dasar dengan jumlah ketersediaan sekolah dasar yang ada. Adapun rasio ketersediaan sekolah dasar Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut.

TABEL 2.20
RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH DASAR KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2011 - 2015

No	Tahun	Pendidikan Dasar (SD/MI)			Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTS)			Pendidikan Menengah Atas (SMA/SMK/MA)		
		Jml gedung sekolah	Jumlah murid	Rasio	Jml gedung sekolah	Jumlah murid	Rasio	Jml gedung sekolah	Jumlah murid	Rasio
1	2011	573	49.793	86,90	88	25.927	294,63	58	24.106	415,62
2	2012	573	50.746	88,56	86	-	-	58	23.424	403,86
3	2013	570	53.789	94,37	87	29.936	344,09	58	22.092	380,90
4	2014	571	54.303	95,10	88	30.431	345,81	62	22.775	367,34
5	2015	572	54.342	95,00	89	30.259	560,35	67	23.470	350,29

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Magetan 2016

2. Rasio Guru dan Murid

Rasio guru dan murid merupakan perbandingan antara jumlah guru dan murid atau siswa yang ada dalam suatu wilayah, tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa efektif jumlah guru yang ada dalam meningkatkan mutu pendidikan disuatu wilayah tersebut. Adapun rasio antara guru dan murid di Kabupaten Magetan dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

TABEL 2.21
RASIO JUMLAH GURU DAN MURID KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2011 – 2015

No	Tahun	Pendidikan Dasar (SD/MI)			Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs)			Pendidikan Menengah Atas (SMA/SMK/MA)		
		Jml Guru	Jumlah murid	Rasio	Jml Guru	Jumlah murid	Rasio	Jml Guru	Jumlah murid	Rasio
1	2011	4.838	48.801	10,09	1.854	21.923	11,82	1.513	17.976	11,88
2	2012	5.131	48.340	9,42	1.889	20.918	11,07	1.557	17.582	11,29
3	2013	5.042	53.789	10,69	2.513	29.936	11,91	1.966	22.092	11,24
4	2014	4.888	54.303	11,11	2.494	30.431	12,20	1.942	22.775	11,73
5	2015	5.794	54.342	9,38	2.843	30.259	10,64	2.142	23.470	10,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Magetan 2016

b. Kesehatan

1. Infrastruktur pelayanan kesehatan

Infrastruktur pelayanan kesehatan terdiri dari rumah sakit, poliklinik, puskesmas dan jaringannya serta Posyandu. Untuk Posyandu, idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Perkembangan infrastruktur kesehatan tahun 2011 – 2015 Kabupaten Magetan adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.22
INFRASTRUKTUR PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2011 – 2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah rumah sakit	5	5	5	5	6
2.	Jumlah poliklinik	11	9	10	12	12
3.	Jumlah Puskesmas	22	22	22	22	22
4.	Jumlah Puskesmas pembantu	59	59	59	59	59
5.	Rasio posyandu per 100 balita	2,26	2,58	2,04	2,07	2,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Magetan tahun 2016

2. Tenaga medis

Tenaga medis yang terdiri dari dokter, bidan dan perawat memberikan gambaran seberapa besar ketersediaan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepadapenduduk. Berdasarkan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Perkembangan ketersediaan tenaga medis di Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

TABEL 2.23
RASIO TENAGA KESEHATAN PER SATUAN PENDUDUK KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2011 – 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Standar
1.	Rasio dokter per satuan penduduk	0,02	0,02	0,04	0,11		0,04
2.	Rasio perawat per satuan penduduk	0,07	0,06	0,26	0,87	0,84	0,16
3.	Rasio bidan per	0,04	0,06	0,31	0,7	0,55	0,08

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Standar
	satuan penduduk						

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Magetan tahun 2016

c. Perikanan

Pembangunan urusan Perikanan di Kabupaten Magetan mengemban sasaran “meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan” untuk mendukung tujuan stratejik berupa pengembangan kegiatan perikanan yang berorientasi pada peningkatan produksi dan produktivitas, pendapatan pembudidaya ikan, dan daya saing produk perikanan.

Wilayah Kabupaten Magetan yang berada di daerah pegunungan memungkinkan berkembangnya budidaya ikan air tawar. Gambaran produksi ikan di Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.24
PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 – 2015

No.	Uraian	Tahun			Naik / Turun	
		2013	2014	2015	2013/2014	2014/2015
1	Ikan Tombro (ton)	5,80	10,7	6,15	4,9	- 4,55
2	Ikan Patin (ton)	23,60	24,7	24,83	1,1	0,13
3	Ikan Nila (ton)	88,46	117,6	90,42	29,14	- 27,18
4	Ikan Gurami (ton)	28,60	63,98	41,25	35,38	- 22,73
5	Ikan Lele (ton)	791,40	935,77	1.080,27	144,37	144,50
Jumlah		937,86	1.152,75	1.242,81	214,89	90,06

Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Magetan Tahun 2016

d. Pertanian

Urusan Pertanian adalah salah satu urusan yang dikelola Pemerintah Kabupaten Magetan dalam rangka pengembangan kegiatan pertanian yang berorientasi pada peningkatan produksi dan produktivitas, pendapatan petani dan daya saing produk pertanian, dengan mengembangkan usaha pertanian terpadu (pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan).

Sektor pertanian di Kabupaten Magetan merupakan penyumbang terbesar terhadap total PDRB Kabupaten. Hasil-hasil pertanian utama di Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.25
JUMLAH PRODUKSI HASIL PERTANIAN/ PERKEBUNAN/ PETERNAKAN
TAHUN 2011 – 2015

No	Jumlah Produksi	2011	2012	2013	2014	2015
1	Padi (kw)	2.790.701	2.890.076	3.053.592	3.041.600	3.101.112
2	Jagung (kw)	833.313,00	768.675,00	767.368	778.030	897.605
3	Kedelai (kw)	28.409,00	54.810,00	33.016	64.220	53.640
4.	Tebu (kw)	487.457,40	494.387,19	502.122,26	509.427	484.641

5.	Wortel (kw)	184.535	214.650	115.925	119.450	146.870
6.	Strowbery (kw)	624	121	469	120	-
7.	Bawang merah (kw)	16.752	14.027	9.951	14.665	24.536
8.	Jeruk (kw)	95.586	253.988	195.872	418.360.	82.653
9.	Mangga (kw)	234.744	233.275	107.811	202.648	236.488
10.	Sapi (ekor)	70.076	108.872	114.630	106.913	107.683
11.	Kambing (ekor)	31.288	34.056	36.800	37.918	41.747
12.	Ayam (ekor)	3.420.585	3.888.962	6.000.008	12.715.404	12.806.999
13.	Telur (kg)	17.578.252	18.463.664	16.269.545	18.366.801	28.437.873

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Magetan tahun 2016

e. Kehutanan

Kawasan hutan Kabupaten Magetan seluas 7.387 Ha terdiri dari 3.400 Ha hutan produksi dan 3.987 Ha hutan lindung. Produksi hasil hutan berupa kayu jati, mahoni, mindi, sono, sengon, dll. Produksi hasil hutan memang memberikan sumbangan terhadap PDRB, namun kerusakan hutan yang diakibatkan juga membutuhkan penanganan serius.

Selain kerusakanan kawasan hutan, degradasi lingkungan juga terlihat dari luas lahan kritis. Untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang mengalami degradasi, pemerintah daerah telah berupaya untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Kondisi lahan kritis di Kabupaten Magetan dan usaha rehabilitasinya dapat dilihat dalam tabel berikut adalah sebagai berikut :

TABEL 2.26
KONDISI LAHAN KRISTIS DAN USAHA REHABILITASI LAHAN TAHUN 2011 - 2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Luas lahan kritis (Ha)					
	- Aktual	575,96	575,96	1.174,91	-	1.175
	- Potensial	13.924,92	13.923,92	6.114,91	6.114,91	6.114
2	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	61,44	74,8	75	235	529,8

Sumber : Dinas Hutbun Kab. Magetan tahun 2015

f. Pariwisata dan Kebudayaan

Pembangunan Kepariwisataan masih menjadi primadona penyumbang pendapatan daerah, dan masih sangat prospektif untuk dikembangkan, diarahkan pada program pengembangan wisata sebagai tujuan wisata populer, terutama wisata alam di lereng gunung lawu, sehingga dapat menunjang gerak perekonomian daerah. Program prioritas bidang kepariwisataan diarahkan pada pengembangan kawasan wisata sarangan dan pengembangan kawasan wisata alam penunjang, seperti telaga wahyu, air terjun pundak kiwo, waterfall, mojosemi, area outbond.

Jumlah kunjungan wisata maupun kontribusi terhadap pendapatan asli daerah setiap tahun mengalami peningkatan. Obyek wisata sarangan sebagai penopang utama sektor pariwisata Magetan

Urusan Kebudayaan berkaitan dengan sasaran terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah. Tanggung jawab dan wewenang dalam urusan ini meliputi pembinaan dan pengembangan budaya daerah serta penyusunan kebijakan teknis urusan kebudayaan. Sasaran yang ingin dicapai adalah capaian Jumlah kegiatan festival seni dan budaya yang terlaksana dalam satu tahun.

g. Industri

Urusan Perindustrian berkaitan dengan tujuan strategik berupa meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan penduduk, sedangkan kebijakan yang dilakukan adalah mengembangkan kegiatan usaha industri kecil dan menengah. Penyelenggaraan urusan ini mempunyai sasaran meningkatnya produksi dan desain produk industri yang berdaya saing tinggi ini.

Perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB tahun 2011 - 2015 cenderung stagnan, yaitu antara 9,82 % sampai dengan 9,63 %. Pertumbuhan industri periode tahun 2011 - 2015 menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 1,11 %. Hal ini menunjukkan selama 5 tahun terakhir terjadi penambahan industri-industri baru namun penambahannya semakin kecil, meskipun pada tahun 2014 mengalami penurunan jumlah industri. Namun pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,05 %. Sedangkan kontribusi terhadap PDRB juga mengalami penurunan sangat kecil, yaitu dalam 5 tahun terakhir rata-rata 0,02%.

TABEL 2.27
PERKEMBANGAN INDUSTRI KERAJINAN RAKYAT TAHUN 2011 - 2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah kerajinan rakyat	14.439	14.471	14.849	14.492	15.247
2.	Tenaga kerja (orang)	33.742	33.808	38.218	39.602	39.082
3.	Hasil produksi (Rp.000)	635.546.650	636.817.691	645.742.145	758.822.429	667.650.035

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Magetan tahun 2016

h. Perdagangan

Pembangunan perdagangan meliputi memantapkan distribusi barang intra dan inter wilayah, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan kepada konsumen. Pencapaian sasaran yang hendak

diraih adalah perkembangan jumlah usaha perdagangan baru terus meningkat, karena adanya keuntungan usaha yang tentunya didukung oleh daya beli masyarakat, dan adanya fasilitasi ketersediaan pasar secara fisik, pameran dagang dan pasar lelang di propinsi, serta kemudahan perijinan, akhirnya akan menjadikan sektor perdangan sebagai sektor primadona pertumbuhan.

Gambaran umum bidang pelayanan umum, meliputi aspek pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL 2.28
GAMBARAN UMUM BIDANG PELAYANAN UMUM
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	CAPAIAN KINERJA RPJMD	
					TARGET AKHIR (TAHUN 2018)	CAPAIAN TH. 2015
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Pelayanan Urusan Wajib						
Pendidikan						
Ruang kelas kondisi baik :						
- SD/MI	63,97%	67,21%	76,15%	70,28%	85,00%	82,68%
- SMP/MTs	76,26%	80,38%	82,12%	89,09%	100%	89,09%
- SMA/SMK/MA	86,98%	87,48%	82%	93,45%	100%	93,45%
Angka putus sekolah						
- SD/MI	0,02%	0,03%	0,01%	0,01%	0,02%	50,00%
- SMP/MTs	0,09%	0,12%	0,08%	0,06%	0,02%	300,00%
- SMA/SMK/MA	0,32%	0,34%	0,26%	0,27%	0,10%	270,00%
Angka kelulusan						
- SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
- SMP/MTs	100%	99,90%	100%	100%	100%	100,00%
- SMA/SMK/MA	100%	100%	100%	99,95%	100%	99,95%
Angka melanjutkan						
- Dari SD/MI ke SMP/MTs	99,76%	97,89%	108,90%	111,95%	100%	111,95%
- Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	75,20%	75,28%	86,85%	90,01%	95%	94,75%
Guru yang memiliki kualifikasi S1/D4	85,41%	87,92%	91,19%	92,63%	100%	92,63%
Jumlah gedung SMP/MTs yang memiliki Lab. IPA	71,00%	76,00%	80,00%	80,55%	90%	0,00%
Kesehatan						

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	CAPAIAN KINERJA RPJMD	
					TARGET AKHIR (TAHUN 2018)	CAPAIAN TH. 2015
Persentase balita gizi buruk	0,61	0,57	0,509	0,37	0,46	80,43%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	66,17%	64,96%	51,7%	48,29	90	53,66%
Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS	66,89	68,81	108	153	224	68,30%
Proporsi kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	94,46	91,95	95,15%	98%	88	1,11%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare	73,36	136,19	106%	87,76%	100	0,00%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100	1,00%
Cakupan Penemuan AFP per 100.000 penduduk < 15 tahun	1	7	4	5	≥ 2	
Cakupan Penemuan dan Penanganan pneumonia balita	17,38	31,45	33%	71%	100	0,00%
Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0	100,00%
Angka kejadian malaria per 1000 penduduk	0	0	0,0048	0	<1	100,00%
Prevalensi HIV/AIDS (%) dari total populasi	0,006	0,009	2,8%	0,04	<0,5	100,00%
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	53,30%	61,72%		67,19	100	
Rasio dokter per satuan penduduk	0,02	0,04	0,11	0,10	0,3	33,33%
Rasio tenaga medis persatuan penduduk						
Perawat	0,06	0,26	1,58	0,60	0,84	71,43%
Bidan	0,06	0,31	0,75	0,80	0,55	145,45%
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100%	100%	44,44	100%	100	
Cakupan Desa/kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100	100,00%
Cakupan Desa Siaga Aktif		100%	85,01%	100%	85	117,65%
Cakupan kunjungan bayi	97,70%	95,64%	95%	96%	90	106,67%
Cakupan kunjungan ibu hamil K4	91,38%	90,39%	90,59%	91,83	95	96,66%
Rumah Sakit Umum Daerah						
Gawat Darurat						
Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	100%	100%	87%	100%	87,00%
Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24	24	24	24	24 jam	100,00%
Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD	Dokter 70% perawat 85%	80%	100%	Perawat 65%, dokter 56%	ATLS & ACLS (Dokter 100%) BTLS & BCLS (Perawat 100%)	
Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Belum ada	1	1	1	ADA (Tim Disaster RS)	100,00%
Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	6 menit	5 menit	8 menit	2,35	4 menit	58,75%
Kepuasan Pelanggan	-	-	77%	74,05	100%	74,05%
Kematian pasien ≤ 24 jam	-	-	6 jam	9,43	1/1000	
Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	100%	100%	90%	111,11%
Rawat Jalan						
Dokter Spesialis pemberi pelayanan di Poliklinik	75%	70%	34%	76%	100%	76,00%
Ketersediaan Pelayanan	10 klinik	10 klinik	11	13	K. Saraf K.Paru K.Dalam K.Bedah K.Anak K.Mata K.Kebidanan K. Gigi dan Mulut K. Kulit dan Kelamin K. THT K. DOTS	100,00%

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	CAPAIAN KINERJA RPJMD	
					TARGET AKHIR (TAHUN 2018)	CAPAIAN TH. 2015
					K. VCT	
					K. Umum	
Jam buka Pelayanan	100	100	100	100	07.30 s/d 12.30 Setiap Hari Kerja kecuali Jum'at: 08.00 - 11.00 WIB	100,00%
Waktu tunggu di rawat jalan	50 menit	40,5 menit	40 menit	62,87 menit	± 20 menit	31,81%
Kepuasan Pelanggan	73%	73,30%	79%	72,55%	95%	76,37%
a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	30%	30,89%		52%	100%	52,00%
b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	50%	100%	36%	60%	100%	60,00%
<u>Rawat inap</u>						
Pemberi Pelayanan di Rawat Inap	100%	100%	70%	100%	100%	100,00%
Dokter Penanggung Jawab Pasien Rawat Inap	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
Jam Visite Dokter Spesialis	93%	90%	80%	76%	07.30-14.00	76,00%
Kejadian Infeksi Pasca Operasi	0%	0%	0%	0,38%	0	under target
Kejadian Infeksi Nosokomial	0%	0,50%	2%	0,79%	0	under target
Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
Kematian pasien > 48 jam	2,05%	1,98%	2,00%	2,17%	0,24%	904,17%
Kejadian Pulang Paksa	1,5%	1%	1%	3,63%	1%	over target
Kepuasan Pasien	73%	73,52%	74%	74,25%	95,00%	78,16%
Rawat Inap TB:				47,25%	100%	47,25%
a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	15%	21%	36%	47%	100%	47,00%
b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	45%	45%	70%	73,89%	80%	92,36%
<u>Bedah Sentral</u>						
Waktu tunggu operasi elektif	1 hari	2 hari	1 hari	1 hari	1 hari	100,00%
Waktu tunggu operasi cito	45 menit	40 menit	50 menit	45,46 menit	30 menit	under target
Kejadian Kematian di meja operasi	0	0	0	0	0%	100,00%
Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
Komplikasi anaestesi karena overdosis, reaksi anaestesi dan salah penempatan endotracheal tube	0%	0%	3%	0,04%	0%	under target
<u>Persalinan dan Perinatologi</u>						
Kejadian kematian ibu karena persalinan, a.pendarahan b.pre-eklamsia c.sepsis	a. 0% b. 0% 0%	a. 0% c. b. 0% 0%	0% c. 0,54% 0%	a. 0% b. 0% 0%	a. 0.076% b. 0.0196% c. 0%	over target
Pemberi pelayanan persalinan normal	100%	100%	51%	100%	100%	100,00%
Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	100%	100%	4		75%	
Pemberi pelayanan persalinan dengan operasi	92%	92%	92%	100%	100%	100,00%
Kemampuan menangani BBLR (≤ 2500 gr)	88%	89,4%	97%	76%	100%	76,00%
Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	16%	11%	43%	51%	20%	255,00%

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	CAPAIAN KINERJA RPJMD	
					TARGET AKHIR (TAHUN 2018)	CAPAIAN TH. 2015
Keluarga Berencana:						
a. Presentase KB (Vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten (dr SpOG, dr SpB, dr SpU, dr umum terlatih)	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
b. Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh bidan terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
Kepuasan Pelanggan	-	-	72%	75,98%	80%	94,98%
Intensif						
Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	0%	0%	0%	0,39%	0%	under target
Pemberi pelayanan Unit Intensif pelayanan Unit Intensif a. dokter spesialis b.perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU	a. 0% b.30%	a. 0% b.30%	a. 100% b.56%	a. 100% b.44%	a. 100% b. 100%	100,00%
Radiologi						
Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	25 menit	12,6 menit	1 jam	59,44 menit	45 menit	44,00%
Pelaksana Ekspertisi	40%	100%	75%	100%	100%	over target
Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	1,1%	1,02%	1,00%	1,9%	0,70%	100,00%
Kepuasan Pelanggan	85%	86%	78%	72,98%	80%	over target
						91,23%
Laboratorium Patologi Klinik						
Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	168 menit	136 menit	150 menit	180 menit	125 mnt	over target
Pelaksana Ekspertisi	0%	0%	100%	100%	Dokter Sp. PK.	
Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
Kepuasan pelanggan	85,5%	88%	100%	72,85%	90%	80,94%
Rehabilitasi Medik						
Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
Kepuasan Pelanggan	80%	98%	78%	74,18%	85%	87,27%
Farmasi						
Waktu tunggu pelayanan						
a. Obat Jadi	18menit	26,93 menit	14 menit	25,8 menit	25 menit	under target
b. Obat Racikan	28menit	36,12 menit	35 menit	51,32 menit	45 menit	under target
Tidak adanya Kejadian Kesalahan Pemberian Obat	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
Kepuasan Pelanggan	75%	74%	96%	66,78%	80%	83,48%
Penulisan resep sesuai dengan formularium	100%	100%	100%	75,13%	100%	75,13%
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)						
Ada anggota Tim PPI yang terlatih	5%	5%	5%	25%	75%	33,33%
Tersedia APD di setiap instalasi/ departement	75%	100%	100%	93%	60%	155,00%
Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/ HAI (Health Care Associated Infections) di RS (minimum 1 parameter)	100%	100%	37%	100%	75%	133,33%
Gizi						
Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	-	20,9%	20%	1,08%	20%	over target
Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%	100%	99,80%	100%	99,80%

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	CAPAIAN KINERJA RPJMD	
					TARGET AKHIR (TAHUN 2018)	CAPAIAN TH. 2015
<u>Transfusi Darah</u>						
Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%	100%	100%	98,98%	100% terpenuhi	98,98%
Kejadian reaksi transfusi	0%	0%	6%	0,40%	0%	under target
<u>Pelayanan GAKIN</u>						
Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100%	100%	71%	100%	100%	100,00%
<u>Rekam Medis</u>						
Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	83%	100%	99%	99,23%	100%	99,23%
Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	40%	73%	92%	94,41%	100%	94,41%
Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	10menit	8menit	5 menit	8,81 menit	7 menit	under target
Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	25menit	14 menit	12 menit	13,69 menit	14 menit	under target
<u>Limbah Pengelolaan</u>						
Baku mutu limbah cair		100%	100%	BOD = 4,10 COD = 10,9 TSS = 0,400 PH = 8	20,3% 65% 15 6,79	
Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
<u>Administrasi dan Manajemen</u>						
Tindak Lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	90%	100%	100%	100%	100%	100,00%
Kelengkapan Laporan Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	99%	98%	17%	100%	100%	100,00%
Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	34%	100%	100%	100,00%
Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	20%	55%	3%	5,80%	60%	9,67%
Cost Recovery	89%	104,1%	125%	117%	100%	117,00%
Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	25%	25%	67%	23,08%	100%	23,08%
Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	2jam	1,9jam	1 jam	2,82 jam	1 jam	under target
Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
<u>Ambulance/ Mobil Jenazah</u>						
Waktu Pelayanan ambulance/mobil jenazah	24jam	24jam	24 jam	24 jam	24 jam	100,00%
Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/mobil jenazah di Rumah Sakit	45menit	40menit	35 menit	12,01 menit	30 menit	under target
Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	-	-	21	33,61 menit	Sesuai ketentuan daerah	
<u>Pemulasaran Jenazah</u>						
Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	1jam 45menit	1,6jam	1,5 jam	1 jam 54 menit	1 jam	under target
<u>Laundry</u>						
Tidak Adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%	77%	100%	100%	100,00%
<u>PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT</u>						
Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	45 menit	46,7% ditanggapi +- 1hari	64%	34,75 menit	30 menit	under target

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	CAPAIAN KINERJA RPJMD	
					TARGET AKHIR (TAHUN 2018)	CAPAIAN TH. 2015
Ketepatan waktu pemeliharaan alat	80%	80%	75%	150%	100%	150,00%
Peralatan Laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	100%	71%	100%	100%	100,00%
Pekerjaan Umum						
Prosentase jalan kabupaten kondisi baik	65,51%	71,54%	73,55%	75,54%	81,54%	92,64%
Jumlah jembatan kondisi baik	230	230	236	237	233	101,72%
Rasio jaringan irigasi kondisi baik	69,25%	77%	79%	72,45	72,25%	100,28%
Perumahan						
Rumah tangga pengguna air bersih	62,65%	53%	85,37%	86,3%	75%	115,07%
Rumah tangga bersanitasi	62,65%	62,65%	81,57%	81,70%	90%	90,78%
Prosentase rumah layak huni			97,02%	99,78%	100%	99,78%
Prosentase permukiman layak huni	98,79%	98,79%	97,02%	99,78%	100%	99,78%
Persentase luas kawasan kumuh			0,0048	0,0048	0,6	Over target
Penataan Ruang						
Dokumen RTRW		Ada	ada	Ada	ada	100,00%
Dokumen RDTRK		4	10	10	18	55,56%
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan		10,39	10,82%	11,07%	16%	69,19%
Perencanaan pembangunan						
Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	-	-	Terjadi masa transisi antara RPJMD periode 2009-2014 dan RPJMD periode 2013-2018, sehingga terdapat indikator kinerja yang tertuang pada tahun 2014 kurang sesuai	100%	100%	100,00%
Perhubungan						
Load factor	0,55	0,55	0,54	0,54	0,56	96,43%
Jumlah uji kir angkutan umum	2574	2850	3091	2267	1460	155,27%
Prosentase uji kir angkutan umum	84,15	91,09	85,93	75,80%	92	0,82%
Prosentase pemasangan rambu lalu lintas	59,38	60,27	64,9	68,61%	85,4	0,80%
Prosentase pemasangan marka jalan	8,21	12,63	14,25	15,60%	24,6	0,63%
Penerangan jalan umum	50,28	60,52%	69,12%	74,22%	80%	92,78%
Lingkungan hidup						
Persentase penanganan sampah perkotaan	62,5%	67,5%	70%	75%	90%	83,33%
Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	-	-	-	28%	25%	112%
Luas lahan kritis/lahan kritis tertangani	-	-	5.879,91	5.153,91	2.614	Under target
Pertanahan						
Kependudukan dan catatan sipil						
Prosentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	100%	100%	100%	96%	100	96,00%
Presentase penduduk berakta kelahiran	21,86%	24,03%	36,5%	41%	80	51,25%
Presentase anak berakte kelahiran			98		100	
Persentase keluarga ber KK	100%	100%	100%	100%	100	
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak						

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	CAPAIAN KINERJA RPJMD	
					TARGET AKHIR (TAHUN 2018)	CAPAIAN TH. 2015
Rasio KDRT	0,03%	0,05%	0,10%	0,02%	0,10%	
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	63,5%	40,76	100%	100%	100%	
Partisipasi angkatan kerja perempuan	84,21	84,61	85,71	98,93	88	
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	
Keluarga berencana dan keluarga sejahtera						
Rasio akseptor KB	74,37	74,99	73,98	77,62	74,65	103,98%
Cakupan peserta KB aktif	74,37	74,99	73,98	77,62	74,65	103,98%
Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	31,32%	30,42%	31%	30,70%	28%	
Anmetneed kebutuhan Keluarga berencana (KB) yang tidak terpenuhi	12,81%	12,62%	13%	11,42	10%	114,20%
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	96,93	94,69	96,10	95,10	77%	123,51%
Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	78%	80%	79%	74%	77%	96,10%
Sosial						
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	36,93	45,00	54,11	54,46	4,64%	1173,71%
Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya	-	-	0,45	1,16	4,57%	25,38%
Ketenagakerjaan						
Angka partisipasi angkatan kerja	68,07	68,63	69,14	69,14	70,11%	98,62%
Tingkat pengangguran terbuka	3,86	2,48	4,28	4,28	3	142,67%
Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif	-	-	30,45	53,92	56,21%	95,93%
Koperasi, usaha kecil dan menengah						
Persentase koperasi aktif	76,59	76,87	78,63	91,87	86	106,83%
Jumlah UKM non BPR/KLM	399	566	842	973	1.194	81,49%
Jumlah BPR/LKM	46	93	119	134	184	72,83%
Penanaman modal						
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	0	0	0	1	1	100,00%
Jumlah nilai investasi berskala lokal (non PMDN/PMA) dalam juta	132.276	920.472	148.916	190.078	960.000	19,80%
Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal		6			40 kl	
Kebudayaan						
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	9	7	7	5	7	71,43%
Kepemudaan dan olah raga						
Jumlah organisasi pemuda aktif	2	2	2	2	290	0,69%
Jumlah kegiatan/ kompetisi olah raga	13	13	13	13	30	43,33%
Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri						
Persentase LSM, Ormas, dan OKP yang dibina	95%	95,2%	96,3%	100%	100%	100,00%
Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	6	6	6	6	6	100,00%
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian						
Peringkat kinerja penyelenggaraan otoda	-	-	50	82	<50	under target

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	CAPAIAN KINERJA RPJMD	
					TARGET AKHIR (TAHUN 2018)	CAPAIAN TH. 2015
Hasil evaluasi Lakip	D	C	C +	CC	C	over target
Hasil predikat pemeriksaan/ pengawasan pengelolaan keuangan daerah	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	100,00%
Skor Indeks Kepuasan masyarakat	-	70,57	71	75,35	75	100,47%
Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	452	389	389	446	260	171,54%
Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional	43	76	41	79	250	31,60%
Prosentase pejabat yang mengikuti fit and proper test	0	0	0	27	975	2,77%
Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar/ijin belajar	169	97	154	174	1.310	13,28%
Rasio Poskamling per desa/kelurahan	5,82	5,91	5,91	5,93	6,40%	93%
Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)	0,01%	0,01%	0,01%	0,01	0,01%	100,00%
Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban, ketentraman, keindahan)	100%	100%	100%	100%	95%	106%
Rasio penegakan perda/jumlah pelanggaran perda	60%	60%	71%	71%	98%	73%
Jumlah lembaga/kelompok masyarakat siaga bencana terlatih (orang)	50	0	99	99	1.920	5,16%
Ketahanan pangan						
Ketersediaan energi dan protein perkapita	42	43	42,14%	65%	65%	100,00%
Penguatan cadangan pangan	43	45	50%	34,56	70%	49,37%
Skor pola pangan harapan	65,26	66,20	62%	89,70%	90%	99,67%
Pemberdayaan masyarakat desa						
Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	207	207	207	207	207	100,00%
Rata - rata jumlah kelompok binaan PKK	252	252	252	252	252	100,00%
Statistik						
Buku kabupaten dalam angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00%
Buku PDRB kabupaten magetan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00%
Kecamatan dalam angka	18	18	18	18	18	100,00%
Kearsipan						
Prosentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	78,18	82,45	61 %	70%	100 %	70,00%
Komunikasi dan informatika						
Jumlah pemberitaan melalui						
- Media massa	17	17	18	18	230	7,83%
- Media luar ruang	8	10	12	12	60	20,00%
Prosentase SKPD yang menyediakan data di website resmi					100%	
Jumlah pertunjukan rakyat	-	1	1	-	6	Under target
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat dan telecenter	7	8	9	10	10	100,00%
Perpustakaan						
Jumlah perpustakaan			765		845	0,00%
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	23.929	23.669	23.736	24.277	30.000	80,92%
Koleksi buku yang tersedia	51.925	53.261	57.500	58.397	83.000	70,36%
PELAYANAN URUSAN PILIHAN						
Kelautan dan perikanan						

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	CAPAIAN KINERJA RPJMD	
					TARGET AKHIR (TAHUN 2018)	CAPAIAN TH. 2015
Budidaya ikan (ton)	614.00	937.86	1,152	1.242,81	1,772.6	70,11%
Konsumsi ikan (Kg/ Kapita/ th)	9.85	10.34	12.14	12.14 *	20.09	60,43%
Pembudidaya ikan (orang)	2.500	2.600	2,625	2.650	2,8	
Jumlah unit pembenihan (UPR)	41	45	46	55	52	105,77%
Produksi Perikanan Tangkap (PUD) (ton)	35.50	36.35	36.71	37,66	40.33	93,38%
Pertanian						
Jumlah produksi hasil pertanian :						
- Padi (kw)	2.890.076	3.053.952	3.034.720	3.101.110	4.000.000	77,53%
- Jagung (kw)	768.675	767.368	792.140	897.600	800.000	112,20%
- Kedelai (kw)	54.809	33.020	64.220	53.640	75.000	71,52%
- Tebu (kw)	494.387,15	502.122,26	509.427,00	484.641,60	575.000	84,29%
Jumlah produksi peternakan :						
- Sapi (ekor)	114.630	96.185	107.104	107.881	200.000	53,94%
- Kambing (ekor)	36.801	39.418	37.918	41.747	49.000	85,20%
- Ayam (ekor)	6.034.693	6.549.186	12.751.175	12.806.999	8.500.000	150,67%
- Telur (Kg)	16.420.540	18.365.642	17.780.121	21.191.069	19.000.000	111,53%
Kehutanan						
Jumlah produksi hasil hutan (kayu jati, m3)	1.624,84	1.586,00	1.605	1.864,33	1.650	112,99%
Kerusakan Kawasan Hutan	23.55	6.9	5	186	5	3720,00%
Luas kawasan hutan	7.265	7.265	7.263	7.265	6.455	112,55%
Energi dan sumber daya mineral						
Jumlah titik pemasangan energi alternatif terbarukan (biogas)			5 titik	19 titik	110	17,27%
Pariwisata						
Angka kunjungan wisata	528.046	577.373	673.703	866.978	956.409	90,65%
Jumlah PAD sektor wisata (Rp ribu)	4.099.829.500	4.902.613.000	5.357.537.500	6.425.779,500	4.902.613.	0,13%
Perdagangan						
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	-	-	8,39%	6,29%	4%	157%
persentase pasar tradisional kondisi baik	-	-	40%	50%	80%	1703,75%
Perindustrian						
Pertumbuhan industri	14.473	14.849	15.037	14.849	15.999	92,81%
Cakupan bina kelompok pengrajin	-	-	532	585	52	0,00%
Ketransmigrasian						
Jumlah transmigran ditempatkan (KK)	49	50	35	25	90	27,78%

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/ kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek daya saing daerah, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap

variabel yang akan dianalisis menurut kabupaten/ kota di wilayah provinsi. Sedangkan untuk kabupaten/ kota disusun menurut kecamatan di wilayah kabupaten/ kota masing-masing. Beberapa Indikator variabel aspek daya saing daerah adalah sebagai berikut :

2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Perkembangan kesejahteraan penduduk salah satunya dikur dari tingkat pendapatan yang ditunjukkan oleh tingkat pengeluaran per kapita sebagai proxi pendapatan. Perkembangan tingkat kesejahteraan juga dapat diamati berdasarkan prosentase pengeluaran non pangan. Semakin tinggi pengeluaran non pangan dapat mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan.

a. Sumber Daya manusia

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan diluar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

b. Penanaman Modal

a. Investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Namun hingga saat ini investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Magetan belum ada, sehingga kedepan perlu usaha yang keras untuk menarik investor. Masuknya investor berarti akan menambah total PDRB sekaligus mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

b. Investor skala lokal (non PMDN/PMA)

Perkembangan investasi skala lokal (non PMDN/PMA) adalah sebagai berikut :

TABEL 2.29
PERKEMBANGAN INVESTASI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012 – 2015

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	Nilai investasi non PMDN/ PMA (juta rupiah)	132.276	920.472	148.916	190.078

Sumber : Bagian Adm. Perekonomian Setdakab. Magetan tahun 2016

2.1.4.2 Fasilitas Wilayah (Infrastruktur)

Pembangunan infrastruktur daerah mutlak diperlukan guna menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dan aktifitas masyarakat di berbagai bidang. Pembangunan infrastruktur transportasi melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan, serta peningkatan fasilitas umum lainnya (seperti tempat ibadah, sarana olahraga, terminal, taman kota dan lain-lain), penyediaan prasarana penyedia kebutuhan barang dan jasa masyarakat, dan peningkatan prasarana pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan masyarakat lebih optimal, menjadi sangat penting dalam kesuksesan pembangunan.

2.1.4.3 Potensi Unggulan Daerah

a. Bidang Pariwisata

Pariwisata di Kabupaten Magetan khususnya sarangan telah memberikan lapangan kerja jasa wisata seperti pemandu wisata, pedagang kaki lima, tukang kuda/perahu, pengusaha hotel restoran. Tercatat saat ini jumlah pemandu wisata sebanyak 25 orang, tukang perahu 60 orang, tukang kuda 40 orang, PK-5 618 orang.

Obyek wisata andalan Kabupaten Magetan adalah telaga Sarangan. Namun pemerintah Kabupaten Magetan juga terus mengembangkan obyek wisata lainnya sebagai pendukung obyek wisata Telaga Sarangan antara lain pengembangan agrowisata strowberry dan jeruk pamelos, pengembangan wisata budaya labuh sesaji di telaga Sarangan serta Ledug Suro di alon-alon kota Magetan.

Upaya penyediaan akomodasi beserta fasilitas dan pelayanan perlu terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan khususnya kepariwisataan di Kabupaten Magetan. Jumlah hotel di Kabupaten Magetan tahun 2013 sebanyak 103 hotel, 1.380 kamar Hotel Melati sebanyak 73 hotel dan 28 Pondok Wisata.

Banyak pengunjung yang datang ke tempat wisata Telaga Sarangan dan air terjun masih cukup banyak :

TABEL 2.30

JUMLAH KUNJUNGAN WISATA KAB. MAGETAN TAHUN 2011 – 2015

No	Obyek Kunjungan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Telaga Sarangan (Orang)	526.150	528.046	577.373	627.198	815.351
2.	Air Terjun Tirtosari (orang)	33.316	40.540	44.702	46.505	51.627

Sumber : Dinas Parbudpora Kab. Magetan tahun 2016

b. Industri

Jumlah Industri Kecil formal Kabupaten Magetan tahun 2014 sebanyak 771 unit, beberapa jenis industri kecil (kerajinan rakyat) yang memberikan andil cukup besar bagi perindustrian di kabupaten Magetan berupa Genteng menghasilkan produksi sebesar Rp.48,266milyard, Industri penyamakan kulit sebesar Rp.76,462 milyar, Batu bata Rp. 55,525 milyar, Anyaman Bambu Rp.72,280 milyar dan Kerajinan kulit menghasilkan Rp.71,183 milyar.

c. Pertanian

Luas wilayah Magetan 68.884,74 Ha, terbagi atas 28.297,24 Hektar tanah sawah dan 39.587,50 hektar tanah kering. Pertanian merupakan sektor yang paling dominan di Kabupaten Magetan , karena sebagian besar penduduk Magetan hidup bercocok tanam. Komoditas tanaman bahan makanan, utamanya padi masih merupakan produk yang besar peranannya bagi masyarakat Magetan.

Luas panen, produksi, dan rata-rata produksi tanaman pangan di Kabupaten Magetan tahun 2014 terjadi peningkatan produksi padi. Produksi tahun 2012 sebesar 289.008 Ton, naik 3,56 % menjadi 3.056 ton pada tahun 2013. Kenaikan produksi padi tahun 2013 ternyata tidak diikuti oleh produksi kedelai, jagung, kacang tanah, ubi kayu dan kacang hijau yang mengalami penurunan produksi.

Jenis buah-buahan yang banyak dihasilkan adalah Mangga : 233.275 Kw, Jeruk besar : 253.988 Kw dan pisang : 76.083 Kw. Secara umum produksi buah buahan tahun 2012 mengalami penurunan produksi yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Sementara sayur-sayuran yang banyak diproduksi adalah Kubis : 133.248 Kw, Wortel : 214.650 Kw dan bawang daun : 86.094 Kw.

Mengenai populasi ternak besar, kecil, unggas dan kelinci, Pada ternak besar terutama sapi mengalami peningkatan jumlah populasi pada tahun 2013 dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan ternak kecil kambing mengalami peningkatan 8,6 % dari tahun sebelumnya. Populasi

ternak unggas yang mengalami peningkatan adalah ayam kampung dan ayam pedaging.

Gambaran umum bidang daya saing daerah, meliputi aspek kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur, iklim investrasi, dan sumber daya manusia dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL 2.31
GAMBARAN UMUM DAYA SAING DAERAH
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015
ASPEK DAYA SAING				
Kemampuan Ekonomi Daerah				
Pengeluaran per kapita (Rp.)	643.970	647.090	650.280	Tdk ada data
Pengeluaran pangan (Rp.)	247.183	278.815	Tdk ada data	Tdk ada data
Pengeluaran non pangan (Rp.)	261.264	281.400	Tdk ada data	Tdk ada data
Pengeluaran pangan	48,62%	49,77%	Tdk ada data	Tdk ada data
Pengeluaran non pangan	51,38%	50,23%	Tdk ada data	Tdk ada data
Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur				
Proporsi panjang jalan kondisi baik	65,51%	73,54%	73,55%	75,54%
JEMBATAN				
Jembatan kondisi Baik (buah)	230	230	236	237
Jembatan kondisi Sedang (buah)	64	64	62	64
Jembatan kondisi Rusak (buah)	28	28	24	22
Jaringan irigasi kondisi baik	69,25%	77%	79%	72,25%
Prosentase pemasangan rambu lalu lintas	59,4%	60,27%	64,90%	68,61%
Prosentase pemasangan marka jalan	8,20%	12,63%	14,25%	15,60%
Penerangan jalan umum	50,28%	60,52%	69,12%	74,22%
luas wilayah perkotaan	5.222,13 ha	5.222,13 ha	5.222,13 ha	5.222,13 ha
jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel	Bintang : 2 Melati : 72 Homestay : 28	Bintang : 2 Melati : 74 Homestay : 30	Bintang : 2 Melati : 75 Homestay : 32	
Fokus Iklim Berinvestasi				
Jumlah investasi (Rp. Juta)	132.276	920.472	148.916	190.078
angka kriminalitas			277	
jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	9 pajak, 28 retribusi	9 pajak, 28 retribusi	9 pajak, 28 retribusi	9 pajak, 28 retribusi
jumlah perda yang mendukung iklim usaha				
fokus sumber daya manusia				
Jumlah penduduk usia tidak produktif	229.274	214.661	207.882	
Jumlah penduduk Usia Produktif 15-64 tahun	465.257	485.160	468.835	
Rasio ketergantungan	0,49	0,44	0,44	
Kualitas Pencari Kerja :				
- Tamat SD	30	32	49	
- Tamat SLTP	231	1.123	898	
- Tamat SLTA	1.668	2.234	2.554	
- SMU	775	1.080	1.009	
- SMK	943	1.154	1.545	
- Tamat akademi/diploma	275	931	152	
- Universitas (S1/S2/S3)	550	1.139	503	

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RPKD tahun 2015 dan Realisasi RPJMD

Evaluasi RKPD tahun 2015 dilaksanakan untuk mengukur capaian kinerja SKPD dalam melaksanakan anggaran tahun 2015. Evaluasi mencakup realisasi target capaian kinerja keluaran program dan kegiatan tahun 2015 terhadap RPJMD, yang bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan realisasi Renstra SKPD, menurut kategori urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah. Target kinerja yang dicapai seluruh SKPD merupakan indikator capaian pelaksanaan pembangunan daerah.

Evaluasi RKPD tahun 2015 dijadikan dasar penyusunan RKPD tahun 2017, dengan memperhatikan realisasi anggaran dan realisasi target capaian kinerja SKPD. Tujuan evaluasi kinerja RKPD tahun 2015 antara lain untuk :

1. Mengetahui realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target capaian kinerja yang direncanakan, beserta faktor penyebabnya.
2. Mengetahui Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
3. Dasar kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2015 dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya.

Berikut disajikan tabel hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2015 yang dikelompokkan menurut kategori urusan Wajib dan Pilihan Pemerintahan Daerah, dan dikompilasikan dengan realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan terhadap RPJMD Kab. Magetan tahun 2013 – 2018.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dan untuk menjalankan fungsi urusan Pemerintahan Daerah, dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Magetan. Besaran pengalokasian anggaran bagi tiap urusan mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2016. SKPD yang melaksanakan program prioritas pembangunan daerah sesuai arah kebijakan pembangunan tahun 2016 dalam RPJMD harus memperoleh alokasi anggaran yang memadai, agar target capaian kinerja prioritas pembangunan dapat tercapai.

TABEL 2.32
EVALUASI HASIL PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR	REALISASI	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2015			TARGET CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN BERJALAN		SKPD PENANNUNG JAWAB
	CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	KINERJA RKP TAHUN 2014	TARGET RKP 2015	REALISASI TAHUN 2015	TINGKAT CAPAIAN	KINERJA RKP 2016	REALISASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
<i>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</i>									
Pertumbuhan ekonomi	6,95	5,18	6,88	5,15	-	6,25			Penentuan target masih menggunakan
PDRB per kapita ADHB (Rp. Juta)	22,16	20,14	18,024	22,19	-	17,748			perhitungan satndart
PDRN perkapita ADHK (Th. 2000 Rp. juta)	7,401	5,884	6,466		-	6,205			tahun 2000, sedangkan
Angka kemiskinan	7,17	11,8	9,37	11,8	-	12,14			realisasi sudah
Angka pengangguran terbuka	2,56	4,28	3,21	6,05	-	4,28			menggunakan standart
IPM	77,19	70,29	75,44	71,39	-	75,61			tahun 2010.
Fokus Kesejahteraan Sosial									
Pendidikan									
Angka melek huruf	100	99,37%	98,65	99,46%	100,82%	99,15	99,15	100%	Dinas Pendidikan
Angka rata-rata lama sekolah	12 thn	6,29 Tahun	9 thn	6,73 Tahun	74,78%	10 thn	10 thn	100%	Dinas Pendidikan
Angka partisipasi kasar									
- Anak usia dini	55,68%	46,65%	48,77%	47,54%	97,48%	50,83%	50,83%	100%	Dinas Pendidikan
- SD/MI	111,62	112,01%	111,55	105,73%	94,78%	111,58	111,58	100%	Dinas Pendidikan
- SMP/MTs	101,37	102,00%	101,29	104,11%	102,78%	101,32	101,32	100%	Dinas Pendidikan
- SMA/SMK/MA	97,5	94,92%	96,1	86,65%	90,17%	96,8	96,8	100%	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni									
- SD/MI	100	98,49%	98,82	98,86%	100,04%	99,24	99,24	100%	Dinas Pendidikan
- SMP/MTs	95	92,46%	93,15	92,61%	99,42%	93,75	93,75	100%	Dinas Pendidikan
- SMA/SMK/MA	80,35	77,18%	78,76	77,24%	98,07%	79,35	79,35	100%	Dinas Pendidikan
Angka putus sekolah									
- SD/MI	0,02	0,01%	0,02	0,01%	Over target	0,02%	0,01%	Over target	Dinas Pendidikan
- SMP/MTs	0,02	0,08%	0,05	0,06%	120,00%	0,04%	0,06%	120,00%	Dinas Pendidikan
- SMA/SMK/MA	0,1	0,26%	0,15	0,27%	180,00%	0,12%	0,27%	180,00%	Dinas Pendidikan
Realisasi program dan kegiatan									
Kesehatan									
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	23	10,35	23	10,53	over target	23	13	over target	Dinas Kesehatan
Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	14	7,17	14	7,53	over target	14	9	over target	Dinas Kesehatan
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	102	113,79	102	59,8	over target	102	59,8	over target	Dinas Kesehatan
Angka usia harapan hidup	72	71,91	72			72			Dinas Kesehatan
Angka kematian balita per 1000 kelahiran	32	11,26	32	11,72	over target	32	11,72	over target	Dinas Kesehatan

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RKP TAHUN 2014	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2015			TARGET CAPAIAN KINERJA RKP 2016	PRAKIRAAN CAPAIAN RKP TAHUN BERJALAN		SKPD PENANNUNG JAWAB
			TARGET RKP 2015	REALISASI TAHUN 2015	TINGKAT CAPAIAN		REALISASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN	
hidup									
Persentase balita gizi buruk	<1%	0,509	<1%	0,37	over target	<1%	0,37	over target	Dinas Kesehatan
Prosentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	88	95,36	88	96,25	109,38%	88	96,25	109,38%	Dinas Kesehatan
Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kelahiran terlatih	90	91,29	90			90	90		Dinas Kesehatan
FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA									
Kebudayaan									
Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	2	2	2	2	100,00%	2	2		Dinas Parbudpora
Pemuda dan olah raga									
Jumlah klub olah raga	28		28		0,00%	28	28		Dinas Parbudpora
Jumlah gedung olah raga	30		30		0,00%	30	30		Dinas Parbudpora
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Pelayanan Urusan Wajib									
Pendidikan									
Ruang kelas kondisi baik :									
- SD/MI	85,00%	76,15%	78,75%	70,28%	89,24%	80,72%	75,28%	93,26%	Dinas Pendidikan
- SMP/MTs	100%	82,12%	84%	89,09%	106,06%	89%	91,09%	102,35%	Dinas Pendidikan
- SMA/SMK/MA	100%	82%	88%	93,45%	106,19%	92%	95%	103,26%	Dinas Pendidikan
Angka putus sekolah									
- SD/MI	0,02	0,01%	0,02	0,01%	Over target	0,02	0,01%	Over target	Dinas Pendidikan
- SMP/MTs	0,02	0,08%	0,05	0,06%	120,00%	0,04	0,06%	120,00%	Dinas Pendidikan
- SMA/SMK/MA	0,1	0,26%	0,15	0,27%	180,00%	0,13	0,27%	180,00%	Dinas Pendidikan
Angka kelulusan									
- SD/MI	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
- SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
- SMA/SMK/MA	100%	100%	100%	99,95%	99,95%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
Angka melanjutkan									
- Dari SD/MI ke SMP/MTs	100%	108,90%	98,55%			98,75%			Dinas Pendidikan
- Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	95%	86,85%	78,11%	90,01%	115,23%	80,25%	90,01%	112,16%	Dinas Pendidikan
Guru yang memiliki kualifikasi S1/D4	100%	91,19%	88%	92,63%	105,26%	92%	92,63%	100,68%	Dinas Pendidikan
Jumlah gedung SMP/MTs yang memiliki Lab. IPA	90%	80,00%	80,55%	80,55%	100,00%	85,75%	85,75%	100,00%	Dinas Pendidikan
Kesehatan									
Persentase balita gizi buruk	0,46	0,509	0,46	0,37	Over target	0,46	0,35	Over target	Dinas Kesehatan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	90	51,7%	90	48,29	53,66%	90	48,29	53,66%	Dinas Kesehatan
Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS	224	108	224	153	68,30%	224	153	68,30%	Dinas Kesehatan
Proporsi kasus TBC yang diobati dan	88	95,15%	88	98%	111,36%	88	98%	111,36%	Dinas Kesehatan

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RPKD TAHUN 2014	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2015			TARGET CAPAIAN KINERJA RPKD 2016	PRAKIRAAN CAPAIAN RPKD TAHUN BERJALAN		SKPD PENANNGUNG JAWAB
			TARGET RPKD 2015	REALISASI TAHUN 2015	TINGKAT CAPAIAN		REALISASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN	
sembuh dalam program DOTS									
Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare	100	106%	100	87,76%	87,76%	100	87,76%	87,76%	Dinas Kesehatan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100%	100	100%	1,00%	100	100%	1,00%	Dinas Kesehatan
Cakupan Penemuan AFP per 100.000 penduduk < 15 tahun	≥ 2	4	≥ 2	5	over target	≥ 2	5	over target	Dinas Kesehatan
Cakupan Penemuan dan Penanganan pneumonia balita	100	33%	100	71%	Under target	100	71%	Under target	Dinas Kesehatan
Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	over target	0	0	over target	Dinas Kesehatan
Angka kejadian malaria per 1000 penduduk	<1	0,0048	<1	0	over target	<1	0	over target	Dinas Kesehatan
Prevalensi HIV/AIDs (%) dari total populasi	<0,5	2,8%	<0,5	0,04	over target	<0,5	0,04	over target	Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100%	100%	67,19%	67,19%	100	67,19%	67,19%	Dinas Kesehatan
Rasio dokter per satuan penduduk	0,3	0,11	0,3	0,10	33,33%	0,3	0,10	33,33%	Dinas Kesehatan
Rasio tenaga medis persatuan penduduk :									
Perawat	0,84	1,58	0,84	0,60	71,43%	0,84	0,60	71,43%	Dinas Kesehatan
Bidan	0,55	0,75	0,55	0,80	145,45%	0,55	0,80	145,45%	Dinas Kesehatan
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100	44,44	100	100%	100%	100	100%	100%	Dinas Kesehatan
Cakupan Desa/kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100	100%	100	100%	100,00%	100	100%	100,00%	Dinas Kesehatan
Cakupan Desa Siaga Aktif	85	85,01%	80	100%	125,00%	82	100%	125,00%	Dinas Kesehatan
Cakupan kunjungan bayi	90	95%	90	96%	106,67%	90	96%	106,67%	Dinas Kesehatan
Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95	90,59%	95	91,83	9666,32%	95	91,83	9666,32%	Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah									
Gawat Darurat									
Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	100%	100%	87%	87,00%	100%	87%	87,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 jam	24	24 jam	24	100,00%	24 jam	24	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD	ATLS & ACLS (Dokter 100%) BTLS & BCLS (Perawat 100%)	100%	ATLS & ACLS (Dokter 85%) BTLS & BCLS (Perawat 100%)	Perawat 65%, dokter 56%	over target	ATLS & ACLS (Dokter 95%) BTLS & BCLS (Perawat 100%)	Perawat 65%, dokter 56%	over target	RSUD Dr. Sayidiman
Ketersediaan tim penanggulangan bencana	ADA (Tim Disaster RS)	1	ADA (Tim Disaster RS)	1	100,00%	ADA (Tim Disaster RS)	1	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	4 menit	8 menit	4 menit	2,35	over target	4 menit	2,35	over target	RSUD Dr. Sayidiman

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RKPd TAHUN 2014	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2015			TARGET CAPAIAN KINERJA RKPd 2016	PRAKIRAAN CAPAIAN RKPd TAHUN BERJALAN		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET RKPd 2015	REALISASI TAHUN 2015	TINGKAT CAPAIAN		REALISASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN	
Kepuasan Pelanggan	100%	77%	90%	74,05		95%	74,05		RSUD Dr. Sayidiman
Kematian pasien ≤ 24 jam	1/1000	6 jam	5/1000	9,43	under target	3/1000	9,43	under target	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	90%	100%	100%	100%	100,00%	90%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Rawat Jalan									
Dokter Spesialis pemberi pelayanan di Poliklinik	100%	34%	100%	76%	76,00%	100%	76%	76,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Ketersediaan Pelayanan	K. Saraf K. Paru K. Dalam K. Bedah K. Anak K. Mata K. Kebidanan K. Gigi dan Mulut K. Kulit dan Kelamin K. THT K. DOTS K. VCT K. Umum	11 pelayanan	K. Saraf K. Paru K. Dalam K. Bedah K. Anak K. Mata K. Kebidanan K. Gigi dan Mulut K. Kulit dan Kelamin K. THT K. DOTS K. VCT K. Umum	K. Saraf K. Paru K. Dalam K. Bedah K. Anak K. Mata K. Kebidanan K. Gigi dan Mulut K. Kulit dan Kelamin K. THT K. DOTS K. VCT K. Umum	100%	K. Saraf K. Paru K. Dalam K. Bedah K. Anak K. Mata K. Kebidanan K. Gigi dan Mulut K. Kulit dan Kelamin K. THT K. DOTS K. VCT K. Umum	K. Saraf K. Paru K. Dalam K. Bedah K. Anak K. Mata K. Kebidanan K. Gigi dan Mulut K. Kulit dan Kelamin K. THT K. DOTS K. VCT K. Umum	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Jam buka Pelayanan	07.30 s/d 12.30 Setiap Hari Kerja kecuali Jum'at: 08.00 - 11.00 WIB	100%	07.30 s/d 12.30 Setiap Hari Kerja kecuali Jum'at: 08.00 - 11.00 WIB	100%	100%	07.30 s/d 12.30 Setiap Hari Kerja kecuali Jum'at: 08.00 - 11.00 WIB	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Waktu tunggu di rawat jalan	± 20 menit	40 menit	± 20 menit	62,87 menit	under target	± 20 menit	62,87 menit	under target	RSUD Dr. Sayidiman
Kepuasan Pelanggan	95%	79%	85%	72,55%	85,35%	90%	72,55%	85,35%	RSUD Dr. Sayidiman
a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	100%		100%	52%	52,00%	100%	52%	52,00%	RSUD Dr. Sayidiman
b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	100%	36%	95%	60%	63,16%	100%	60%	63,16%	RSUD Dr. Sayidiman
Rawat inap									
Pemberi Pelayanan di Rawat Inap	100%	70%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Dokter Penanggung Jawab Pasien Rawat Inap	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Jam Visite Dokter Spesialis	07.30-14.00	80%	07.30-14.00	76%	76,00%	07.30-14.00	76%	76,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Kejadian Infeksi Pasca Operasi	0	0%	0	0,38%	under target	0	0,38%	under target	RSUD Dr. Sayidiman
Kejadian Infeksi Nosokomial	0	2%	0	0,79%	under target	0	0,79%	under target	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RKPd TAHUN 2014	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2015			TARGET CAPAIAN KINERJA RKPd 2016	PRAKIRAAN CAPAIAN RKPd TAHUN BERJALAN		SKPD PENANNGUNG JAWAB
			TARGET RKPd 2015	REALISASI TAHUN 2015	TINGKAT CAPAIAN		REALISASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN	
Kematian pasien > 48 jam	0,24%	2,00%	1,25%	2,17%	173,60%	1,00%	2,17%	173,60%	RSUD Dr. Sayidiman
Kejadian Pulang Paksa	1%	1%	1%	3,63%	under target	1%	3,63%	under target	RSUD Dr. Sayidiman
Kepuasan Pasien	95,00%	74%	80,00%	74,25%	92,81% 47,25%	85,00%	74,25%	92,81% 47,25%	RSUD Dr. Sayidiman
Rawat Inap TB:									RSUD Dr. Sayidiman
a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	100%	36%	100%	47,25%	47,25%	100%	47,25%		RSUD Dr. Sayidiman
b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	80%	70%	75%	73,89%	98,52%	75%	73,89%	98,52%	RSUD Dr. Sayidiman
Bedah Sentral									
Waktu tunggu operasi elektif	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	100,00%	1 hari	1 hari	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Waktu tunggu operasi cito	30 menit	50 menit	45 menit	45,46 menit	98,00%	45 menit	45,46 menit	98,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Kejadian Kematian di meja operasi	0%	0	0%	0	100,00%	0%	0	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Komplikasi anaestesi karena overdosis, reaksi anaestesi dan salah penempatan endotracheal tube	0%	3%	0%	0,04%	under target	0%	0,04%	under target	RSUD Dr. Sayidiman
Persalinan dan Perinatologi									
Kejadian kematian ibu karena persalihan	a. 0.076% b. 0.0196% c. 0%	0 % 0,54 % 0 %	a. 0.076% b. 0.0196% c. 0%	a. 0% b. 0% c. 0%	over target	a. 0.076% b. 0.0196% c. 0%	a. 0% b. 0% c. 0%	over target	RSUD Dr. Sayidiman
Pemberi pelayanan persalinan normal	100%	51%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	75%	4	30%			50%			RSUD Dr. Sayidiman
Pemberi pelayanan persalinan dengan operasi	100%	92%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Kemampuan menangani BBLR (\leq 2500 gr)	100%	97%	100%	76%	76,00%	100%	76%	76,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	20%	43%	20%	51%	255,00%	20%	51%	255,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Keluarga Berencana:									RSUD Dr. Sayidiman
a. Presentase KB (Vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten (dr SpOG, dr SpB, dr SpU, dr umum terlatih)	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
b. Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh bidan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RKP TAHUN 2014	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2015			TARGET CAPAIAN KINERJA RKP 2016	PRAKIRAAN CAPAIAN RKP TAHUN BERJALAN		SKPD PENANNUNG JAWAB
			TARGET RKP 2015	REALISASI TAHUN 2015	TINGKAT CAPAIAN		REALISASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN	
terlatih									
Kepuasan Pelanggan	80%	72%	80%	75,98%	94,98%	80%	75,98%	94,98%	RSUD Dr. Sayidiman
Intensif									
Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	0%	0%	0%	0,39%	under target	0%	0,39%	under target	RSUD Dr. Sayidiman
PemberPemberi pelayanan Unit Intensifi pelayanan Unit Intensifi	100%	a. 100% b.56%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
	100%		60%	44%	73,33%	70%	44%	73,33%	RSUD Dr. Sayidiman
Radiologi									
Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	45 menit	1 jam	45 menit	59,44 menit	under target	45 menit	59,44 menit	under target	RSUD Dr. Sayidiman
Pelaksana Ekspertisi	100%	75%	89%	100%	112,36%	90%	100%	112,36%	RSUD Dr. Sayidiman
Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	0,70%	1,00%	0,70%	1,9%	under target	0,70%	1,9%	under target	RSUD Dr. Sayidiman
Kepuasan Pelanggan	80%	78%	80%	72,98%	91,23%	80%	72,98%	91,23%	RSUD Dr. Sayidiman
Laboratorium Patologi Klinik									
Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	125 mnt	150 menit	140 mnt	180 menit	under target	140 mnt	180 menit	under target	RSUD Dr. Sayidiman
Pelaksana Ekspertisi	Dokter Sp. PK.	100%	Dokter Sp. PK.	100%		Dokter Sp. PK	100%		RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Kepuasan pelanggan	90%	100%	90%	72,85%	80,94%	90%	72,85%	80,94%	RSUD Dr. Sayidiman
Rehabilitasi Medik									
Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	0%	0%	0%	0%	100,00%	0%	0%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Kepuasan Pelanggan	85%	78%	85%	74,18%	87,27%	85%	74,18%	87,27%	RSUD Dr. Sayidiman
Farmasi									
Waktu tunggu pelayanan									RSUD Dr. Sayidiman
a. Obat Jadi	25 menit	14 menit	25 menit	25,8 menit	under target	25 menit	25,8 menit	under target	RSUD Dr. Sayidiman
b. Obat Racikan	45 menit	35 menit	45 menit	51,32 menit	under target	45 menit	51,32 menit	under target	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya Kejadian Kesalahan Pemberian Obat	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Kepuasan Pelanggan	80%	96%	76%	66,78%	87,87%	78%	66,78%	87,87%	RSUD Dr. Sayidiman
Penulisan resep sesuai dengan formularium	100%	100%	93%	75,13%	80,78%	95%	75,13%	80,78%	RSUD Dr. Sayidiman
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)									
Ada anggota Tim PPI yang terlatih	75%	5%	35%	25%	71,43%	45%	25%	71,43%	RSUD Dr. Sayidiman

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RKP TAHUN 2014	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2015			TARGET CAPAIAN KINERJA RKP 2016	PRAKIRAAN CAPAIAN RKP TAHUN BERJALAN		SKPD PENANNGUNG JAWAB
			TARGET RKP 2015	REALISASI TAHUN 2015	TINGKAT CAPAIAN		REALISASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN	
Tersedia APD di setiap instalasi/ departement	60%	100%	60%	93%	155,00%	60%	93%	155,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/ HAI (Health Care Associated Infections) di RS (minimum 1 parameter)	75%	37%	35%	100%	285,71%	45%	100%	285,71%	RSUD Dr. Sayidiman
Gizi									
Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	20%	20%	10,75%	1,08%	over target	15%	1,08%	over target	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%	100%	99,80%	99,80%	100%	99,80%	99,80%	RSUD Dr. Sayidiman
Transfusi Darah									
Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100% terpenuhi	100%	100% terpenuhi	98,98%	98,98%	100% terpenuhi	98,98%	98,98%	RSUD Dr. Sayidiman
Kejadian reaksi transfusi	0%	6%	0%	0,40%	under target	0%	0,40%	under target	RSUD Dr. Sayidiman
Pelayanan GAKIN									
Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100%	71%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Rekam Medis									
Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	99%	100%	99,23%	99,23%	100%	99,23%	99,23%	RSUD Dr. Sayidiman
Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	92%	90%	94,41%	104,90%	92%	94,41%	104,90%	RSUD Dr. Sayidiman
Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	7 menit	5 menit	7 menit	8,81 menit	Under target	7 menit	8,81 menit	Under target	RSUD Dr. Sayidiman
Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	14 menit	12 menit	14 menit	13,69 menit	over target	14 menit	13,69 menit	over target	RSUD Dr. Sayidiman
Limbah Pengelolaan									
Baku mutu limbah cair	20,3% 65% 15 6,79	100%	21,7% 70% 16 7,24	BOD = 4,10 COD = 10,9 TSS = 0,400 PH = 8		21,2% 69% 15 7,08	BOD = 4,10 COD = 10,9 TSS = 0,400 PH = 8		RSUD Dr. Sayidiman
Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Administrasi dan Manajemen									
Tindak Lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%	90%	100%	111,11%	92%	100%	111,11%	RSUD Dr. Sayidiman
Kelengkapan Laporan Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	17%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	34%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Karyawan yang mendapat pelatihan	60%	3%	45%	5,80%	12,89%	50%	5,80%	12,89%	RSUD Dr. Sayidiman

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RKP TAHUN 2014	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2015			TARGET CAPAIAN KINERJA RKP 2016	PRAKIRAAN CAPAIAN RKP TAHUN BERJALAN		SKPD PENANNUNG JAWAB
			TARGET RKP 2015	REALIASASI TAHUN 2015	TINGKAT CAPAIAN		REALIASASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN	
minimal 20 jam setahun									
Cost Recovery	100%	125%	100%	117%	117,00%	100%	117%	117,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	67%	100%	23,08%	23,08%	100%	23,08%	23,08%	RSUD Dr. Sayidiman
Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	1 jam	1 jam	1 jam	2,82 jam	under target	1 jam	2,82 jam	under target	RSUD Dr. Sayidiman
Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>Ambulance/ Mobil Jenazah</u>									
Waktu Pelayanan ambulance/mobil jenazah	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	100,00%	24 jam	24 jam	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/mobil jenazah di Rumah Sakit	30 menit	35 menit	30 menit	12,01 menit	over target	30 menit	12,01 menit	over target	RSUD Dr. Sayidiman
Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	Sesuai ketentuan daerah	21	Sesuai ketentuan daerah	33,61 menit		Sesuai ketentuan daerah	33,61 menit		RSUD Dr. Sayidiman
<u>Pemulasaran Jenazah</u>									
Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaran jenazah	1 jam	1,5 jam	1 jam 65 menit	1 jam 54 menit	over target	1 jam 60 menit	1 jam 54 menit	over target	RSUD Dr. Sayidiman
<u>Laundry</u>									
Tidak Adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	77%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT</u>									
Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	30 menit	64%	30 menit	34,75 menit	under target	30 menit	34,75 menit	under target	RSUD Dr. Sayidiman
Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	75%	100%	150%		100%	150%		RSUD Dr. Sayidiman
Peralatan Laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	71%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>Pekerjaan Umum</u>									
Prosentase jalan kabupaten kondisi baik	81,54%		75,54%	75,54%	100,00%	77,54%	77,54%	100,00%	Dinas PU BMCK
Jumlah jembatan kondisi baik	233	273	231	237 Unit	105,05%	232	240 Unit	107,00%	Dinas PU BMCK
Rasio jaringan irigasi kondisi baik	72,25%	79%	70,75%	72,45%		71,25%			Dinas PU Pengairan
<u>Perumahan</u>									
Rumah tangga pengguna air bersih	75%		60%	86,3%	143,83%	65%	88,3%	135,85%	Dinas PU BMCK
Rumah tangga bersanitasi	90%	81,57%	77%	81,70%	106,10%	85%	82,70%	97,29%	Dinas PU BMCK
Prosentase rumah layak huni	100%	97,02%	100%	99,78%	99,78%	100%	99,85%	99,85%	Dinas PU BMCK
Prosentase permukiman layak huni	100%	97,02%	100%	99,78%	99,78%	100%	99,85%	99,85%	Dinas PU BMCK
Persentase luas kawasan kumuh	0,6	0,0048	0,7	0,00483	Over target	0,68	0,004	Over target	Dinas PU BMCK

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RKP TAHUN 2014	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2015			TARGET CAPAIAN KINERJA RKP 2016	PRAKIRAAN CAPAIAN RKP TAHUN BERJALAN		SKPD PENANNGUNG JAWAB
			TARGET RKP 2015	REALIASASI TAHUN 2015	TINGKAT CAPAIAN		REALIASASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN	
Penataan Ruang									
Dokumen RTRW	ada		ada	Ada	100,00%	Ada	Ada	100,00%	Bappeda
Dokumen RDTRK	18	10	12	10	83,33%	14	12	85,71%	Bappeda
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	16%	10,82%	13%	11,07%	85,15%	14%	12%	85,71%	Dinas PU BMCK
Perencanaan pembangunan									
Penjabaran program RPJMD ke dalam RKP	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bappeda
Perhubungan									
Load factor	0,56		0,55	0,54	98,18%	0,56	0,56	100%	Dishubkominfo
Jumlah uji kir angkutan umum	1460	3091	1436	2267	0,00%	1440			Dishubkominfo
Prosentase uji kir angkutan umum	92	85,93	91,2	75,80%		91,50			Dishubkominfo
Prosentase pemasangan rambu lalu lintas	85,4	64,9	70,4%	68,61%	97%	75,40%	71%	94,16%	Dishubkominfo
Prosentase pemasangan marka jalan	24,6	14,25	17,9%	15,60%	87,15%	20,19%	17%	84,20%	Dishubkominfo
Penerangan jalan umum	80%	69,12%	65%	33,4%	51,38%	70%	35%	50,00%	Dishubkominfo
Lingkungan hidup									
Persentase penanganan sampah perkotaan	90%		75%	75%	100%	80%	80%	100%	BLH
Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	25%	62.683	21%	62.683	-	23%	62.683	-	BLH
Luas lahan kritis/lahan kritis tertangani	2.614		4.714,10	529,8	Under target	4.014,05	529,8	Under target	
Pertanian									
Kependudukan dan catatan sipil									
Prosentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	100%	-	99%	96%	96,97%	100%	97%	97,00%	Dispendukcapil
Presentase penduduk berakte kelahiran	80	36,5%	50	41%	82,00%	60%	50%	83,33%	Dispendukcapil
Presentase anak berakte kelahiran	100	98	98,4			98,70%			Dispendukcapil
Persentase keluarga ber KK	100	100%	99	100%	101,01%	99%	100%	101,01%	Dispendukcapil
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak									
Rasio KDRT	0,10%		0,11%	0,02%	Over target	0,11%	0,02%	Over target	Badan PP & KB
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	Badan PP & KB
Partisipasi angkatan kerja perempuan	88	85,71	88	98,93	112,42%	88	98,93	112,42%	Badan PP & KB
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	Badan PP & KB
Keluarga berencana dan keluarga sejahtera									
Rasio akseptor KB	74,65		74,56	77,62	104,10%	74,6	78	104,56%	Badan PP & KB
Cakupan peserta KB aktif	74,65	73,98	74,56	77,62	104,10%	74,6	78	104,56%	Badan PP & KB

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RKPd TAHUN 2014	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2015			TARGET CAPAIAN KINERJA RKPd 2016	PRAKIRAAN CAPAIAN RKPd TAHUN BERJALAN		SKPD PENANNGUNG JAWAB
			TARGET RKPd 2015	REALIASASI TAHUN 2015	TINGKAT CAPAIAN		REALIASASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN	
Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	28%	31%	30%	30,70%	102,33%	30%	31%	103,33%	Badan PP & KB
Anmetneed kebutuhan Keluarga berencana (KB) yang tidak terpenuhi	10%	13%	12%	11,42%	Over target	11%	11%	100,00%	Badan PP & KB
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	77%	96,10	76%	95,10%	125,13%	77%	96%	124,68%	Badan PP & KB
Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	77%	79%	77%	74%	96,10%	77%	74%	96,10%	Badan PP & KB
Sosial									
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	4,64%		3,92%	54,46%	1389,29%	4,20%	55%	1309,52%	Dinsos Nakertrans
Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya	4,57%	0,45%	3,87%	1,16%	29,97%	3,99%	1,5%	37,59%	Dinsos Nakertrans
Ketenagakerjaan									
Angka partisipasi angkatan kerja	70,11%		69,94%	69,14%	98,86%	69,98%	69,98%	100,00%	Dinsos Nakertrans
Tingkat pengangguran terbuka	3	4,28	3,5	4,28	Under target	3,25	4%	Under target	Dinsos Nakertrans
Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif	56,21%	30,45	54,47%	53,92	98,99%	54,85%	54,85%	100,00%	Dinsos Nakertrans
Koperasi, usaha kecil dan menengah									
Persentase koperasi aktif	86		80	91,87	114,84%	82	91,87	112,04%	Dinkop & UKM
Jumlah UKM non BPR/KLM	1.194	842	1.180	973	82,46%	1.187	973	81,97%	Dinkop & UKM
Jumlah BPR/LKM	184	119	134	134	100,00%	149	134	89,93%	Dinkop & UKM
Penanaman modal									
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1	0	1	1	100%	1			
Jumla nilai investasi berskala lokal (non PMDN/PMA) dalam juta	960.000	148.916	100.000	190.078	190,08%	140.000	190.078	135,77%	Bag. Adm. Perekonomian
terselenggaranya promosi peluang penanaman modal	40 kl		35 kl			36 kl			Bag. Adm. Perekonomian
Kebudayaan									
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	7		7	5	71,43%	7	5	71,43%	Dinas Parbudpora
Kepemudaan dan olah raga									
Jumlah organisasi pemuda aktif	290		287	2	0,70%	289	2	0,70%	Dinas Parbudpora
Jumlah kegiatan/ kompetisi olah raga	30	13	30	13	43,33%	30	13	43,33%	Dinas Parbudpora
Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri									
Persentase LSM, Ormas, dan OKP yang dibina	100%		100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	Bakesbangpol
Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	6	6	6	6	100,00%	6	6	100,00%	Bakesbangpol
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian									

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RKPd TAHUN 2014	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2015			TARGET CAPAIAN KINERJA RKPd 2016	PRAKIRAAN CAPAIAN RKPd TAHUN BERJALAN		SKPD PENANNGUNG JAWAB
			TARGET RKPd 2015	REALISASI TAHUN 2015	TINGKAT CAPAIAN		REALISASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN	
Peringkat kinerja penyelenggaraan otoda	<50		<50	82	under target	<50	<50	100%	Bag. Adm. Pemerintahan Umum
Hasil evaluasi Lakip	C	C +	C	CC	over target	CC	B	Over target	Bag. Ortala
Hasil predikat pemeriksaan/ pengawasan pengelolaan keuangan daerah	WTP	WDP	WTP	WTP	100,00%	WTP	WTP	100%	Inspektorat
Skor Indeks Kepuasan masyarakat	75	71	72	75,35	104,65%	73	75,35		Bag. Ortala
Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	260	389	125	446	356,80%	175	446		BKD
Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional	250	41	125	79	63,20%	150	79		BKD
Prosentase pejabat yang mengikuti fit and proper test	975	0	400	27	6,75%	600	27		BKD
Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar/ijin belajar	1.310	154	500	174	34,80%	750	174		BKD
Rasio Poskamling per desa/kelurahan	6,40%	5,91	6,10%	20%	322,58%	6,20%	20%	322,58%	Kantor Sat Pol PP
Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	100%	0,01%	0,01%	100,00%	Kantor Sat Pol PP
Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban, ketentraman, keindahan)	95%	86%	80%	75%	93,75%	85%	75%	88,24%	Kantor Sat Pol PP
Rasio penegakan perda/jumlah pelanggaran perda	98%	85%	90%			94%			Kantor Sat Pol PP
Jumlah lembaga/kelompok masyarakat siaga bencana terlatih (orang)	1.920	99	420	99	23,57%	1.920	99		BPBD
Ketahanan pangan									
Ketersediaan energi dan protein perkapita	65%		50%	46,25%	92,50%	55%	47,25%	85,91%	BKP
Penguatan cadangan pangan	70%	50%	55%	34,56	62,84%	60%	40	66,67%	BKP
Skor pola pangan harapan	90%	62%	75%			80%			
Pemberdayaan masyarakat desa									
Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	207		207	207	100%	207	207		Bapermas & Pemdes
Rata - rata jumlah kelompok binaan PKK	252	252	252	252	100%	252			Bapermas & Pemdes
Statistik									
Buku kabupaten dalam angka	Ada		Ada	Ada	100,00%	Ada	Ada	100,00%	Bappeda
Buku PDRB kabupaten magetan	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00%	Ada	Ada	100,00%	Bappeda
Kecamatan dalam angka	18	18	18	18	100,00%	18	18	100,00%	Bappeda
kearsipan									
Prosentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	100%	-	89%	70%	79%	92%	75%	81,52%	Kantor Arpus
Komunikasi dan informatika									
Jumlah pemberitaan melalui - Media massa	230	18	210	18	8,57%	225	18	8,00%	Bag. Humas & Protokol

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RKP TAHUN 2014	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2015			TARGET CAPAIAN KINERJA RKP 2016	PRAKIRAAN CAPAIAN RKP TAHUN BERJALAN		SKPD PENANNGUNG JAWAB
			TARGET RKP 2015	REALIASASI TAHUN 2015	TINGKAT CAPAIAN		REALIASASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN	
- Media luar ruang	60	12	55	12	21,82%	60	12	20,00%	
Prosentase SKPD yang menyediakan data di website resmi	100%		80%			90%			
Jumlah pertunjukan rakyat	6	1	6	-		6	-		Bag. Humas & Protokol
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat dan telecenter	10	9	8	10	125,00%	8	10	125,00%	Dishubkominfo
Perpustakaan									
Jumlah perpustakaan	845		781			803			Kantor Arpus
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	30.000	23.736	26.000	24.277		27.000			Kantor Arpus
Koleksi buku yang tersedia	83.000	57.500	62.700	58.397	93,14%	68.300	60.000	87,85%	Kantor Arpus
PELAYANAN URUSAN PILIHAN									
Kelautan dan perikanan									
Budidaya ikan (ton)	1.772,6		1.576	1.242,81	78,86%	1.654,8	1.242,81	75,10%	Disnakan
Konsumsi ikan (Kg/Kapita/th)	20,09	12,14	17,35	-	-	18,22	-	-	Disnakan
Pembudidaya ikan (orang)	2,8	2,625	2,65	2.526	over target	2,7	2.526		Disnakan
Jumlah unit pembenihan (UPR)	52	46	49	53	108%	50	53	106,00%	Disnakan
Produksi Perikanan Tangkap (PUD) (ton)	40,33	36,71	38	37,665	99,12%	38,76	37,665	97,17%	Disnakan
Pertanian									
Jumlah produksi hasil pertanian									
- Padi (kw)	4.000.000	3.034.720	3.486.000	3.101.110	88,96%	3.656.000	3.101.110	84,82%	Dinas Pertanian
- Jagung (kw)	800.000	792.140	777.000	897.600	115,52%	778.000	897.600	115,37%	Dinas Pertanian
- Kedelai (kw)	75.000	64.220	61.000	53.640	87,93%	67.000	53.640	80,06%	Dinas Pertanian
- Tebu (kw)	575.000	509.427,00	535.000	484.641,60	90,59%	549.000	484.641,60	88,28%	Dinas Pertanian
Jumlah produksi peternakan									
- Sapi (ekor)	200.000	107.104	158.500						Disnakan
- Kambing (ekor)	49.000	37.918	42.500	41.747	98,23%	45.000	41.747	92,77%	Disnakan
- Ayam (ekor)	8.500.000	12.751.175	7.000.000	12.806.999	182,96%	7.500.000	12.806.999	170,76%	Disnakan
- Telur (Kg)	19.000.000	17.780.121	17.500.000	21.191.069	121,09%	18.000.000	21.191.069	117,73%	Disnakan
Kehutanan									
Jumlah produksi hasil hutan (kayu jati, m3)	1.650		1.550	1.864,33	120,28%	1.600	1.864,33	116,52%	Dinas Hutbun
Kerusakan Kawasan Hutan	5	5	5,5	186		5			Dinas Hutbun
Luas kawasan hutan	6.455	7.263	6.452	7.265	Under target	6.452	7.265	Under target	Dinas Hutbun
Energi dan sumber daya mineral									
Jumlah titik pemasangan energi alternatif terbarukan (biogas)	110		64	19 titik	29,69%	64	19 titik	29,69%	Bag. Adm. SDA
Pariwisata									
Angka kunjungan wisata	956.409	673.703	638.688	866.978	135,74%	679.889	866.978	127,52%	Dinas Parbudpora

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RKP TAHUN 2014	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2015			TARGET CAPAIAN KINERJA RKP 2016	PRAKIRAAN CAPAIAN RKP TAHUN BERJALAN		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET RKP 2015	REALISASI TAHUN 2015	TINGKAT CAPAIAN		REALISASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN	
Jumlah PAD sektor wisata (Rp juta)	4.902.613	5.357.537.500	6.000.000	6.425.779	111,60%		6.425.779		Dinas Parbudpora
Perdagangan									
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	4	-	3%	6,29%	210%	3%	6,29%	210%	Dinas Perindag
persentase pasar tradisional kondisi baik	80%	40%	50%	50%	100,00%	70%	60%	85,71%	Dinas Perindag
Perindustrian									
Pertumbuhan industri	15.999	15.037	15.149	14.849	98,02%	15.449	14.849	96,12%	Dinas Perindag
Cakupan bina kelompok pengrajin	52	532	47	585		48			Dinas Perindag
Ketransmigrasian									
Jumlah transmigran ditempatkan (KK)	90	35	75	25	33,33%	80	25	31,25%	Dinsosnakertrans

TABEL 2.33
EVALUASI CAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM)
KABUPATEN MAGETAN

BIDANG URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	REALISASI CAPAIAN			TARGET CAPAIAN TAHUN 2016
		INDIKATOR	NILAI		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	
1. Urusan pendidikan dasar	Pendidikan Dasar	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	100	Tahun 2014	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	100	Tahun 2014	100%	100%	99,08% 100%	98,50% 100%
		Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	100	Tahun 2014	100%	100%	92%	86%
		Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru	100	Tahun 2014	100%	100%	44% 99%	50% 98%
		Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	100	Tahun 2014	100%	100%	96%	100%
		Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	100	Tahun 2014	100%	100%	96%	100%
		Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	100	Tahun 2014	100%	100%	100%	100%
		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan	100	Tahun 2014	100%	100%	100%	100%

BIDANG URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	REALISASI CAPAIAN			TARGET CAPAIAN TAHUN 2016
		INDIKATOR	NILAI		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	
		guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;						
		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris	100	Tahun 2014	100%	100%	97%	100%
		Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100	Tahun 2014	100%	100%	86%	100%
		Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100	Tahun 2014	100%	100%	91%	83%
		Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100	Tahun 2014	100%		100%	100%
		Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	100	Tahun 2014	100%	100%	100%	100%
		Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	100	Tahun 2014	100%	100%	98%	100%
2. Urusan sosial	Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/Kota	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80%	Tahun 2008-2015	14,09%	54,11%	54,46%	60%
	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80%	Tahun 2008-2015	1,10%	0,14%	0,01%	10%
	Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Kabupaten/Kota	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80%	Tahun 2008-2015	72,73%	72,73%	72,73%	75%
	Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	Tahun 2008-2015	88%	88%	0	
	Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80%	Tahun 2008-2015	100%	100%	100%	
	Evakuasi korban bencana skala Kabupaten/Kota	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan	80%	Tahun 2008-2015	88%	88%	0	

BIDANG URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	REALISASI CAPAIAN			TARGET CAPAIAN TAHUN 2016
		INDIKATOR	NILAI		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	
		menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap						
	Pelaksanaan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40%	Tahun 2008-2015	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%
3. Urusan KB dan KS	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%.	100	Tahun 2014	68,00%	68,00%	0,32	
		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%	100	Tahun 2014	85,15%	85,15%	77,62	
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%	100	Tahun 2014	12,25%	12,25%	11,42	
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%	100	Tahun 2014	81,56%	81,56%	69,61	
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	100	Tahun 2014	82,15%	82,15%	81,79	
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	100	Tahun 2014	15,60%	15,60%	1:04	
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan	100	Tahun 2014	100,00%	100,00%	1:1	
	Penyediaan Alat dan obat Kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100	Tahun 2014	85,00%	85,00%	30%	
	Penyediaan Informasi Data Mikro	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun	100	Tahun 2014	100,00%	100,00%	100,00%	
4. Urusan kesehatan	Pelayanan Kesehatan Dasar	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	95%	Tahun 2015	93,00%	93,00%	91,83%	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	Tahun 2015	80,00%	80,00%	94,16%	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%	Tahun 2015	94,00%	94,00%	95,01%	
		Cakupan pelayanan nifas	90%	Tahun 2015	95,00%	95,00%	94,59%	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80%	Tahun 2010	77,00%	77,00%	90,68%	
		Cakupan kunjungan bayi	90%	Tahun 2010	90,00%	90,00%	96,1%	
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	Tahun 2010	>95,00%	>95,00%	89,79%	
		Cakupan pelayanan anak balita	90%	Tahun 2010	85,00%	85,00%	86,62%	
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI	100%	Tahun 2010	100,00%	100,00%		

BIDANG URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	REALISASI CAPAIAN			TARGET CAPAIAN TAHUN 2016
		INDIKATOR	NILAI		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	
		pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin						
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	Tahun 2010	100,00%	100,00%	100,00%	
		Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	Tahun 2010	100,00%	100,00%	100,00%	
		Cakupan peserta KB aktif	70%	Tahun 2010	>70,00%	>70,00%	72,48%	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	100%	Tahun 2010				
		<input type="checkbox"/> Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun			>2,00%	>2,00%		
		<input type="checkbox"/> Penemuan penderita pneumonia balita			90,00%	90,00%		
					80,00%	80,00%		
		<input type="checkbox"/> Penderita DBD yang ditangani			100,00%	100,00%		
		<input type="checkbox"/> Penemuan penderita diare			85,00%	85,00%		
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	Tahun 2015	100,00%	100,00%	100,00%	
	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	Tahun 2015	100,00%	100,00%	100,00%	
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100%	Tahun 2015	95,00%	100,00%	100,00%	
	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLB	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	Tahun 2015	100,00%	100,00%		
	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif		80%	Tahun 2015	60,00%	60,00%		
5. Urusan kesenian	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	Cakupan Kajian Seni 50%	100%	Tahun 2014	26,7	40	26,7	
		Cakupan Fasilitasi Seni 30%	100%	Tahun 2014	190,5	238,1	190,5	
		Cakupan Gelar Seni 75%	100%	Tahun 2014	133,3	133,3	133,3	
		Cakupan Misi Kesenian 100%	100%	Tahun 2014	50	50	50	
	Sarana dan Prasarana	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25%	100%	Tahun 2014	200	200	200	
		Cakupan Tempat 100%	100%	Tahun 2014	0	0	0	
		Cakupan Organisasi 34%	100%	Tahun 2014	147,1	147,1	147,1	
6. Urusan ketenaga kerjaan	Pelayanan Pelatihan Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	Tahun 2016	0%	0%	0%	0%
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	Tahun 2016	0%	0%	0%	0%
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	60%	Tahun 2016	5%	6%	6%	6,50%

BIDANG URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	REALISASI CAPAIAN			TARGET CAPAIAN TAHUN 2016
		INDIKATOR	NILAI		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	
		kewirausahaan						
	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	Tahun 2016	28,89%	32,19%	61%	65%
	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	Tahun 2016	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif	50%	Tahun 2016	25%	33%	55%	60%
	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45%	Tahun 2016	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50%	Tahun 2016	0%	0%	2%	2,50%
7. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	Tahun 2014	22,00%	22,00%	127	
	pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	Tahun 2014	100,00%	100,00%	100,00%	
	rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%	Tahun 2014	92,00%	92,00%		
		cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%	Tahun 2014	99,00%	99,00%		
	penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80%	Tahun 2014	87%	87%		
		cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	50%	Tahun 2014	47%	47%		
	pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50%	Tahun 2014	54,00%	54,00%		
		cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	Tahun 2014	92,00%	92,00%		
8. Urusan ketahanan pangan	Ketersediaan Dan Cadangan Pangan	Ketersediaan energi dan protein perkapita	90%	Tahun 2015	44	42,4 %	100 %	100 %
		Penguatan Cadangan Pangan	60%	Tahun 2015	45	50%	34,56%	65%
	Distribusi dan Akses	Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses	90%	Tahun 2015	56	67%	100%	100%

BIDANG URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	REALISASI CAPAIAN			TARGET CAPAIAN TAHUN 2016
		INDIKATOR	NILAI		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	
	Pangan	pangan						
		Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90%	Tahun 2015	52	56%	100%	100%
	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90%	Tahun 2015	60	62%	89,70%	90%
		Pengawasan dan pembinaan Keamanan Pangan	80%	Tahun 2015	62	65%	100%	100%
	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	60%	Tahun 2015	40	46%	34,52%	45%
9. Urusan perhubungan	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75%	Tahun 2014	86,89 %	90,42 %	90,42 %	90.42 %
		Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	60%	Tahun 2014	-	-	-	-
	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100%	Tahun 2014	42 %	42 %	42 %	58 %
		Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40%	Tahun 2014	80 %	80 %	80 %	80 %
	Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	60%	Tahun 2014	33,63 %	37,47 %	39,85 %	42,41 %
	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60%	Tahun 2014	154 %	172 %	198 %	200 %
	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	50%	Tahun 2014	20 %	40 %	40 %	40 %
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100%	Tahun 2014	71,43 %	57,14 %	57,14 %	57,14 %
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	40%	Tahun 2014	50 %	66,67 %	66,67 %	83,33 %
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%	Tahun 2014	-	-	-	-
	Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	100%	Tahun 2014	65,57 %	64,75 %	63,52 %	64 %
	Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan	Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota	75%	Tahun 2014	-	-	-	-

BIDANG URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	REALISASI CAPAIAN			TARGET CAPAIAN TAHUN 2016
		INDIKATOR	NILAI		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	
	Danau	pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.						
		Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	40%	Tahun 2014	-	-	-	-
	Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.	60%	Tahun 2014	-	-	-	-
	Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.	100%	Tahun 2014	-	-	-	-
	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.	50%	Tahun 2014	-	-	-	-
	Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	60%	Tahun 2014	-	-	-	-
		Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota.	100%	Tahun 2014	-	-	-	-
	Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan	Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	60%	Tahun 2014	-	-	-	-
	Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	100%	Tahun 2014	-	-	-	-
	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	50%	Tahun 2014	-	-	-	-
	Jaringan Pelayanan	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas	90%	Tahun 2014	-	-	-	-

BIDANG URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	REALISASI CAPAIAN			TARGET CAPAIAN TAHUN 2016
		INDIKATOR	NILAI		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	
	Angkutan Laut	dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.						
		Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	100%	Tahun 2014	-	-	-	-
	Jaringan Prasarana Angkutan Laut	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	60%	Tahun 2014	-	-	-	-
	Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.	100%	Tahun 2014	-	-	-	-
	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	100%	Tahun 2014	-	-	-	-
10.Urusan penanaman modal	Kebijakan Penanaman Modal	tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan 1 sektor/bidang usaha pertahun	1 (satu) sektor/bidang usaha/tahun	Tahun 2014	1 (satu)/sektor / Bidang	1 (satu)/sektor / bidang	-	
	Kerjasama Penanaman Modal	terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan 1 kali /tahun	1 (satu) kali/tahun	Tahun 2014	1 kali	1 kali	Nihil	
	Promosi Penanaman Modal	terselenggaranya promosi peluang penanaman modal 1 kali/tahun	1 (satu) kali/tahun	Tahun 2014	1kali	1kali	21	
	Pelayanan Penanaman Modal	terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal 100%	100%	Tahun 2014	-	-		
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 kali/tahun	1 (satu) kali/tahun	Tahun 2014	-	-	-	
	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 100%	100%	Tahun 2014	0	0	-	
	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat 1 kali /tahun	1 (satu) kali/tahun	Tahun 2014	3 kali	3 kali	1	

BIDANG URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	REALISASI CAPAIAN			TARGET CAPAIAN TAHUN 2016
		INDIKATOR	NILAI		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	
11.Urusan komunikasi dan informatika	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:						
		a) media massa seperti majalah, radio, dan televisi;	12 kali/tahun	Tahun 2014	8 kl/th	10 kl/th	10 kl/th	10 kl/th
		b) media baru seperti <i>website</i> (media online);	setiap hari	Tahun 2014	3 kl/minggu	4 kl/minggu	4 kl/minggu	4 kl/minggu
		c) media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	12 kali/tahun	Tahun 2014	6 kl/th	8 kl/th	8 kl/th	8 kl/ th
		d) media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau	12 kali/tahun setiap kecamatan	Tahun 2014	6 kl/th	8 kl/th	8 kl/th	8 kl/th
		e) media luar ruang seperti media buletin, <i>leaflet</i> , <i>booklet</i> , brosur, spanduk, dan baliho	12 kali/tahun	Tahun 2014	12 kl/th	12 kl/th	12 kl/th	12 kl/th
	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	Tahun 2014	38.88%	44.44%	44.44%	50%
12.Urusan perumahan rakyat	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	Tahun 2009-2025			97,27%	97,55%
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%	Tahun 2009-2025			97,27%	97,55%
	Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100%	Tahun 2009-2025	100%	100%		
13.Urusan lingkungan hidup	elayanan pencegahan pencemaran air	prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	20%	Tahun 2009	100%	100%	100%	
			40%	Tahun 2010				
			60%	Tahun 2011				
			80%	Tahun 2012				
			100%	Tahun 2013				
	elayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	20%	Tahun 2009	100%	100%	100%	

BIDANG URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	REALISASI CAPAIAN			TARGET CAPAIAN TAHUN 2016
		INDIKATOR	NILAI		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	
			40%	Tahun 2010				
			60%	Tahun 2011				
			80%	Tahun 2012				
			100%	Tahun 2013				
	pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan	20%	Tahun 2009	100%	100%	100%	
		status kerusakannya						
			40%	Tahun 2010				
			60%	Tahun 2011				
			80%	Tahun 2012				
			100%	Tahun 2013				
	pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH	prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	20%	Tahun 2009	100%	100%	100%	
			40%	Tahun 2010				
			60%	Tahun 2011				
			80%	Tahun 2012				
			100%	Tahun 2013				
14.Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	Sumber Daya Air	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari	100%	Tahun 2014	60,00%	60,00%		
		Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	70%	Tahun 2014	50%	50%		
	Jalan	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	100%	Tahun 2014	85%	85%		
		Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	100%	Tahun 2014	60%	60%		
		Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.	60%	Tahun 2014	67%	67%		
		Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	60%	Tahun 2014	300%	300%		
		Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.	60%	2014	45%	45%		
	Air Minum	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari		2014	55%	55%	70%	100%

BIDANG URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	REALISASI CAPAIAN			TARGET CAPAIAN TAHUN 2016
		INDIKATOR	NILAI		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	
		Sangat buruk						
		Buruk						
		Sedang						
		Baik						
		Sangat baik						
	Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	60%	Tahun 2014	30%	30%	80%	90%
		Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	5%	Tahun 2014	11%	11%	10%	15%
		Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	20%	Tahun 2014	1,40%	1,40%	15%	30%
		Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan	70%	Tahun 2014	20%	20%	20%	30%
		Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50%	Tahun 2014	30%	30%	60%	100%
	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	10%	Tahun 2014	2,30%	2,30%	5%	10%
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kabupaten/kota	100%	Tahun 2014	57%	57%	100%	100%
		Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di kabupaten/kota	100%	Tahun 2014	100%	100%	100%	100%
	Jasa Konstruksi	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	100%	Tahun 2014	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100%	Tahun 2014			100%	100%
	Penataan Ruang	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	2014 (kabupaten dan kecamatan)	100%	100%		
			90%	2014 (kelurahan)	85%	85%		
		Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang	100%	Tahun 2014	35%	35%		
		Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota	100%	Tahun 2014 (kabupaten/kota)	85%	85%	100%	100%

BIDANG URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	REALISASI CAPAIAN			TARGET CAPAIAN TAHUN 2016
		INDIKATOR	NILAI		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	
		beserta rencana rincinya						
		Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%	2014 (kabupaten/kota dan kecamatan)	50%	50%	100%	100%
		Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	25%	Tahun 2014	25%	25%		
15. Urusan pemerintahan dalam negeri	Pelayanan Dokumen	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)					506.298	
	Kependudukan	Cakupan penerbitan akta kelahiran					12.274	
	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota			0,01	0,01	0,01	0,01
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota			-	75%	75%	85%
	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota						
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)						

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang kurang diantisipasi.

Salah satu Permasalahan pembangunan yang harus muncul dalam RPJMD Kabupaten Magetan adalah permasalahan pembangunan daerah atau isu pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi permasalahan dalam RPJPD Kabupaten Magetan, dimana RPJMD merupakan sarana untuk pencapaian pembangunan jangka panjang. Didalam RPJPD Kabupaten Magetan beberapa isu yang perlu diperhatikan tidaklah terlepas dari perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Magetan yaitu ““Terwujudnya kesejahteraan masyarakat magetan yang adil, mandiri dan bermartabat”, dari visi diatas periode 2013 -2018 diharapkan ‘Masyarakat Magetan’ dalam konteks Magetan cerdas (wasis) bisa bekerja dan mengembangkan ekonomi kabupatennya: Untuk hal ini tentu dipersyaratkan bahwa sesudah memiliki kecerdasan tertentu, masyarakat harus sehat jasmani+rohani (waras, wutuh), dan tentunya dapat mengantisipasi menghilangkan jeratan kemiskinan (wareg, widodo) memanfaatkan upaya interaksi antar kelompok masyarakat-antar bagian wilayah kabupaten dan jaringan kerjasama ekonomi kabupaten secara nasional dan internasional (waskita).

Permasalahan pembangunan jangka menengah Kabupaten Magetan tahun 2013-2018 yang masih harus dihadapi dan diatasi adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kualitas sarana dan prasarana peribadatan dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Belum optimalnya kinerja birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah;
3. Masih terbatasnya keterkaitan antar sektor ekonomi dan belum optimalnya iklim investasi dan usaha;

4. Masih relatif tingginya angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan rendahnya kualitas SDM tenaga kerja;
5. Rendahnya daya saing dan daya jual obyek dan daya tarik pariwisata;
6. Belum optimalnya produktivitas pertanian dalam arti luas, baik secara kuantitas, kualitas maupun kontinuitas;
7. Kurangnya kualitas ketersediaan infrastruktur daerah, desa-desa dan wilayah perbatasan untuk menunjang perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi, kejadian atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Isu-isu strategis yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018 adalah :

1. Menurunnya daya tampung maupun daya dukung lingkungan hidup sebagai dampak dari aktivitas ekonomi ditandai dengan terjadinya defisit sumber daya air.
2. Adanya konflik pemanfaatan ruang atau lahan yang menyebabkan perubahan fungsi lahan pertanian ke non pertanian atau kawasan lindung menjadi kawasan budidaya sehingga menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan.
3. Adanya Isu demokratisasi dan HAM yang kadangkala melebihi porsinya, dimana penghormatan terhadap hak-hak individu lebih ditonjolkan sehingga mengorbankan hak-hak masyarakat secara keseluruhan.
4. Pemberlakuan perdagangan bebas dimana produk-produk luar negeri bisa dengan mudah masuk dan hampir tanpa hambatan yang dapat berpotensi mengancam daya saing produk lokal.

STRATEGI

Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi yang dipilih untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya ketahanan moral dan mental masyarakat untuk membentengi diri dari krisis nilai sebagai akibat

dari dampak negatif perubahan dan pembangunan adalah melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan formal dan non formal serta tenaga pembimbing keagamaan, mengembangkan sarana dan prasarana peribadatan, pembinaan keagamaan terhadap aparatur pemerintah serta mengintegrasikan pengamalan ajaran agama di sekolah.

Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya toleransi umat beragama adalah mengembangkan komunikasi inter dan antar umat beragama.

2. Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah dan pelayanan publik, meningkatkan kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien serta meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya aparatur.

Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan adalah menyempurnakan sistem dan prosedur pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah dan berkualitas.

3. Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperhatikan kebijakan ekonomi regional, nasional dan global adalah mendorong pertumbuhan ekonomi sektor unggulan yang berwawasan lingkungan, mendorong tumbuhnya kluster-kluster ekonomi, Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya kegiatan investasi untuk mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal adalah memberikan kemudahan dalam berinvestasi serta mendorong tumbuhnya dan berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

4. Strategi untuk mencapai sasaran terwujudnya stabilitas pangan dan energi utama adalah menjamin ketersediaan stok dan kelancaran distribusi bahan pangan dan energi utama,

Strategi untuk mencapai sasaran menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka adalah memberdayakan masyarakat miskin dan PMKS, meningkatkan kualitas tenaga kerja dan jaminan ekonomi sosial tenaga kerja, meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja lokal serta memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa dalam rangka penguatan pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi desa.

Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan

pendidikan dan kesehatan secara merata dan berkualitas, meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan informasi, meningkatkan kualitas kehidupan perempuan, anak dan keluarga sejahtera, meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan, serta memajukan olah raga daerah melalui pembinaan secara sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan.

Strategi untuk mencapai sasaran berkembangnya budaya lokal multikultur yang dapat menjadi media perekat sosial adalah melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah dari berbagai etnik dan golongan untuk menjaga pluralisme namun tetap terjaga persatuan dan kesatuan.

Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang layak dan sehat adalah penataan ruang permukiman dan kawasan sesuai ketentuan zonasi, penyediaan sarana dan prasarana permukiman, mengendalikan pencemaran lingkungan serta meningkatkan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat.

Strategi untuk mencapai sasaran terwujudnya alam dan lingkungan hidup yang lestari adalah mengelola sumber daya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan, merehabilitasi lingkungan hidup yang mengalami penurunan kualitas serta mengarahkan dan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan.

5. Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi yang aman, nyaman dan memadai adalah menyediakan infrastruktur jalan, jembatan beserta pendukungnya yang layak yang dapat menghubungkan antar wilayah dan permukiman penduduk serta menjangkau sentra sentra-sentra produksi pertanian dan produk unggulan daerah lainnya

Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas, kuantitas dan jangkauan jaringan irigasi adalah Membangun jaringan irigasi yang handal dan dapat menjangkau daerah irigasi yang seluas-luasnya

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2015, disimpulkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.34
PERMASALAHAN DAN SOLUSI YANG DIHADAPI
DALAM PELAKSANAAN URUSAN WAJIB TAHUN 2015

URUSAN	PERMASALAHAN (ISU STRATEGIS) YANG DIHADAPI	RENCANA SOLUSI
URUSAN WAJIB		
1. Otonomi Daerah;	<ul style="list-style-type: none"> a. Banyak SKPD yang masih mengabaikan dokumen-dokumen pendukung dalam penentuan peringkat otoda ; b. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan belum mencerminkan hasil survey yang sesungguhnya; c. Koordinasi seluruh SKPD terhadap kepatuhan pemenuhan sasaran strategis di dalam RPJMD yang masih lemah, sehingga berdampak terhadap nilai akuntabilitas kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong SKPD agar memenuhi dokumen-dokumen pendukung yang ada dalam upaya peningkatan peringkat Otonomi Daerah b. Memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan survei kepuasan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan survei. c. Mengikutsertakan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun dan mengembangkan standar pelayanan publik. d. Meningkatkan intensitas koordinasi antar SKPD terkait dalam rangka meningkatkan sinkronisasi program pencapaian sasaran strategis daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD. e. Mengembangkan sistem pelayanan publik yang terstandarisasi dan menerapkan sistem informasi pelayanan public. f. Menyediakan dan mengelola sarana pengaduan masyarakat g. Mengembangkan sistem perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, akuntabel dan terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengawasan pelaksanaan pembangunan
2. Pendidikan;	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ditiadakannya criteria TK/ SD bertaraf internasional menjadi sekolah unggulan, sehingga peminat/ jumlah siswa semakin emnurut, padahal sarpras sudah mencukupi 2. Menurunnya jumlah siswa di beberapa sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> 1. dilaksanakan relokasi SDN unggulan 2, 3 dan 4 Magetan ke lokasi TK/ SD unggulan 2. diprogramkan regrouping sekolah
3. kesehatan;	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rasio tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat) dibanding jumlah penduduk masih di bawah standart 2. Peningkatan AKI sering disebabkan ketidakpatuhan tenaga kesehatan terhadap Standart Operating Prosedur (SOP) Antenatal Care dan Asuhan persalinan normal, kurangnya pendampingan ibu hamil resiko tinggi oleh nakes, serta keterlambatan penanganan di faskes rujukan. 	
4. pekerjaan umum dan penataan ruang;	<ul style="list-style-type: none"> a. Cakupan wilayah kegiatan yang luas yang tidak sebanding dengan jumlah personil, sarprasdan anggaran yang tersedia. b. Belum optimalnyakemampuan personal di bidang teknis kebinamargaan,keciptakaryaan dan teknis pengairan serta di bidang administrasi kegiatan agar menghasilkan kinerja yang tertata baik dalam administratif perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan. c. Cepatnya kerusakan jalan akibat aktivitas truk muatan berat (galian C) d. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pengaturan RTRW di Kabupaten Magetan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan sarana dan prasarana operasional sangat perlu. b. Hendaknya peningkatan ketrampilan dan kompetensi SDM selalu dilakukan untuk lebih mengoptimalkan kinerja, sehingga sasaran kegiatan dan indikator pencapaian sasaran bisa memenuhi harapan masyarakat. c. Monev kegiatan pertmbangan d. Sosialisasi Perda RTRW serta dalam hal pemberian ijin-ijin terkait, harus mengacu kepada dokumen RTRW yang telah ditetapkan
5. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan yang sehat dan bebas penyakit b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengajukan perinjinan IMB 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi tentang kesehatan lingkungan di lingkungan masyarakat b. Sosialisasi dan pelaksanaan pemberian IMB dipermudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

URUSAN	PERMASALAHAN (ISU STRATEGIS) YANG DIHADAPI	RENCANA SOLUSI
<p>6. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan</p>	<p>a. Adanya gangguan keamanan yang bersifat sporadic dan insidental.</p> <p>b. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana akibat terbatasnya sarana dan prasarana, keterampilan aparat serta peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan masyarakat terhadap proses penanganan bencana dan risiko bencana, sehingga masih rendah tingkat kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana</p> <p>d. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isu-isu keagamaan yang muncul ;</p> <p>e. Munculnya ormas-ormas keagamaan yang semakin banyak dan berpotensi menimbulkan konflik</p> <p>f. Semakin banyaknya ormas keagamaan yang ada, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan diantara masyarakat</p>	<p>a. Pengadaan Pendidikan dan Pelatihan aparat secara berjenjang dan terstruktur terkait materi kebencanaan.</p> <p>b. Pemenuhan kebutuhan standar sarana dan prasarana kebencanaan.</p> <p>c. Pemetaan Resiko Bencana.</p> <p>d. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang upaya tanggap lebih dini terhadap gangguan keamanan</p> <p>e. Melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan non formal dan tenaga pembimbing keagamaan ;</p> <p>f. Mengembangkan sarana dan prasarana peribadatan ;</p> <p>g. Mengintegrasikan pengamalan ajaran agama di sekolah.</p> <p>h. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat melalui pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)</p> <p>i. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat</p> <p>h. meningkatkan koordinasi antar pihak yang berwenang untuk mencegah tindak kriminal melalui kegiatan Komunitas Intelejen Daerah (Kominda), Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) dan sejenisnya</p> <p>i. Meningkatkan efektivitas peran dan fungsi forum kerukunan umat beragama (FKUB) ;</p> <p>j. Memberikan pembinaan kepada stake holder terkait, dengan harapan agar terjadi kesejukan dalam kehidupan beragama</p>
<p>7. Sosial</p>	<p>a. Belum tersedianya data yang akurat tentang jumlah dan sebaran penduduk miskin dan hampir miskin.</p> <p>b. Rentannya kondisi penduduk hampir miskin terkait dengan ketidakpastian kondisi makro ekonomi.</p> <p>c. Kontribusi pertumbuhan ekonomi sektor agraris yang tinggi tetapi nilai tambah yang masih rendah dan tingkat serapan tenaga kerja rendah sehingga mempengaruhi distribusi pendapatan perkapita penduduk.</p> <p>a. Belum tersedianya sarana dan prasarana lembaga kesejahteraan sosial yang memadai.</p> <p>b. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) belum semuanya menguasai IT dengan baik sehingga sering mengalami kesulitan apabila ada kegiatan mendesak yang menggunakan teknologi informasi.</p> <p>c. Semakin bertambahnya angka PMKS dan semakin kompleksnya permasalahan sosial namun belum dibarengi sarana prasarana dan fasilitas penanganan</p>	<p>a. Melaksanakan Program Perluasan Lapangan Kerja, Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Pengangguran di Pedesaan maupun Perkotaan, Pemberdayaan Kelompok Masyarakat, Pengembangan industri berbasis pada sektor agraris melalui agroindustri/agrobisnis.</p> <p>b. Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pengembangan UKM, Perluasan Kesempatan Berusaha dan Menumbuhkan Wira Usaha Baru (WUB) serta Peningkatan Daya Saing Industri yang Menyerap Tenaga Kerja.</p> <p>c. Melakukan survey secara berkala untuk memonitor kondisi dan perubahan masyarakat miskin di Kabupaten Magetan.</p> <p>d. Pelaksanaan kebijakan prioritas untuk mengatasi masalah kemiskinan yang meliputi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan serta Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.</p> <p>e. Mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang diikuti distribusi pendapatan yang lebih baik.</p> <p>f. Mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor bisnis yang padat karya dan ramah lingkungan</p>

URUSAN	PERMASALAHAN (ISU STRATEGIS) YANG DIHADAPI	RENCANA SOLUSI
8. tenaga kerja;	<p>d. Dibutuhkan lembaga / yayasan organisasi dan SDM kesejahteraan sosial yang dapat sebagai mitra dalam rangka penanganan PMKS dan berfungsi sebagai advokasi.</p> <p>a. Terbatasnya kesempatan kerja dibanding angkatan kerja</p> <p>b. Pengangguran muda terdidik terus meningkat dan cenderung pilih-pilih pekerjaan sesuai dengan keahliannya.</p> <p>c. Terbatasnya kemampuannya pengusaha untuk membayar upah sesuai dengan UMK.</p> <p>d. Masih rendahnya kesadaran pengusaha untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya menjadi anggota BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.</p>	
9. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;	<p>a. Rendahnya kesadaran masyarakat korban KDRT untuk melapor ke pihak berwenang</p>	
10. pangan;	<p>a. Masih dirasakan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi dibidang pangan;</p> <p>b. Pelaksanaan tugas dan fungsi Ketahanan Pangan kurang didukung oleh tenaga fungsional tingkat lapang yang cukup dan masih bergantung pada petugas dari Dinas/Instansi terkait lainnya;</p> <p>c. Masih adanya ego sektor antara dinas/instansi terkait sehingga menjadi penghalang dalam melakukan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan</p>	<p>a. Memanfaatkan SDM secara optimal melalui Training on Trainer (ToT) kepada petugas;</p> <p>b. Diharapkan adanya penambahan petugas fungsional Ketahanan Pangan untuk ditempatkan di tingkat Kecamatan sehingga dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk melakukan konsultasi dalam upaya untuk terus secara konsisten melakukan pembangunan Ketahanan Pangan dan mewujudkan Ketahanan Pangan sampai dengan Tingkat Rumah Tangga;</p> <p>c. Mengembangkan kerjasama antar instansi supaya terwujud harmonisasi dalam koordinasi pelaksanaan program/kegiatan</p>
11. pertanian;		
12. lingkungan hidup;	<p>a. Sumber Daya Manusia yang minim kualitas teknis lingkungan hidup yang memadai</p> <p>b. Dibutuhkan penataan TPA (Tempat pembuangan Akhir) sampah yang lebih optimal dan luasan TPA kurang memenuhi syarat minimal sehingga perlu ditingkatkan</p> <p>c. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan</p>	<p>a. Mengikutsertakan SDM untuk bintek tentang persampahan</p> <p>b. Pengadaan lahan TPA</p> <p>c. Pengadaan sarpras pengelolaan persampahan</p>
13. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;	<p>a. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan.</p> <p>b. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan secara umum masih kurang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas</p>	<p>a. mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan mengikut sertakan setiap diselenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan, sosialisasi dan lain-lain.</p> <p>b. Menerapkan kebijakan Pemerintah Pusat tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/326/SJ/2014 tentang Larangan Pungutan Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/327/SJ/2014 tentang Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara otomatis membatalkan kebijakan penarikan retribusi ini, sehingga masyarakat diberikan jaminan dan kemudahan proses pengurusan Akte Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan akte kependudukan lainnya.</p> <p>c. Menertibkan pengelolaan database kependudukan dan penyempurnaan sistem informasi kependudukan.</p> <p>d. Menyempurnakan sistem dan prosedur</p>

URUSAN	PERMASALAHAN (ISU STRATEGIS) YANG DIHADAPI	RENCANA SOLUSI
		pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah dan berkualitas
14. pemberdayaan masyarakat dan Desa;		
15. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;	a. Banyak calon peserta KB belum menjadi anggota BPJS sehingga banyak calon peserta KB (IUD, Implan, MOW, MOP) belum terlayani.	
16. perhubungan;	a. Kurangnya kesadaran bagi pemilik kendaraan wajib uji untuk mengujikan kendaraannya b. masih relatif rendah ketersediaan marka jalan	a. Penataan sistem dan intensifikasi pengendalian terhadap masyarakat yang wajib uji KIR b. Peningkatan penganggaran pengecatan marka jalan
17. komunikasi dan informatika;	a. Sampai dengan saat ini urusan komunikasi dan informatika masih ditangani oleh 3 (tiga) SKPD (Bidang Kominfo di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Bagian Humas di Sekretariat Daerah dan Subid. PDE di BAPPEDA) sehingga sering tumpang tindih tupoksi. b. Kemajuan pesat di bidang TIK menuntut pelaksanaan urusan pemerintahan berbasis elektronik (E-government)	a. Perlu dibentuk SKPD tersendiri yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika sehingga penerapan e-government di Pemerintah Kabupaten Magetan bisa lebih cepat untuk meningkatkan kinerja aparat dalam rangka maengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
18. koperasi, usaha kecil, dan menengah;	a. Masih rendahnya Pengetahuan dan ketrampilan usaha sebagian perajin; b. Masih terbatasnya penggunaan dan pemanfaatan serta peralatan teknologi tepat guna yang dimiliki sebagian perajin. c. Rendahnya daya saing produk UMKM d. Kurang mampu pengurusan perijinan dan Badan Hukum . e. Belum mempunyai jaminan kredit usaha f. Terbitnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) maka banyak koperasi baru yang tidak paham tentang perkoperasian.	a. Peningkatan SDM melalui program pembinaan dan pelatihan secara kontinyu; b. Modernisasi peralatan produksi IKM, melalui program pendampingan dan bantuan peralatan produksi, guna meningkatkan mutu produksi dan daya saing produk. c. Pelatihan dan penumbuhan motivasi pengusaha kecil/menengah dalam membenahan manajemen usaha sehingga lebih efisien dalam proses produksi dan melakukan inovasi produk sehingga lebih mampu bersaing dengan produk impor. d. Pengurusan ijin/badan hukum s/d notaris saja tidak sampai ke Kementrian hukum dan HAM. e. Mengesahkan sertifikasi Program massal/Surat Kuasa Pinjam pada sanak saudara sesuai paerjanjian. f. Dengan mengadakan BINTEK dan sosialisasi perkoperasian untuk koperasi baru.
19. kepemudaan dan olah raga;		
20. statistik;	a. Lambatnya perolehan data statistik, baik dari SKPD Pemkab maupun Masyarakat	a. Memberikan pembinaan kepada SKPD agar mendukung percepatan pemenuhan data statistik yang dibutuhkan.
21. persandian;		
22. kebudayaan;	a. masih rendahnya inisiasi dan swadaya masyarakat dalam menggali dan mengembangkan budaya lokalnya masing-masing, sehingga lebih banyak menunggu stimulasi dari pemerintah daerah	a. mengenalkan nilai dan kreativitas budaya lokal melalui dunia pendidikan dasar dan menengah, sehingga diharapkan akan tumbuh ide-ide budaya yang berasal dari nilai-nilai lokal yang dikembangkan oleh pelajar secara rutin dan massif
23. perpustakaan		
24. Kearsipan		

URUSAN	PERMASALAHAN (ISU STRATEGIS) YANG DIHADAPI	RENCANA SOLUSI
URUSAN PILIHAN		
1. Pariwisata	kurangnya lahan parkir di lokasi wisata, utamanya sarangan	Perlunya pengadaan tempat parkir baru
2. Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian yang cukup tinggi akan menyebabkan semakin menurunnya produksi komoditas pertanian. b. Tingginya fluktuasi harga produk pertanian menyebabkan petani seringkali merugi karena biaya produksi tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. c. Kurangnya tenaga PNS/THL yang kompeten dalam pemeliharaan jaringan irigasi yang ada, yang berfungsi sebagai fasilitator. d. Masih banyaknya sarana prasarana pertanian, terutama jalan produksi dan jaringan irigasi tersier yang kondisinya kurang baik. e. Adanya kecenderungan petani menanam tanaman dengan nilai ekonomis tinggi tanpa memperhatikan kesesuaian lahan dan azas konservasi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong masyarakat agar tetap memfungsikan lahan pertanian sebagaimana mestinya dengan harapan agar lahan pertanian tidak beralih fungsi ; b. Mendorong stake holder terkait agar tetap bisa menjaga hasil produksi panen, sehingga petani tidak dirugikan ; c. Fasilitas pemasaran melalui berbagai event pameran baik yang bersifat lokal, regional maupun internasional d. Mengusulkan perlu adanya rekrutmen PNS/tenaga kontrak pemelihara jaringan irigasi.
3. kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Usulan kegiatan terkait dengan bantuan bibit tanaman, pupuk dan alat-alat pengolahan hasil perkebunan secara kuantitas belum memenuhi kebutuhan masyarakat.. b. Kurangnya fasilitasi pemerintah terkait pemeliharaan dari tanaman yang ada. c. Penyebaran tanaman pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilaksanakan baik yang didanai APBD, APBN, CSR BUMN, serta swadaya masyarakat belum sepenuhnya ditanam pada lokasi sasaran terpilih yang merupakan areal lahan yang termasuk kategori dalam lahan dan kawasan potensial kritis sampai dengan kritis 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pembinaan secara intensif pada masyarakat/petani penghijauan untuk lebih meningkatkan swadaya dalam penyediaan bibit penghijauan dan penanaman pada lahan-lahan kritis luar kawasan hutan yang ada sesuai loaksi sasaran terpilih. b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak Perum Perhutani untuk lebih meningkatkan pelaksanaan reboisasi pada lahan dalam kawasan hutan dan lebih ditingkatkan kerja sama kemitraan dengan masyarakat melalui sistem pola PHBM. c. Mengusulkan program/kegiatan pembibitan tanaman kehutanan/produktif yang didanai oleh APBD Kabupaten Magetan dan pihak swasta melalui program CSR
4. energi dan sumber daya mineral	-	-
5. perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana prasarana/ fisik di lingkungan pasar tradisional yang belum memadai, sehingga barang dagangan terkesan kurang bersih yang mengakibatkan kurang berminatnya masyarakat untuk berbelanja ke pasar. b. Pelaku pasar / pedagang belum bisa menjaga lingkungan tempat berdagang. c. Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap kualitas dan mutu produk berstandar yang berakibat kerugian pada konsumen. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengusulkan rehabilitasi pasar b. Melaksanakan pembinaan kepada pedagang terkait kebersihan pasar dan pengelolaan sampah c. Melaksanakan pengawasan barang dan jasa terkait mamin
6. perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> 1. SDM pelaku usaha masih rendah sehingga masih sulit untuk mengembangkan produk. 2. Peralatan dan Teknologi yang dipergunakan masih sederhana, sehingga kualitas produk kurang bersaing di pasar luar daerah. 3. Belum adanya standarisasi produk sehingga sulit bersaing dengan daerah lain. 4. Belum terciptanya mainset industri berwawasan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlu adanya pembinaan dan pelatihan secara kontinyu untuk pengembangan desain produk sesuai pasar b. Perlu fasilitasi teknologi bagi IKM agar hasil produksinya bisa bersaing dalam hal kualitas dan kuantitas di pasar bebas c. Perlunya adanya pembinaan dan pelatihan terkait dengan standarisasi produk sehingga produk yang dihasilkan IKM sesuai standar /SNI d. Bagi IKM perlu arahan dan binaan bahwa

URUSAN	PERMASALAHAN (ISU STRATEGIS) YANG DIHADAPI	RENCANA SOLUSI
--------	--------------------------------------------	----------------

7. transmigrasi

a. Pembagian quota transmigrasi sangat tergantung dengan pemerintah pusat dan provinsi.

a. Pemantapan koordinasi pengajuan penambahan kuota transmigrasi kepada Provinsi dan Pusat.

produk yang dihasilkan harus berwawasan lingkungan

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Salah satu bagian terpenting dari sebuah perencanaan pembangunan suatu daerah adalah gambaran tentang kerangka kemampuan ekonomi daerah untuk membiayai rencana program dan kegiatan. Dengan adanya gambaran tersebut maka suatu daerah diharapkan bisa mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik Perekonomian Daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian berikut karakteristiknya serta prospek perekonomian Tahun 2016 – 2017.

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJMD 2013-2018. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Magetan Tahun 2017 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2017. Arah pembangunan perekonomian diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, juga pada sektor yang memiliki prospek ke depan yang baik serta tahan terhadap gejolak ekonomi.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2013-2018 arah kebijakan ekonomi daerah diprioritaskan pada arah kebijakan pembangunan tahun 2017 yang merupakan tahun keempat dari perodesasi RPJMD Kab. Magetan tahun 2013 – 2018 adalah “mendorong produk olahan pertanian dengan meningkatkan kapasitas UKM dan koperasi untuk mendatangkan investasi regional dan nasional”. Indikasi capaian dalam arah kebijakan ini adalah meningkatnya Industri Kecil Menengah (IKM).

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016

Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan kondisi perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga BBM dan nilai tukar mata uang. Indikator ekonomi daerah yang digunakan dalam analisis makro ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),

Struktur Ekonomi Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, Laju Inflasi, Tenaga Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magetan Tahun 2015 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Tahun 2014 mencapai 10,297 triliun, dan tahun 2015 sebesar Rp. 10,827 triliun atau terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15 %. Hal ini terinci dalam tabel berikut :

**TABEL 3.1
NILAI PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2014 – 2015**

Sektor	Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)		Laju Pertumbuhan
	2014	2015	2015 (%)
PRIMER			
1. Pertanian	3.278.700,0	3.388.323,0	3,34
2. Pertambangan dan pengalihan	166.163,0	170.388,4	2,54
SEKUNDER			
3. Industri Pengolahan	1.003.981,8	1.057.042,3	5,29
4. Pengadaan Listrik dan Gas	6.907,6	6.809,8	-1,42
5. Air Bersih	24.400,5	25.358,6	3,93
6. Konstruksi	819.750,6	852.908,8	4,04
TERSIER			
7. Perdagangan Besar dan Eceran	1.527.098,3	1.632.557,6	6,91
8. Transportasi dan Pergudangan	144.829,0	156.281,6	7,91
9. Jasa Keuangan dan Asuransi	264.278,3	283.860,3	7,41
10. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	415.213,2	447.684,8	7,82
11. Informasi dan Komunikasi	771.782,5	837.717,1	8,54
12. Real Estate	150.562,3	158.337,3	5,16
13. Jasa Perusahaan	34.757,3	36.843,0	6,00
14. Administrasi Pemerintahan	828.707,5	858.292,3	3,57
15. Jasa Pendidikan	423.471,5	450.392,4	6,36
16. Jasa Kesehatan dan Sosial	86.543,6	93.889,3	8,49
17. Jasa – jasa lainnya	349.598,0	370.032,3	5,85
PDRB	10.296.744,9	10.826.718,9	5,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Magetan 2016; (SNA 2010)

Selama tahun 2015 semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan, kecuali sektor pengadaan listrik dan gas. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor informasi dan komunikasi yang mencapai 8,54 persen, diikuti oleh jasa kesehatan dan sosial sebesar 8,49 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 7,91 persen, penyediaan akomodasi dan amakn minum sebesar 7,82 persen, sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 7,41 persen.

b. Struktur Ekonomi Daerah

Perekonomian Kabupaten yang diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 tumbuh sebesar 5,15%. Tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa-jasa menjadi penyumbang terbesar perekonomian di Kabupaten Magetan.

Sebagai penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Magetan, sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 138.836 orang atau sebesar persen dari total penduduk yang bekerja. Dengan serapan tenaga kerja yang cukup besar, serta didukung luas lahan pertanian yang mencapai 65,53 persen dari total wilayah, maka cukup wajar apabila perekonomian Kabupaten Magetan saat ini lebih bercorak agraris.

TABEL 3.2
STRUKTUR PEREKONOMIAN KAB. MAGETAN

Sektor	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
PRIMER	36,03	36,40	35,96
1. Pertanian	34,44	34,76	34,36
2. Pertambangan dan penggalian	1,59	1,64	1,60
SEKUNDER	17,61	17,72	17,69
3. Industri Pengolahan	9,58	9,61	9,63
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,04
5. Air Bersih	0,21	0,19	0,19
6. Konstruksi	7,77	7,88	7,83
TERSIER	46,36	45,87	46,35
7. Perdagangan Besar dan Eceran	14,18	13,92	14,21
8. Transportasi dan Pergudangan	1,24	1,32	1,37
9. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,51	2,59	2,65
10. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,88	4,06	4,19
11. Informasi dan Komunikasi	6,48	6,28	6,33
12. Real Estate	1,39	1,37	1,39
13. Jasa Perusahaan	0,32	0,33	0,33
14. Administrasi Pemerintahan	8,48	7,90	7,70
15. Jasa Pendidikan	4,08	4,16	4,13
16. Jasa Kesehatan dan Sosial	0,78	0,83	0,84
17. Jasa – jasa lainnya	3,14	3,14	3,22
PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan 2016; (SNA 2010)

c. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketersediaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, modal teknologi, kebijakan pemerintah dan tentunya situasi keamanan wilayah.

Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Magetan tahun 2013 – 2015 mengalami pelambatan. Pertumbuhan ekonomi dalam periode tersebut mengalami penurunan dari 5,82 persen pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 5,18 persen pada tahun 2014, kemudian turun lagi menjadi 5,15 persen pada tahun 2015.

Sektor dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahun yang cukup tinggi adalah sektor jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh sebesar 9,85% disusul sektor jasa transportasi dan pergudangan sebesar 9,79%. Sedangkan sektor pertanian, meski penyumbang terbesar PDRB, namun pertumbuhannya sangat kecil. Secara rinci pertumbuhan ekonomi Magetan per sektor tahun 2013 – 2015 sebagaimana tabel di bawah ini.

TABEL 3.3
PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT SEKTOR
TAHUN 2010- 2014

Sektor	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
PRIMER					
1. Pertanian	4,41	4,42	3,18	3,37	3,34
2. Pertambangan dan penggalian	2,37	0,98	1,46	3,01	2,54
SEKUNDER					
3. Industri Pengolahan	4,96	4,43	5,94	5,48	5,28
4. Pengadaan Listrik dan Gas	10,52	10,39	6,06	4,73	-1,42
5. Air Bersih	4,87	4,72	4,23	2,65	3,93
6. Konstruksi	5,49	6,30	6,26	6,73	4,04
TERSIER					
7. Perdagangan Besar dan Eceran	8,09	8,47	8,61	6,24	6,91
8. Transportasi dan Pergudangan	5,92	6,84	10,46	11,00	7,91
9. Jasa Keuangan dan Asuransi	11,05	11,77	13,90	8,24	7,41
10. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,34	8,01	9,08	8,56	7,82
11. Informasi dan Komunikasi	11,05	13,21	12,17	8,11	8,54
12. Real Estate	5,18	6,64	7,44	7,23	5,16
13. Jasa Perusahaan	5,23	4,43	6,41	9,40	6,00
14. Administrasi Pemerintahan	3,49	1,57	1,33	0,47	3,57
15. Jasa Pendidikan	2,38	5,60	6,54	6,63	6,36
16. Jasa Kesehatan dan Sosial	11,62	7,09	7,06	10,73	8,49
17. Jasa – jasa lainnya	5,48	4,08	6,88	7,44	5,85
PDRB	5,64	5,79	5,82	5,18	5,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan 2016; (SNA 2010)

Sejak tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan terus mengalami penurunan dari 5,82% di tahun 2013 menjadi 5,11% di tahun 2015. Penurunan ini seiring dengan pelemahan ekonomi nasional yang juga mengalami tren penurunan pertumbuhan ekonomi. Namun melihat kondisi terakhir, dimana perekonomian sudah mulai pulih, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan tahun 2016 diharapkan mampu mencapai 5,2%. Sedangkan apada tahun 2017 ditargetkan mencapai 5,3%.

d. Inflasi

Laju inflasi menunjukkan perkembangan harga konsumen atau mencerminkan kestabilan nilai tukar rupiah. Perkembangan inflasi di Kabupaten Magetan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Magetan selalu berusaha menjaga agar laju inflasi senantiasa terkendali. Selama lima tahun terakhir perekonomian Kabupaten Magetan cukup stabil sehingga laju perkembangan di tingkat produsen cukup terkendali. Meskipun harga BBM berubah sesuai mekanisme pasar, pemerintah masih mampu mengendalikan gejolak harga sehingga laju inflasi tidak mencapai angka dua digit. Inflasi di Kabupaten Magetan adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.37
NILAI INFLASI RATA-RATA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2011 - 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata pertumbuhan
Inflasi	5,56	4,35	4,91	6,08	4,89	5,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan tahun 2015; (SNA 2010)

e. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang digunakan sebagai parameter untuk mengukur perkembangan kesejahteraan masyarakat. Angka PDRB perkapita sebenarnya belum bisa menggambarkan secara riil pendapatan yang diterima masing-masing penduduk. Namun demikian PDRB perkapita masih cukup relevan untuk mengetahui apakah secara rata-rata pendapatan masyarakat mengalami peningkatan atau tidak. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 3.5
KOMPOSISI PENDAPATAN PERKAPITA BERDASARKAN PDRB AHK DAN ADHB

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	9.230.973,49	10.190.344,88	11.312.549,26	12.621.779,08	13.921.025,30
2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	8.744.764,67	9.251.243,03	10.296.744,90	10.296.744,90	10.826.718,92
3. Jumlah Penduduk (Hasil Proyeksi SP 2010)	622.902	624.373	626.614	626.614	627.413
4. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	14.819.303,01	16.320.924,97	20.142.829,69	20.142.829,69	22.187.977,13
5. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan	14.038.748,75	14.816.853,12	16.432.356,91	16.432.356,91	17.256.127,82

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan 2016; (SNA 2010)

f. Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Magetan pada tahun 2015 sebanyak 331.493 jiwa. Dalam kurun waktu 2011 – 2015 angka kesempatan kerja di Kabupaten Magetan selalu mengalami penurunan, yaitu dari 96,74 persen pada tahun 2011 menjadi 93,95 persen pada tahun 2015. Ini artinya dalam kurun waktu tersebut telah terjadi kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,16 persen pada tahun 2011 menjadi 6,05 persen pada tahun 2015.

g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia/ masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

IPM Kabupaten Magetan berdasarkan perhitungan standart tahun 2010 selama periode lima tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu dari 68,52 pada tahun 2010 menjadi 71,39 pada tahun 2015. IPM yang dibentuk atas 4 komponen yakni Angka Harapan Hidup, Harapan lama Sekolah, Rata-rata Lama sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita ini mengalami peningkatan cukup berarti.

TABEL 3.6
REALISASI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN MAGETAN

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1. Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,71	71,79	71,87	71,91	72,01
2. Harapan lama Sekolah (Tahun)	12,42	12,54	12,57	12,77	13,60
3. Rata2 Lama Sekolah (Tahun)	7,23	7,33	7,43	7,55	7,65
4. Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	9.635	10.375	10.484	10.539	10.594
IPM Kab. Magetan	68,52	69,56	69,86	70,29	71,39

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Magetan tahun 2016; (SNA 2010)

Dari hasil perhitungan angka IPM se Provinsi Jawa Timur, IPM Kabupaten Magetan termasuk dalam kabupaten/kota yang mempunyai IPM diatas angka IPM Provinsi Jawa Tmur. Dalam dua tahun terakhir peringkat IPM Kabupaten Magetan menempati posisi ke 12 dan 11 dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur.

TABEL
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MAGETAN DAN JAWA TIMUR TAHUN 2011 – 2015

No	Tahun	Magetan	Jawa Timur	Peringkat Magetan Di Jatim
1.	2011	68,52	66,06	12
2.	2012	69,56	66,74	11
3.	2013	69,86	67,55	12
4.	2014	70,29	68,14	12
5.	2015	71,39	68,95	11

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan tahun 2016; (SNA 2010)

h. Investasi

Investasi memegang peranan penting dalam perekonomian suatu daerah namun demikian sampai dengan saat ini di Kabupaten Magetan belum ada investasi yang berasal dari PMDN maupun PMA yang ada baru investasi yang bersifat lokal.

TABEL 3.7
PERKEMBANGAN INVESTASI KAB. MAGETAN

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	Nilai investasi non PMDN/ PMA (Juta Rupiah)	132.276.167	120.472.175	148.916	190.078

Berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Magetan pada tahun sebelumnya dan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian regional Jawa Timur dan Nasional serta Global, maka perekonomian Magetan selama tahun 2016 diperkirakan mampu bertumbuh secara dinamis.

Kondisi perekonomian Kabupaten Magetan pada Tahun 2016 diprediksi sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,15 – 5,20 %
2. Laju inflasi dapat ditekan dibawah 5 %.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai 14.229.514 Juta Rupiah
4. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010 sebesar 11.406.307 Juta Rupiah
5. Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 22.869.184

3.2 Analisis Kebijakan Keuangan Daerah

Analisis kondisi ekonomi daerah digunakan sebagai salah satu input utama untuk membuat analisis keuangan daerah. Dalam RPJMD Kab.

Magetan tahun 2013 – 2018 memuat proyeksi kemampuan APBD Kab. Magetan tiap tahun, meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Proyeksi kemampuan APBD dalam RPJMD dijadikan dasar analisis keuangan daerah, terutama analisis kemampuan keuangan daerah tahun direncanakan. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun rencana dapat diketahui.

Penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana.

Evaluasi penghitungan keuangan daerah dilakukan untuk mengetahui amanat dari RPJMD dalam menentukan kapasitas keuangan daerah serta hasilnya. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana dasar-dasar perhitungan dilakukan untuk tahun rencana. Evaluasi dilakukan dengan mempelajari dokumen RPJMD pada bagian kerangka pendanaan/ penghitungan kapasitas keuangan daerah. Pemahaman atas perhitungan kapasitas keuangan daerah ini menjadi dasar penentuan dan perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana.

Kondisi keuangan daerah selama periode RPJMD Kab. Magetan, tersaji dalam tabel berikut :

KONDISI KAPASITAS KEUANGAN DAERAH TERHADAP KERANGKA PENDANAAN RPJMD

No.	Uraian	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018
		RPJMD	APBD	RPJMD	APBD	RPJMD	APBD	RPJMD	RKPD	RPJMD
I	PENDAPATAN DAERAH	1.340.179.611.736	1.404.596.654.930	1.409.442.105.436	1.544.927.313.562	1.503.698.019.504	1.778.605.341.363	1.610.404.707.621	1.769.705.971.815	1.729.450.309.489
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	112.758.800.000	116.500.000.000	115.836.911.000	164.564.899.426	116.151.843.630	145.800.000.000	117.578.012.066	139.177.856.500	119.037.642.186
1	Pajak daerah	25.218.000.000	26.658.622.496,88	31.428.000.000	33.753.964.990	31.535.000.000	33.085.000.000	32.115.000.000	33.725.000.000	32.720.000.000
2	Retribusi daerah	20.468.922.000	17.470.017.000	17.493.263.000	20.017.394.985	17.668.195.630	16.162.175.500	17.844.877.586	17.290.523.500	18.023.326.362
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.868.701.000	2.886.343.503,12	2.868.701.000	2.334.748.993	2.868.701.000	2.033.151.125	2.897.388.010	1.960.000.000	2.926.361.890
4	Lain-lain PAD yang sah	64.203.177.000	69.485.017.000	64.046.947.000	108.458.790.458	64.079.947.000	94.519.673.375	64.720.746.470	86.202.333.000	65.367.953.934
B	DANA PERIMBANGAN	945.285.802.979	943.078.153.448	1.029.294.462.679	985.585.834.300	1.122.755.980.408	1.089.106.637.331	1.225.468.970.625	1.403.729.284.260	1.338.357.633.785
1	Bagi Hasil Pajak/bukan pajak	46.234.225.979	44.026.576.448	46.234.225.979	49.911.643.300	46.696.568.238	59.008.831.331	47.163.533.920	69.080.218.000	47.635.169.259
3	Dana Alokasi Umum	840.086.597.000	840.086.597.000	924.095.256.700	856.278.521.000	1.016.504.782.370	916.052.436.000	1.118.155.260.607	934.373.484.720	1.229.970.786.668
4	Dana Alokasi Khusus									
	- Dak fisik	58.964.980.000	58.964.980.000	58.964.980.000	79.395.670.000	59.554.629.800	114.045.370.000	60.150.176.098	102.455.037.500	60.751.677.858
	- DAK non-fisik								297.820.544.040	
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	282.135.008.757	345.018.501.482	264.310.731.757	394.776.579.836	264.790.195.466	543.698.704.032	267.357.724.930	226.798.831.055	272.055.033.518
1	Dana bagi hasil pajak dari propinsi	47.946.370.973	57.589.672.129	47.946.370.973	78.068.418.884	48.425.834.682	63.418.964.162	48.910.093.029	87.045.724.055	49.399.193.959
2	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	208.327.111.784	259.561.087.000	208.327.111.784	282.090.755.000	208.327.111.784	472.770.250.870	210.410.382.901	132.243.618.000	214.618.590.559
3	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	25.824.277.000	25.824.277.000	8.000.000.000	20.842.063.000	8.000.000.000	1.472.240.000	8.000.000.000	1.472.240.000	8.000.000.000
4	Pendapatan lainnya	37.249.000	37.249.000	37.249.000	651.782.000	37.249.000	37.249.000	37.249.000	37.249.000	37.249.000
5	Bagi hasil dari Pemerintah Pusat	0	6.216.353	0	9.176.560.952	0	4.000.000.000	0	4.000.000.000	0
6	Hibah	0	2.000.000.000	0	3.947.000.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0
II	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	24.401.796.117	149.220.642.799,15	25.094.421.054	236.769.986.663	26.036.980.195	101.544.463.757	27.104.047.076	56.011.000.000	43.294.503.095
1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	13.401.796.117	136.670.642.799,15	14.094.421.054	223.224.008.481	15.036.980.195	87.094.463.757	16.104.047.076	40.000.000.000	17.294.503.095
2	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	11.000.000.000	12.550.000.000,00	11.000.000.000	13.545.978.182	11.000.000.000	14.450.000.000	11.000.000.000	16.011.000.000	11.000.000.000
3	Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000.000
Total Kapasitas Daerah		1.364.581.407.853	1.553.817.297.729,15	1.409.479.354.436	1.781.697.300.225	1.503.735.268.504	1.880.149.805.120	1.610.441.956.621	1.799.516.971.815	1.729.487.558.489

No.	Uraian	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018
		RPJMD	APBD	RPJMD	APBD	RPJMD	APBD	RPJMD	RKPD	RPJMD
III	BELANJA TIDAK LANGSUNG	853.306.722.931	1.008.881.601.192,15	957.417.099.026	1.198.428.938.813,96	1.011.541.680.981	1.286.456.828.698	1.071.719.202.881	1.248.032.991.540	1.163.426.613.654
1	Gaji dan tunjangan	594.307.575.782	597.517.477.029	635.909.106.086	642.658.422.122,96	680.422.742.512	674.280.961.979	728.052.334.487	677.009.308.203	779.015.997.901
2	Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.827.000.000	3.827.000.000	4.000.000.000	3.827.000.000	4.250.000.000	3.827.000.000	4.350.000.000	3.827.000.000	4.500.000.000
3	Insentif pemungutan pajak daerah	1.260.900.000	2.648.485.000	1.571.400.000	1.610.050.000	1.576.750.000	1.654.250.000	1.605.750.000	1.686.250.000	1.636.000.000
	Biaya pemungutan pajak daerah				300.000.000		300.000.000		300.000.000	
4	Insentif pemungutan retribusi daerah	1.023.446.100	1.408.694.440	874.663.150	1.195.876.555	883.409.781	1.080.404.925	892.243.879	864.526.175	901.166.318
5	Tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD	208.327.111.784	296.413.975.473	208.327.111.784	349.295.936.870	208.327.111.784	346.487.635.370	210.410.382.901	292.751.746.540	214.618.590.559
6	Belanja bantuan kepada partai politik	858.048.111	908.529.696	858.048.111	1.009.492.866	900.000.000	1.009.492.866	950.000.000	1.009.492.866	1.000.000.000
7	Alokasi Dana Desa	26.370.000.000	26.320.000.000	100.876.769.895	97.294.055.400	110.181.666.904	97.506.126.779	120.458.491.614	105.446.922.622	131.754.858.876
	Dana Desa	0	0	0	56.708.716.000	0	127.243.618.000	0	127.243.618.000	0
	Bantuan Keuangan Kepada Desa	0	36.401.609.212	0	8.146.624.000	0	4.025.213.779	0	4.350.000.000	0
8	Tunjangan perangkat desa	13.278.000.000	11.425.704.188	0	0	0	0	0	0	0
9	Belanja Hibah		27.991.750.000	0	32.790.765.000	0	24.022.125.000	0	33.042.000.000	0
	Hibah kepada KPU	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000.000	25.000.000.000
10	Belanja tak terduga	4.054.641.154	4.018.376.154,15	5.000.000.000	3.550.000.000	5.000.000.000	3.900.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000
11	Belanja lainnya	0	0	0	42.000.000	0	1.120.000.000	0	6.081.620.000	0
IV	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	18.500.000.000	7.500.000.000	25.285.000.000	14.500.000.000	17.460.000.000	10.000.000.000	26.200.000.000	2.500.000.000
	Penyertaan modal	0	2.000.000.000	7.500.000.000	4.617.000.000	7.000.000.000	2.260.000.000	2.500.000.000	6.000.000.000	2.500.000.000
	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	10.000.000.000	7.500.000.000	0	7.500.000.000	5.000.000.000	0
	Pemberian Pinjaman Daerah	0	16.500.000.000	0	10.668.000.000		15.200.000.000		15.200.000.000	
Jumlah pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama		853.306.722.931	1.027.381.601.192,15	964.917.099.026	1.223.713.938.813,96	1.026.041.680.981	1.303.916.828.698	1.081.719.202.881	1.284.312.484.406	1.165.926.613.654

KONDISI KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH TERHADAP KERANGKA PENDANAAN RPJMD

Uraian	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018
	RPJMD	APBD	RPJMD	APBD	RPJMD	APBD	RPJMD	RKPD	RPJMD
Total kapasitas daerah	1.340.179.611.736	1.404.596.654.930	1.409.442.105.436	1.544.927.313.562	1.503.698.019.504	1.778.605.341.363	1.610.404.707.621	1.769.705.971.815	1.729.450.309.489
Dikurangi pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama	853.306.722.931,00	1.027.381.601.192,15	964.917.099.025,50	1.223.713.938.813,96	1.026.041.680.980,70	1.303.916.828.698	1.081.719.202.881	1.284.312.484.406	1.165.926.613.653,60
- Belanja tidak langsung	853.306.722.931,00	1.008.881.601.192,15	957.417.099.026	1.198.428.938.813,96	1.011.541.680.981	1.286.456.828.698	1.071.719.202.881	1.248.032.991.540	1.163.426.613.654
- Pengeluaran pembiayaan	0	18.500.000.000	7.500.000.000	25.285.000.000	14.500.000.000	17.460.000.000	10.000.000.000	26.200.000.000	2.500.000.000
Kapasitas riil keuangan daerah	486.872.888.805	377.215.053.737,85	444.525.006.410,50	321.213.374.748,04	477.656.338.523,30	474.688.512.665,00	528.685.504.740	485.393.487.409	563.523.695.835,40

Dari data kondisi keuangan daerah dalam perodesasi RPJMD diatas, diperoleh hasil evaluasi capaian keuangan daerah sebagai berikut :

CAPAIAN KEUANGAN DAERAH DIBANDING PROYEKSI DALAM RPJMD

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	Ket.
I	PENDAPATAN DAERAH	105%	110%	118%	110%	
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	103%	142%	126%	118%	
1	Pajak daerah	106%	107%	105%	105%	
2	Retribusi daerah	85%	114%	91%	97%	
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	101%	81%	71%	68%	
4	Lain-lain PAD yang sah	108%	169%	148%	133%	
B	DANA PERIMBANGAN	100%	96%	97%	115%	
1	Bagi Hasil Pajak/bukan pajak	95%	108%	126%	146%	
3	Dana Alokasi Umum	100%	93%	90%	84%	
4	Dana Alokasi Khusus					
	- Dak fisik	100%	135%	191%	170%	
	- DAK non-fisik			Over Target	Over Target	
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	122%	149%	205%	85%	
1	Dana bagi hasil pajak dari propinsi	120%	163%	131%	178%	
2	Dana penyesuaian dan otsus	125%	135%	227%	63%	
3	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	100%	261%	18%	18%	
4	Pendapatan lainnya	100%	1750%	100%	100%	
5	Bagi hasil dari Pemerintah Pusat	Over Target	Over Target	Over Target	Over Target	
6	Hibah	Over Target	Over Target	Over Target	Over Target	
II	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	612%	944%	390%	207%	
1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	1020%	1584%	579%	248%	
2	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	114%	123%	131%	146%	
3	Pencairan dana cadangan	0%	0%	0%	0%	
Total Kapasitas Daerah		114%	126%	125%	112%	
III	BELANJA TIDAK LANGSUNG	118%	125%	127%	116%	
1	Gaji dan tunjangan	101%	101%	99%	93%	
2	Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	100%	96%	90%	88%	
3	Insentif pemungutan pajak daerah	210%	102%	105%	105%	
	Biaya pemungutan pajak daerah	Over Proyeksi	Over Proyeksi	Over Proyeksi	Over Proyeksi	
4	Insentif pemungutan retribusi daerah	138%	137%	122%	97%	
5	Tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD	142%	168%	166%	139%	
6	Belanja bantuan kepada parpol	106%	118%	112%	106%	
7	Alokasi Dana Desa	100%	96%	88%	88%	
	Dana Desa	Over Proyeksi	Over Proyeksi	Over Proyeksi	Over Proyeksi	
	Bantuan Keuangan Kepada Desa	Over Proyeksi	Over Proyeksi	Over Proyeksi	Over Proyeksi	
8	Tunjangan perangkat desa	86%	100%	100%	100%	
9	Belanja Hibah	Over Proyeksi	Over Proyeksi	Over Proyeksi	Over Proyeksi	
	Hibah kepada KPU	100%	100%	100%	Over Proyeksi	
10	Belanja tak terduga	99%	71%	78%	80%	
11	Belanja lainnya	Over Proyeksi	Over Proyeksi	Over Proyeksi	Over Proyeksi	
IV	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Over Proyeksi	337%	120%	262%	
	Penyertaan modal	Over Proyeksi	62%	32%	240%	
	Pembentukan dana cadangan	100%	Over Proyeksi	0%	67%	
	Pemberian Pinjaman Daerah	Over Proyeksi	Over Proyeksi	Over Proyeksi	Over Proyeksi	
Jumlah pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama		120%	127%	127%	119%	

CAPAIAN KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH DIBANDING PROYEKSI DALAM RPJMD

No	Uraian	APBD 2014	APBD 2015	APBD 2016	RKPD 2017	Keterangan
1	Total kapasitas daerah	105%	110%	118%	110%	
2	Dikurangi pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama	120%	127%	127%	119%	
	- Belanja tidak langsung	118%	125%	127%	116%	
	- Pengeluaran pembiayaan	over proyeksi	337%	120%	262%	
Kapasitas riil keuangan daerah		77%	72%	99%	92%	

Secara umum, capaian pendapatan daerah dan kemampuan kapasitas riil keuangan daerah terus mengalami peningkatan, dan selalu diatas target yang ditetapkan dalam RPJMD, dengan pelampauan rata-rata sekitar 10%. Pendapatan dan struktur kapasitas keuangan daerah sangat dipengaruhi perkembangan aturan Perundang-undangan, sehingga banyak mengalami penyesuaian. Namun yang paling utama adalah kemampuan kapasitas riil keuangan daerah untuk belanja pembangunan terus meningkat, sehingga dapat dilaksanakan percepatan-percepatan pembangunan dalam rangka pencapaian target kinerja RPJMD, dan mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kab. Magetan.

3.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 2016 dan Tahun 2017

Berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Magetan pada tahun sebelumnya dan dengan mempertimbangkan perekonomian regional Jawa Timur dan Nasional, maka perekonomian Magetan selama tahun 2016 diperkirakan mampu bertumbuh dengan baik.

Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Magetan di tahun 2016 dan tahun 2017 tentunya tidak terlepas dari perekonomian nasional yang masih akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pengelolaan arus modal (*capital inflow*) dan nilai tukar (*exchange rate*) dimana harga - harga komoditas terus berubah cenderung merangkak naik.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2016 mencapai 4,92 persen secara *year on year*. Capaian ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2015 yang mencapai 5,04 persen. Lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2016 ini terutama disebabkan oleh terbatasnya pertumbuhan konsumsi pemerintah dan investasi. Pelemahan konsumsi pemerintah dipengaruhi pola musiman belanja pemerintah di awal tahun yang masih relatif terbatas. Sedangkan perilaku investor swasta masih cenderung menunggu kebijakan

pemerintah yang berupaya untuk mempercepat proyek-proyek infrastruktur pemerintah, sehingga kegiatan investasi masih lemahnya.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga juga diperkirakan membaik, seiring dengan terjaganya inflasi dan meningkatnya ekspektasi pendapatan. Konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2016 tumbuh 4,94 persen. Meskipun belum kembali ke tren di atas 5,0 persen, konsumsi rumah tangga menunjukkan pertumbuhan, baik secara tahunan maupun jika dibandingkan triwulan IV 2015, yang tumbuh 0,17 persen. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor secara keseluruhan mengalami perbaikan, meskipun masih mengalami fase kontraksi. Di triwulan I 2016, komponen ekspor berkontraksi 3,88 persen, dan impor 4,24 persen, seiring dengan pelambatan ekonomi di negara tujuan ekspor, penurunan harga komoditas, perlemahan permintaan domestik dan depresiasi rupiah.

Berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2016 tersebut, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 akan meningkat. Peningkatan perekonomian nasional tentunya juga berdampak pada perekonomian Kabupaten Magetan. Beberapa tantangan dan prospek yang dihadapi antara lain :

1. Kondisi perekonomian global

Kondisi perekonomian global yang mengalami pelambatan sejak 2013 pada tahun 2016 mulai pulih, meski masih terbatas. Bank Dunia (World Bank) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2016 sebesar 2,9%, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun lalu 2,4%, seiring dengan pemulihan ekonomi di negara-negara maju. Namun, laju perekonomian yang melambat di negara berkembang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia. Laju pertumbuhan di negara berkembang diperkirakan sebesar 4,8% pada 2016, lebih rendah dari harapan, namun lebih baik dari 4,3% saat pasca krisis tahun lalu. Membaiknya ekonomi negara-negara maju tahun ini akan berdampak baik bagi Indonesia, di mana sektor perdagangan Indonesia melalui ekspor impor akan pulih dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang positif.

2. Inflasi

Inflasi berperan cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tergerus oleh inflasi yang tinggi. Laju inflasi pada Maret 2016 di angka 0,19 persen, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi indeks harga konsumen pada Februari 2015 lalu yang mengalami deflasi 0,09 persen. Dengan realisasi tersebut maka inflasi tahun kalender mencapai 0,62 persen. Realisasi

inflasi pada Maret 2016 tergolong cukup terkendali. Tren deflasi ini diperkirakan akan berlanjut pada bulan depan, bahkan hingga Mei 2016. Pada April 2016 diperkirakan laju Indeks Harga Konsumen (IHK) bakal rendah sehingga mendorong terjadinya deflasi, yang diperkirakan sebesar 0,30%. Sedangkan prediksi inflasi tahunan turun menjadi 3,76 persen dari realisasi sebelumnya 4,45 persen. Prediksi deflasi ini dikontribusi dari penurunan Indeks Harga Konsumen dari harga barang yang diatur pemerintah (*administer prices*), seperti menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diikuti turunnya tarif transportasi dan tarif tenaga listrik merespons rendahnya harga minyak dunia. Di saat yang bersamaan, terjadi penurunan harga sebagian besar komoditas pangan akibat faktor musiman panen raya yang biasanya terjadi di April setiap tahunnya.

Penurunan inflasi ini disebabkan juga oleh apresiasi atau penguatan nilai tukar rupiah serta susutnya harga emas. Harga minyak dunia Setelah mengalami tren penurunan yang cukup lama, harga minyak dunia mulai naik. Kenaikan harga minyak ini disebabkan stok minyak olahan (dislitasi) mengalami penurunan cukup tajam dan tak terduga. Penurunan stok tersebut membuat pelaku pasar yakin bahwa surplus minyak mentah bisa berkurang.

3. Nilai tukar rupiah

Setelah sempat menyentuh angka hingga Rp. 17.000 per \$ 1, nilai tukar rupiah mulai menguat dan mulai stabil. Harga komoditas yang membaik serta dollar index yang melemah berhasil mendorong penguatan rupiah. Penguatan nilai rupiah akan mendorong gairah usaha kecil menengah, terutama bagi UMKM yang sebagian bahan bakunya impor. Membaiknya nilai tukar rupiah juga berdampak pada membaiknya daya beli masyarakat.

4. Investasi

Investasi menjadi salah satu roda penggerak perekonomian daerah sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu meningkatkan realisasi investasi merupakan upaya yang wajib dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerahnya. Namun demikian, investasi di Kabupaten Magetan belum berkembang dengan baik, ditandai realisasi investasi yang baru berskala lokal. Pada tahun 2015 realisasi investasi di Kabupaten Magetan mencapai lebih dari Rp. 190 milyar yang terdiri dari 456 investor lokal.

Sedangkan perkembangan realisasi investasi pada tribulan I tahun 2016 mencapai Rp. 73,6 milyar rupiah yang terdiri dari 132 investor lokal.

5. Meningkatnya angka kemiskinan

Sejak tahun 2013 angka kemiskinan di Kabupaten Magetan naik dari 11,45% di tahun 2012 menjadi 12,14% di tahun 2013. Sedangkan pada akhir tahun 2014 angka kemiskinan turun menjadi 11,8%. Masih besarnya angka kemiskinan ini merupakan permasalahan yang cukup serius bagi daerah untuk meningkatkan perekonomiannya.

6. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka

Selain angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka juga cenderung naik. Pada akhir tahun 2014 angka pengangguran terbuka di Kabupaten Magetan sebesar 4,28%, naik dari 3,02% di tahun 2013. Pelemahan perekonomian global yang juga dialami Indonesia telah menyebabkan pemutusan hubungan kerja. Disisi lain jumlah angkatan kerja meningkat, sehingga angka pengangguran terbuka ini diprediksi masih akan tetap tinggi.

Sedangkan prospek perekonomian daerah tahun 2016 dan 2017 yang dimiliki Kabupaten Magetan yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi

Sejak tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan terus mengalami penurunan dari 5,82% di tahun 2013 menjadi 5,11% di tahun 2015. Penurunan ini seiring dengan pelemahan ekonomi nasional yang juga mengalami tren penurunan pertumbuhan ekonomi. Namun melihat kondisi terakhir, dimana perekonomian sudah mulai pulih, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan tahun 2016 diharapkan mampu mencapai 5,2%. Sedangkan apada tahun 2017 ditargetkan mencapai 5,3%

2. Laju Inflasi

Karena Kabupaten Magetan bukan termasuk kabupaten/kota yang dilakukan survey harga konsumen oleh Badan Pusat Statistik, maka inflasi di Kabupaten Magetan diperkirakan sama dengan Kabupaten/Kota terdekat yaitu Kota Madiun. Secara umum Kota Madiun selama tahun 2015 mengalami sepuluh kali inflasi dan dua kali deflasi. Inflasi tertinggi di Kota Madiun terjadi pada bulan Juli sebesar 0,83 persen dan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 0,08 persen, sedangkan deflasi terjadi pada bulan Januari dan Februari masing-masing sebesar 0,05 persen dan 0,51 persen. Secara kumulatif, selama tahun 2015 inflasi tahun kalender

Kota Madiun mencapai 2,75 persen. Inflasi tahun kalender tahun 2015 merupakan laju inflasi terendah selama lima tahun terakhir, dimana inflasi tahun kalender tahun 2014 mencapai 7,40 persen, inflasi tahun kalender tahun 2013 sebesar 7,52 persen, inflasi tahun kalender tahun 2012 sebesar 3,51 persen, dan inflasi tahun kalender tahun 2011 sebesar 3,49 persen.

Berdasarkan tren inflasi kota Madiun selama tahun 2015 maupun tren inflasi secara nasional yang terjadi beberapa bulan terakhir, diperkirakan pada tahun 2016 dan 2017 inflasi di Kabupaten Magetan juga tidak terlalu tinggi dan diharapkan berada dibawah 5%.

3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Magetan telah menerapkan pola pengelolaan keuangan berbasis kinerja. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan berfungsi optimal bila penyelenggaraan urusan pemerintahan didukung dengan sumber-sumber penerimaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan. Analisis keuangan daerah pada prinsipnya dimanfaatkan untuk memberi gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Menganalisa pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan serta struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu sebelum penentuan arah Kebijakan Umum Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Magetan melalui RKPD maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi : a) Pendapatan Daerah; b) Belanja Daerah; c) Pembiayaan Daerah. Dari struktur APBD tersebut untuk dapat menilai kinerja pelaksanaan APBD dilakukan dengan menganalisa dari masing-masing susunan/struktur APBD dimaksud.

Menyadari akan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil, maka Pemerintah Kabupaten Magetan telah mengoptimalkan penerapan pola intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. Demikian pula terhadap sumber-sumber pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat telah dimanfaatkan sebagai motorisator pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah. Kebijakan keuangan diarahkan pada :

- a. Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan anggaran melalui peningkatan penerimaan daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah, dengan harapan penurunan defisit anggaran secara bertahap.
- b. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan sumber-sumber penerimaan daerah yang syah lainnya;
- c. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah ditempuh melalui mempertajam pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran.

3.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dimaksud dapat dikelompokkan atas :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah cermin pembiayaan pembangunan daerah, sejalan dengan tuntutan otonomi daerah dimana semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

Peningkatan penerimaan Pendapatan daerah diperlukan kebijakan yang dilandasi atas pengamatan dan pemikiran yang matang dan terukur serta mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat terhadap struktur dan kondisi masyarakat sebagai pelaku (kontributor / wajib pajak / wajib retribusi).

Sumber Pendapatan atau Penerimaan Daerah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi :
 - Pajak daerah,
 - Retribusi daerah,

- Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan
- Lain-lain PAD yang sah.

Arah kebijakan pendapatan asli daerah pada tahun 2017 difokuskan pada :

A. Sinkronisasi peraturan perundang – undangan

1. Penyempurnaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, utamanya Pajak Bumi Dan Bangunan dan Pajak Mineral Bukan Logam.
2. Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan pendapatan lainnya, merupakan alur/ tata cara Pemungutan, Penyetoran, Pembukuan dan Pengendalian melalui Penyempurnaan dan Pengembangan aplikasi dengan Informasi Tehnologi (IT).

B. Intensifikasi

1. Peningkatan sumberdaya aparatur pemungut pada Dinas Pendapatan Daerah dalam pemenuhan standart pelayanan, melalui diklat, bimtek maupun kursus manajemen pemungutan.
2. Optimalisasi pemungutan potensi yang sudah ada dan memaksimalkan penerapan tarif yang berlaku.
3. Konsolidasi dan validasi data potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai indikator perhitungan perencanaan pendapatan pada SKPD penghasil.
4. Konsolidasi dan Sosialisasi Pajak Daerah, utamanya Pajak Bumi dan Bangunan sampai ke tingkat Wajib Pajak
5. Evaluasi dan koordinasi yang intensif dan efektif kepada wajib pajak dan SKPD penghasil secara regular serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemungutan.

2) Dana Perimbangan

- Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2017 untuk sementara diproyeksikan sebesar perolehan tahun anggaran 2016 ditambah kenaikan 2% dengan memperhatikan kemungkinan kenaikan gaji dan tunjangan PNSD.
- Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik diproyeksikan sama dengan perolehan tahun anggaran 2016, termasuk penyesuaian rekening Tunjangan Profesi guru PNSD pindah

ke rekening DAK non-fisik dari sebelumnya masuk rekening dana Penyesuaian otonomi khusus.

- Untuk pendapatan dana bagi hasil pajak/ bukan pajak mengacu peraturan menteri keuangan tentang perkiraan alokasi dana bagi hasil pajak/ bukan pajak ke daerah tahun anggaran 2016.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

- Pendapatan hibah dialokasikan sama dengan peolehan tahun 2016
- Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi untuk sementara mengacu pada pagu tahun anggaran 2016 karena belum ada penetapan perolehannya dari Provinsi.
- Dana Penyesuaian otonomi khusus, terdiri dari Dana Desa meski ada kecenderungan meningkat, namun untuk sementara mengacu pada Perpres Nomor 36 tahun 2015 dan apabila nantinya ada perubahan akan disesuaikan dengan pagu definitif yang tercantum dalam peraturan dari pemerintah pusat. Dana Insentif Daerah sementara dialokasikan sama dengan peolehan tahun 2016. Sedang dana Tunjangan Profesi guru PNSD pindah ke rekening DAK non-fisik, dan tambahan tambahan penghasilan guru belum dialokasikan.
- Pajak Rokok, untuk sementara juga mengacu pada pagu tahun anggaran 2016 karena belum ada penetapan perolehannya dari pusat, selain itu juga mempertimbangkan realisasi pajak rokok tahun sebelumnya yang ditransfer di bulan Oktober dan Desember 2015.
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, sementara mengalokasikan sama dengan anggaran tahun 2016 untuk bantuan keuangan Provinsi yang rutin setiap tahun diberikan, sedangkan Bantuan keuangan untuk pembangunan belum dialokasikan, karena belum ada keputusan dari Gubernur Jatim.

3.4.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Sesuai dengan kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektif yang diarahkan kepada layanan sosial dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum berwawasan lingkungan serta hak kedudukan hukum, HAM dan politik.

Intruksi Presiden Republik Indonesia, bahwa penyusunan anggaran untuk belanja daerah tahun 2017 tidak semata-mata mengacu pada *money follow function*, tetapi harus sudah bergeser dengan lebih mengedepankan pendekatan *money follow program priority*, artinya fokus anggaran harus diarahkan pada program/ kegiatan yang prioritas, jelas sasaran, manfaat dan kontribusi terhadap pembangunan daerah, sedangkan fungsi yang kurang prioritas, anggarannya harus seminimal mungkin.

Perencanaan pembangunan dan anggaran harus dilaksanakan berdasar pendekatan secara holistik-tematik, integratif dan spasial. Holistik-tematik artinya, program yang disusun harus menitikberatkan pada keseluruhan sebagai satu kesatuan dan saling keterkaitan satu sama lain untuk memecahkan satu pokok permasalahan (tema). Integratif artinya program harus terkoordinasi lintas SKPD terkait, saling menunjang dan mendukung, tidak tumpang tindih, tidak bekerja parsial atau sendiri-sendiri (tidak ego-sektoral) agar tujuan suatu program/ kegiatan dapat tercapai sesuai tujuan pembangunan. Spasial yang artinya pembangunan dilaksanakan dengan berdasar pada daya dukung sumber daya dan ruang/ wilayah.

Dalam menentukan arah kebijakan belanja daerah, Pemerintah kabupaten Magetan melakukan sinkronisasi pendekatan antara proses perencanaan *Top down dan bottom up*. Proses *top down* dilakukan melalui penerjemahan visi misi Bupati dan penyelarasan program kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan program prioritas yang sudah tertuang dalam dokumen RPMJD dan Renstra masing-masing SKPD. Dengan kata lain, setiap program dan kegiatan yang masuk dalam daftar belanja RKPD harus memiliki daya dukung atau kontribusi terhadap pencapaian visi misi bupati dan/atau target-target indikator kinerja RPJMD. Juga diselaraskan dengan program prioritas dri Nasional dan regional sebagai upaya harmonisasi pembangunan antar tingkat pemerintahan.

Sedangkan proses *bottom up* diperoleh melalui sinkronisasi usulan pada saat Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten yang telah diselenggarakan sebelumnya. Pada saat Musrenbang kecamatan juga sudah

diberikan kebijakan bahwa usulan hasil Musrenbang setiap kecamatan akan diakomodir setidaknya-tidaknya 500 juta setiap kecamatan dan dilaksanakan oleh SKPD.

Selain pendekatan *Bottom up* dan *top down* tersebut, program dan kegiatan dalam belanja daerah juga disinergikan dengan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai rangkaian proses perencanaan politik.

Jika memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Struktur APBD akan berbeda, namun karena peraturan pelaksana yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut sampai dengan saat ini belum terbit, maka Struktur APBD masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur belanja Kabupaten Magetan untuk tahun anggaran 2017 dikelompokkan menjadi:

1) Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

belanja wajib yang harus dianggarkan sebelum menganggarkan untuk program/ kegiatan lainnya, yaitu belanja gaji dan tunjangan bagi PNSD.

b. Belanja Hibah

- Pengalokasian belanja hibah dalam rangka penganggaran belanja wajib mengikat, seperti Bantuan Keuangan dari provinsi, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari pemerintah pusat, serta Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT).
- Pengalokasian belanja hibah dilaksanakan secara cermat dan selektif, utamanya bagi organisasi maupun kelompok masyarakat sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, dan atau dalam rangka menunjang capaian kinerja Pemerintah daerah.

c. Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran belanja bantuan sosial diperuntukkan bagi kelompok/anggota masyarakat, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pemberian bantuan sosial

tersebut mempertimbangkan kriteria selektif, tidak terus menerus dan kejelasan peruntukan/ penggunaannya

d. Belanja Bantuan Keuangan

- Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Kabupaten Magetan kepada Pemerintah Desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk peningkatan kemampuan keuangan desa, sedangkan bantuan keuangan bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya serta dalam rangka akselerasi pembangunan desa.
- Sebagaimana dimaksud pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dalam APBD dialokasikan dana kepada desa antara lain berupa alokasi dana desa (ADD), Dana Desa dan Dana Bagi Hasil pajak dan retribusi daerah.
- Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2014, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

e. Belanja Tidak Terduga.

Penganggaran belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, antara lain untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan lain sebagainya, dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kegiatan yang sifatnya mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, serta untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

- 2) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja SKPD yang bersangkutan seperti: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Belanja Langsung dimaksud lebih difokuskan untuk pembangunan daerah dalam rangka mendukung perwujudan masyarakat Magetan yang sejahtera sesuai visi dan misi serta program prioritas pembangunan.

3.4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari :

- 1) Penerimaan pembiayaan yang mencakup : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA), hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah.
- 2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup : penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pemberian pinjaman daerah serta antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan surplus atau defisit anggaran.

Surplus Anggaran terjadi bilamana anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal surplus anggaran penggunaannya diprioritaskan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau penanaman penyertaan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Defisit Anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah yang berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit anggaran oleh Menteri Keuangan. Dalam hal anggaran defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Secara lengkap realisasi dan proyeksi kemampuan APBD Kab. Magetan tahun anggaran 2017, dari sisi Pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai berikut :

No	Uraian	APBD Tahun 2015 (un-audited)	APBD Tahun 2016	Proyeksi/Target Tahun 2017	Keterangan
1.1	Pendapatan Asli Daerah	164.564.899.426,00	145.800.000.000,00	142.146.099.500,00	
1.1.1	Pajak daerah	33.753.964.990,08	33.085.000.000,00	33.725.000.000,00	

No	Uraian	APBD Tahun 2015 (un-audited)	APBD Tahun 2016	Proyeksi/Target Tahun 2017	Keterangan
1.1.2	Retribusi daerah	20.017.394.985,00	16.162.175.500,00	18.654.196.500,00	
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.334.748.993,12	2.033.151.125,00	1.960.000.000,00	
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	108.458.790.458,10	94.519.673.375,00	87.806.903.000,00	
1.2	Dana Perimbangan	985.585.834.300,00	1.089.106.637.331,00	1.415.319.616.760,00	
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	49.911.643.300,00	59.008.831.331,00	69.080.218.000,00	Realisasi 2015 = 76%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	856.278.521.000,00	916.052.436.000,00	37.844.181.000,00	Asumsi naik 2 %
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) - DAK Fisik - DAK Non Fisik	79.395.670.000,00	114.045.370.000,00	31.236.037.000,00 934.373.484.720,00 411.865.914.040,00	Perpres 137 th 2015 Rincian APBN 2016 TPG dan lainnya
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	394.776.579.836,00	543.698.704.032,00	297.326.411.055,00	
1.3.1	Hibah	3.947.000.000,00	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	78.068.418.884,00	63.418.964.162,00	74.068.418.884,00	
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	282.090.755.000,00	472.770.250.870,00	87.045.724.055,00	TPG pindah kode rekening DAK
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	20.842.063.000,00	1.472.240.000,00	132.243.618.000,00	
1.3.6	Sumbangan dari pihak ketiga	651.782.000,00	37.249.000,00	70.999.820.000,00	
1.3.7	Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat	9.176.560.952,00	4.000.000.000,00	37.249.000,00	Kurang bayar
Jumlah Pendapatan		1.544.927.313.562,30	1.778.605.341.363,00	1.854.792.127.315,00	
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.046.120.780.674,00	1.286.456.828.698,00	1.288.257.771.315,00	
2.1.1	Belanja Pegawai	857.168.658.159,00	1.013.645.660.503,00	999.347.750.527,00	
2.1.2	Belanja Bunga	0	0	0,00	
2.1.4	Belanja Hibah	22.727.405.000,00	19.167.405.000,00	42.542.000.000,00	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.427.620.000,00	4.252.600.000,00	5.011.620.000,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	161.667.121.915,00	245.491.163.195,00	237.356.400.788,00	
2.1.8	Belanja Tak Terduga	129.975.600,00	3.900.000.000,00	4.000.000.000,00	
2.1.9	Belanja Tanggap Darurat	0	0	0	
2.1.10	Belanja Aneka Kejadian	0	0	0	
2.2	Belanja Langsung	542.801.103.151,29	571.542.814.539,40	581.105.356.000,00	
2.2.1	Belanja Pegawai	24.508.825.975,21	31.843.837.700,00		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	278.634.821.968,79	280.716.130.151,40		
2.2.3	Belanja Modal	239.657.455.207,29	258.982.846.688,00		
Jumlah Belanja		1.588.921.883.825,29	1.857.999.643.237,40	1.869.363.127.315,00	
	Surplus / (Defisit)	(43.994.570.262,99)	(84.084.463.756,84)	(14.571.000.000,00)	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	236.769.986.662,84	101.544.463.756,84	36.011.000.000,00	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	223.224.008.480,84	87.094.463.756,84	20.000.000.000,00	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	13.545.978.182,00	14.450.000.000,00	16.011.000.000,00	

No	Uraian	APBD Tahun 2015 (un-audited)	APBD Tahun 2016	Proyeksi/Target Tahun 2017	Keterangan
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	25.285.000.000,00	17.460.000.000,00	21.440.000.000,00	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000		0,00	
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	4.617.000.000,00	2.260.000.000,00	6.240.000.000,00	
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	0	0	0	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	10.668.000.000,00	15.200.000.000,00	15.200.000.000,00	
	Jumlah Pembiayaan Netto	211.484.986.662,84	84.084.463.756,84	14.571.000.000,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan		0	0	0	

Ket. : Realisasi anggaran tahun 2015 masih bersifat asumsi (sementara), dan bersifat un-audited dari BPK

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Arah kebijakan umum, prioritas dan sasaran pembangunan daerah harus harus mencerminkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah dengan memperhitungkan semua potensi, peluang dan kendala serta ancaman yang mungkin timbul. Visi Pemerintah Kabupaten Magetan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2013 – 2018 yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

”TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MAGETAN YANG ADIL, MANDIRI DAN BERMARTABAT”

Untuk mewujudkan visi tersebut, akan didukung oleh berbagai misi dan program kegiatan yang sangat relevan, paling tidak ada 5 (lima) misi yang telah ditetapkan :

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Mewujudkan pemerintahan yang baik, dan peningkatan SDM yang profesional, dilandasi semangat pelaksanaan otonomi daerah;
3. Menggairahkan perekonomian daerah, melalui berbagai program pengungkit, dan optimalisasi pengembangan sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah; dan
5. Mewujudkan suasana aman dan damai, melalui penegakan, kepastian dan perlindungan hukum.

Dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut sasaran yang hendak dicapai adalah Kesejahteraan masyarakat yang komprehensif diukur dari dimensi 6 W.

- *Wareg*

Wareg mengandung makna tercukupinya kebutuhan pangan, sandang dan papan, bukan hanya cukup dalam artian jumlah, namun dalam artian kualitas.

- *Waras*

Waras dimaknai dalam artian luas yakni sehat jasmani dan rohani, bebas dari penyakit dan cacat serta terciptanya kondisi psikologis masyarakat yang kondusif di tengah perubahan tata nilai sosial dan budaya yang dituntut lebih kompetitif dalam menjalani kehidupannya.

- *Wasis*
Wasis dipahami sebagai terpenuhinya kebutuhan pendidikan baik formal maupun informal dalam rangka peningkatan SDM di masa depan.
- *Wutuh*
Wutuh dimaknai terciptanya keseimbangan jasmani dan rohani yang meliputi aspek sosial, mental dan spiritual.
- *Widodo*
Widodo dimaknai sebagai tujuan akhir dari kehidupan manusia di dunia, yakni selamat di dunia dan akhirat dimana pemahaman ini menempatkan bahwa kehidupan di dunia hanyalah sebagai tujuan antara untuk mencari bekal bagi kehidupan yang kekal diwaktu nanti yang sekaligus dijadikan sebagai mekanisme pengendalian diri dari sifat tamak, rakus dan menghalalkan segala cara.
- *Waskita*
Dimaknai sebagai kemampuan pemimpin dan masyarakat untuk melihat atau memandang jauh ke depan (visioner).

Pembangunan daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 berdasarkan acuan yang ada dalam RPJMD periode tahun keempat dan memperhatikan usulan yang telah melalui pembahasan dalam forum musrenbang yang melibatkan berbagai pihak, yang kemudian diselaraskan dengan program dari SKPD untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Penyusunan prioritas pembangunan ini juga tetap mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional, mengacu pada kondisi umum daerah Kabupaten Magetan, regional, propinsi maupun nasional yang dihadapi, termasuk adanya masalah mendesak yang perlu segera diatasi, serta penyesuaian dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki terutama sumberdaya finansial.

4.1. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah

Kebijakan umum menggambarkan hubungan antara arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja yang dipilih. Secara umum, kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Memprioritaskan program unggulan yang merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah;
2. Melaksanakan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;

3. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan kerjasama antar daerah baik skala nasional maupun internasional dalam rangka mengembangkan potensi dan kekayaan lokal;
5. Melaksanakan semaksimal mungkin program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal, operasional, serta program-program yang bersifat mengikat seperti dukungan terhadap pencapaian target pembangunan nasional;
6. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan kab. Magetan tahun 2017, kebijakan penentuan pagu anggaran sudah bergeser dari sebelumnya berdasarkan *money follow function* menjadi *money follow program priority*, artinya fokus anggaran harus diarahkan pada program kegiatan yang jelas sasaran, manfaat dan kontribusi terhadap pembangunan daerah, sedangkan fungsi yang kurang prioritas, anggarannya harus seminimalisir mungkin.

Perencanaan pembangunan harus dilaksanakan berdasar pendekatan secara holistik-tematik, integratif dan spasial. Holistik-tematik artinya, program yang disusun harus menitikberatkan pada keseluruhan sebagai satu kesatuan dan saling keterkaitan satu sama lain untuk memecahkan satu pokok permasalahan (tema), integratif artinya program harus terkoordinasi lintas SKPD terkait, saling menunjang dan mendukung, tidak tumpang tindih, tidak bekerja parsial atau sendiri-sendiri (tidak ego-sektoral) agar tujuan suatu program / kegiatan dapat tercapai sesuai tujuan pembangunan, serta spasial yang artinya pembangunan dilaksanakan dengan berdasar pada daya dukung sumber daya dan ruang/ wilayah.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan tahun 2017 yang merupakan tahun keempat dari perodesasi RPJMD Kab. Magetan tahun 2013 - 2018 adalah “mendorong produk olahan pertanian dengan meningkatkan kapasitas UKM dan koperasi untuk mendatangkan investasi regional dan nasional”. Indikasi capaian dalam arah kebijakan ini adalah meningkatnya Industri Kecil Menengah (IKM). Fokus prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah :

1. Meningkatkan kapasitas IKM/UKM dan koperasi melalui pembinaan kelembagaan, proses produksi, permodalan dan pemasaran.
2. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan pencari kerja melalui bimbingan dan pelatihan kerja dan kerjasama dengan BUMD/BUMN maupun perusahaan swasta dengan sistem magang
3. Standarisasi tenaga kerja terutama di bidang pariwisata, kesehatan, dan pertukangan melalui fasilitasi perolehan sertifikat tenaga kerja dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar bersama ASEAN.
4. Peningkatan mutu, kualitas dan daya saing produk unggulan melalui fasilitasi perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
5. Peningkatan kualitas pasar daerah dan pasar desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah dan desa.
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur pada pusat-pusat perdagangan dan industri.
7. Mendorong tumbuhnya investasi skala lokal maupun nasional melalui kebijakan pelayanan perijinan dan insentif pajak dan retribusi.
8. Mengembangkan skema pembiayaan yang terjangkau bagi IKM/UKM
9. Mengembangkan jaringan pemasaran UKM/IKM melalui fasilitasi promosi dan kerjasama dengan BUMD/BUMN maupun swasta.

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Keterkaitan Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kab. Magetan tahun 2013 – 2018 dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

TABEL 4.1
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
RPJMD KAB. MAGETAN TAHUN 2013 – 2018

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
VISI : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Magetan yang adil, mandiri dan bermartabat			
Misi 1 : Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan Bermasyarakat			
1. Membentuk SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Meningkatnya ketahanan moral dan mental masyarakat untuk membentengi diri dari krisis nilai sebagai akibat dari dampak negatif perubahan dan pembangunan <u>Indikator sasaran :</u> - Berkembangnya jumlah rumah ibadah - Meningkatkan kegiatan keagamaan	Mengembangkan penerapan nilai-nilai ibadah dan keagamaan dalam semua aspek kehidupan	<u>Urusan sosial :</u> 1. Melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan non formal dan tenaga pembimbing keagamaan 2. Mengembangkan sarana dan prasarana peribadatan 3. Melakukan pembinaan keagamaan terhadap aparat pemerintah daerah <u>Urusan pendidikan :</u> Mengintegrasikan pengamalan ajaran agama di sekolah
2. Mewujudkan kerukunan antar umat beragama sehingga dapat hidup berdampingan secara harmonis	Meningkatnya toleransi intern dan antar umat beragama <u>Indikator sasaran :</u> Jumlah penyelesaian konflik umat beragama.	Mengembangkan komunikasi inter dan antar umat beragama	<u>Urusan kesbang politik:</u> Mengembangkan budaya toleransi melalui fasilitasi dialog, sarasehan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang baik dan peningkatan SDM yang profesional dilandasi semangat pelaksanaan otonomi daerah			
Mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif	<u>Sasaran :</u> Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. <u>Indikator sasaran:</u> - Peringkat kinerja otoda - Indeks Kepuasan Masyarakat - Opini BPK - Hasil Evaluasi LAKIP	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah dan pelayanan publik 3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya aparatur	<u>Urusan otoda :</u> Melaksanakan Melaksanakan pengkajian SOTK dalam rangka penataan dan penguatan kelembagaan <u>Urusan otoda :</u> 1. Melaksanakan Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel 2. Mengembangkan sistem pelayanan publik yang terstandarisasi dan menerapkan sistem informasi pelayanan publik 3. Menyediakan dan mengelola sarana pengaduan masyarakat <u>Urusan perencanaan pembangunan</u> 4. Mengembangkan sistem perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, akuntabel dan terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengawasan pelaksanaan pembangunan 5. Memantapkan pelaksanaan e-government <u>Jurusan statistik dan kearsipan</u> 6. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dan data statistic <u>Urusan otoda :</u> 1. Melaksanakan Mengembangkan mekanisme penataan SDM aparatur melalui pelaksanaan proses rekrutmen, promosi, mutasi dan sistem reward dan punishment berdasarkan prinsip good governance 2. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur melalui diklat struktural, teknis fungsional maupun tugas belajar.
	<u>Sasaran :</u> Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan <u>Indikator sasaran :</u> - rasio penduduk ber KTP, KK, akta kelahiran	Menyempurnakan sistem dan prosedur pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah dan berkualitas	<u>Urusan kependudukan dan catatan sipil :</u> 1. Menertibkan pengelolaan database kependudukan dan penyempurnaan sistem informasi kependudukan 2. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan 3. Melaksanakan sosialisasi kependudukan 4. Melaksanakan sertifikasi standar pelayanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 3 : Menggairahkan perekonomian daerah melalui berbagai program pengungkit dan optimalisasi pengembangan SDM dan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan			
Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat	<u>Sasaran :</u> Meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperhatikan kebijakan ekonomi regional, nasional dan global <u>Indikator sasaran</u> Pertumbuhan ekonomi	1. Mendorong pertumbuhan ekonomi sektor unggulan yang berwawasan lingkungan	<u>Urusan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan</u> 1. Mengembangkan usaha pertanian terpadu berbasis agrobisnis <u>Urusan pariwisata :</u> 2. Menguatkan sektor pariwisata yang didukung sektor pertanian berwawasan lingkungan.
		2. Mendorong tumbuhnya kluster-kluster ekonomi	<u>Urusan perencanaan pembangunan :</u> 1. Menyusun rencana tata ruang yang selaras dengan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah dengan mengarusutamakan green economy <u>Urusan perdagangan</u> 2. Mengembangkan pusat-pusat perdagangan dengan mengutamakan pedagang tradisional <u>Urusan industri :</u> 3. Mengembangkan industri yang mengarah kepada pengolahan hasil pertanian dan produk unggulan lainnya
	<u>Sasaran :</u> Meningkatnya kegiatan investasi untuk mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal <u>Indikator sasaran :</u> Jumlah realisasi investasi, Jumlah KUMKM	1. Memberikan fasilitas dan kemudahan dalam berinvestasi.	<u>Urusan otoda :</u> Menyempurnakan produk hukum dan sistem perijinan investasi yang mudah, murah, cepat dan berkualitas untuk menarik investor lokal maupun nasional <u>Urusan penanaman modal :</u> Memfasilitasi kerjasama antar daerah dan swasta dalam kontak-kontak dagang dan investasi
		2. Mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	<u>Urusan koperasi dan UKM :</u> Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha UMKM dan koperasi, baik pembinaan kelembagaan, manajemen, akses permodalan maupun fasilitasi pemasaran.
	<u>Sasaran :</u> Terwujudnya stabilitas pangan dan energi utama. <u>Indikator sasaran :</u> Prosentase Penguatan cadangan pangan, ketersediaan energi dan protein perkapita, skor pola pangan harapan	Menjamin ketersediaan stok dan kelancaran distribusi bahan pangan dan energi utama	<u>Urusan ketahanan pangan :</u> 1. Melakukan pemantauan stok dan distribusi pangan serta menyediakan stok komoditas dan kebutuhan pokok 2. Melakukan upaya pengendalian inflasi terhadap harga kebutuhan pokok
			<u>Urusan energi dan sumber daya mineral :</u> Melakukan pembinaan, pemantauan stok dan distribusi energi utama dan mendorong pengembangan energi alternatif terbarukan untuk mendukung ketahanan energi
	<u>Sasaran :</u> Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka	1. Memberdayakan masyarakat miskin dan PMKS	<u>Urusan sosial :</u> 1. Mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan dan PMKS
	<u>Indikator sasaran :</u> Angka kemiskinan, Tingkat pengangguran terbuka.	2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memberikan jaminan ekonomi dan sosial tenaga kerja.	<u>Urusan sosial</u> 1. Melakukan pembinaan tenaga kerja melalui pendidikan latihan kerja serta menyediakan sarana dan prasarana latihan kerja.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			2. Melakukan pembinaan terhadap perusahaan dalam mematuhi ketentuan UMK dan keselamatan kerja.
		2. meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja lokal.	<p><u>Urusan tenaga kerja</u> Memberikan bimbingan dan ketrampilan kerja untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru yang menyerap tenaga kerja</p> <p><u>Urusan pendidikan :</u> Meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan dalam rangka menyiapkan peserta didik menjadi wirausaha baru</p> <p><u>Urusan transmigrasi :</u> Optimalisasi program transmigrasi disertai pembekalan calon transmigran dengan ketrampilan yang sesuai karakteristik daerah tujuan agar mampu beradaptasi dan bertahan di lingkungan yang baru</p>
		3. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa dalam rangka penguatan pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi desa	<p><u>Urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa :</u> Melakukan pembinaan terhadap pemerintahan kelembagaan desa serta memberikan bantuan stimulan untuk menumbuhkan swadaya masyarakat</p>
Meningkatkan kesejahteraan sosial	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) <u>Indikator sasaran :</u> IPM	1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan secara merata dan berkualitas	<p><u>Urusan pendidikan :</u> 1. Memantapkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun (termasuk pendidikan inklusif) dan meningkatkan kualitas pendidikan usia dini melalui penyediaan sarana, prasarana serta tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan memadai serta bantuan biaya pendidikan bagi siswa keluarga miskin 2. Menyelenggarakan pendidikan non formal serta menuntaskan pemberantasan buta aksara</p> <p><u>Urusan perpustakaan :</u> Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat</p> <p><u>Urusan kesehatan :</u> 1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan melalui penyediaan sarana, prasarana kesehatan dan alat kesehatan, obat-obatan serta tenaga kesehatan yang kompeten dan memadai. 2. menyempurnakan pelaksanaan jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin 3. Mengembangkan upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat berupa kampanye hidup sehat serta pemantauan keamanan bahan makanan dan lembaga kesehatan</p>
		2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan informasi	<p><u>Urusan komunikasi dan informatika :</u> Menjamin ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap media dan konten informasi yang sehat melalui pembinaan terhadap media massa, kelompok informasi masyarakat dan media center serta menyebarluaskan informasi kebutuhan publik melalui media massa, media luar ruang, media online dan pertunjukan rakyat.</p>
		3. Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan, anak dan keluarga sejahtera	<p><u>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :</u> Meningkatkan program-program perlindungan perempuan dan anak serta penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<u>Urusan Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera :</u> Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas layanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
		4. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan	<u>Urusan pemuda dan olah raga :</u> Memberikan bimbingan kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan bagi pemuda serta memperkuat lembaga kepemudaan.
		5. Memajukan olah raga daerah melalui pembinaan secara sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan	<u>Urusan pemuda dan olah raga :</u> Meningkatkan prestasi olahraga melalui pembinaan insan olah raga dan penyelenggaraan kompetisi yang kontinu dan berjenjang meningkatkan sarana dan prasarana olah raga
	<u>Sasaran :</u> Berkembangnya budaya lokal multikultur yang dapat berfungsi sebagai media perekat sosial <u>Indikator sasaran :</u> Penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah grup kesenian	Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah dari berbagai etnis dan golongan untuk menjaga pluralisme dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.	<u>Urusan kebudayaan :</u> 1. Melakukan pembinaan terhadap grup-grup kesenian, Menyelenggarakan festival seni budaya, dan promosi daerah melalui pengiriman duta seni budaya. 2. Memelihara gedung dan benda cagar budaya daerah.
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	<u>Sasaran :</u> Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang layak dan sehat <u>Indikator sasaran :</u> - Prosentase RLH, kawasan kumuh - Cakupan layanan sanitasi - Luas RTH per satuan HGB/HPL	1. Penataan ruang permukiman yang sesuai ketentuan zonasi 2. Penyediaan sarana prasarana permukiman dan penataan kawasan 3. Mengendalikan pencemaran lingkungan 4. Meningkatkan luasan dan kualitas RTH publik dan privat.	<u>Urusan penataan ruang:</u> 1. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan sesuai kaidah tata ruang 2. Menyediakan dan menerapkan sistem informasi spasial <u>Urusan perumahan :</u> Pemenuhan cakupan layanan dasar permukiman dan kawasan <u>Urusan lingkungan hidup :</u> 1. Pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi mencemari lingkungan 2. Mengembangkan upaya rehabilitasi lingkungan hidup yang terkena dampak pencemaran <u>Urusan lingkungan hidup</u> Melakukan pemeliharaan dan perluasan RTH publik dengan melibatkan peran swasta dalam menyediakan dalam menyediakan RTH publik dan privat serta menerapkan regulasi tentang ketentuan luasan RTH privat.
	<u>Sasaran :</u> Terwujudnya alam dan lingkungan hidup yang lestari <u>Indikator sasaran:</u> Luas lahan kritis	Mengelola sumber-daya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan	<u>Urusan lingkungan hidup</u> Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungannya <u>Urusan kehutanan :</u> Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan hutan rakyat, membina hutan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati serta serta mengembangkan kawasan hutan kota
		2. Merehabilitasi lingkungan hidup yang mengalami penurunan kualitas	<u>Urusan lingkungan hidup :</u> 1. Merevitalisasi sumber-sumber air yang mengalami penurunan fungsi melalui rehabilitasi daerah-daerah tangkapan air. 2. Merehabilitasi lahan kritis dengan melalui gerakan reboisasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Mengarahkan dan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan	Menyusun perencanaan pembangunan sektoral berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis

Misi 4 : Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah

Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan infrastruktur penumbuh daya saing agrobisnis	<p><u>Sasaran :</u> Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi yang aman, nyaman dan memadai</p> <p><u>Indikator sasaran :</u> - Persentase jalan, jembatan dan pendukungnya kondisi baik; - Rasio ketersediaan sarana dan prasarana wilayah;</p>	Menyediakan infrastruktur jalan, jembatan beserta pendukungnya yang layak, yang menghubungkan antar wilayah dan pemukiman penduduk serta menjangkau sentra-sentra produksi pertanian dan produk unggulan daerah lainnya	<p><u>Urusan pekerjaan umum :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan fasilitas jalan, jembatan dan pendukungnya yang berkualitas, aman dan nyaman bagi pengendara kendaraan bermotor, tidak bermotor maupun pejalan kaki 2. Menyediakan penerangan jalan umum secara optimal 3. Membangun sistem drainase yang meminimalisir genangan air <p><u>Urusan perhubungan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan sesuai standar kebutuhan 2. Meningkatkan standar kualitas layanan angkutan 3. Melakukan pembinaan serta pemantauan sarana dan prasarana transportasi serta melakukan kampanye keselamatan di jalan
Menyediakan air baku yang optimal untuk mendukung aktivitas pertanian	<p><u>Sasaran :</u> Meningkatnya kualitas, kuantitas dan jangkauan jaringan irigasi</p> <p><u>Indikator sasaran:</u> Persentase jaringan irigasi kondisi baik</p>	Membangun jaringan irigasi yang handal dan dapat menjangkau daerah irigasi yang seluas-luasnya	<p><u>Urusan pekerjaan umum :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan prasarana penyedia dan penampung air baku 2. Melakukan pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta pembinaan terhadap petani pemakai air

Misi 5 : Mewujudkan suasana aman dan damai, melalui penegakan, kepastian dan perlindungan hukum

Mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan yang kondusif bagi keberlangsungan pembangunan	<p><u>Sasaran :</u> Menurunnya kasus pelanggaran hukum dan gangguan keamanan ketertiban masyarakat</p> <p><u>Indikator sasaran :</u> angka kriminalitas, pelanggaran ketertiban umum dan konflik sosial politik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan budaya hukum, kesadaran dan ketaatan hukum serta mendorong terlaksananya penegakan hukum 2. Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban untuk mendukung stabilitas daerah dan meminimalisir ancaman, hambatan, dan gangguan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penataan terhadap produk-produk hukum dan menjamin kepastian hukum, melakukan sosialisasi produk-produk hukum serta kesadaran dan ketaatan terhadap hukum 2. Melaksanakan upaya penegakan perda <p><u>Urusan kesatuan bangsa, politik dalam negeri :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kerjasama lintas sektor dalam menjaga stabilitas daerah 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Mengembangkan budaya demokrasi, pluralisme, persatuan dan kesatuan bangsa serta penghormatan terhadap HAM	<u>Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</u> 1. Melakukan pembinaan masyarakat dalam kehidupan politik, demokrasi, pluralisme, wawasan kebangsaan serta HAM 2. Melakukan pembinaan terhadap partai politik, orkemas, LSM
Meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat dari resiko bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintah daerah dalam mengurangi resiko bencana <u>Indikator sasaran:</u> Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat siaga bencana	Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam mendeteksi ancaman bencana dan melakukan upaya penyelamatan korban bencana.	<u>Urusan otoda :</u> Melaksanakan pelatihan peringatan dini bencana, penanggulangan bencana serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana, menyediakan sarana, prasarana , logistik dan SOP penangan bencana serta melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Sasaran pembangunan daerah Kab. Magetan dalam RKPD tahun 2017 meliputi :

1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung efisiensi dan efektifitas birokrasi yang semakin produktif.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan, memperkuat sistem preventif kesehatan masyarakat.
3. Meningkatkan produksi, produktifitas, nilai tambah dan pendapatan dari kegiatan pertanian secara luas.
4. Memperkuat UMKM terutama akses permodalan, management usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran.
5. Meningkatkan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal dengan membangun kerjasama dan kemitraan.
6. Mengembangkan sektor – sektor unggulan pedesaan berbasis sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang.
7. Membangun dan meningkatkan jalan dan jaringan infrastruktur secara lebih merata, serta penyediaan infrastruktur strategis lainnya terutama yang mendukung pengembangan pertanian dalam arti luas, dan pariwisata.
8. Meningkatkan sinergisme program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
9. Peningkatan pemahaman dan pengamalan wawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah, budaya serta kearifan local dalam kehidupan sehari-hari.
10. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan.
11. Peningkatan fasilitasi sarana ibadah dan kegiatan keagamaan.

12. Peningkatan kualitas sarana prasarana dan tata kelola pendidikan.
13. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
14. Peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat melalui Wajib Belajar 9 Tahun.
15. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan untuk meningkatkan mutu serta daya saing lulusan.
16. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar dan lanjutan.
17. Peningkatan keterjangkauan layanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dengan optimalisasi dan pengembangan system jaminan kesehatan.
18. Peningkatan peran kelompok masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
19. Peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
20. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perekonomian terutama yang mendukung pengembangan pariwisata, perdagangan dan jasa daerah.
21. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan pendapatan masyarakat.
22. Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan untuk pengembangan sector koperasi, UKM serta pelaku usaha informal.
23. Peningkatan sinergi penanggulangan kemiskinan melalui optimalisasi melalui peran TKPK-D.
24. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat.
25. Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan serta bantuan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
26. Peningkatan pengarus-utamaan gender dalam pembangunan, serta peningkatan hak-hak dasar ibu dan anak.
27. Mengembangkan sinergi peran, fungsi dan kerjasama antar stakeholders pembangunan.
28. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi.
29. Peningkatan manajemen pengelolaan air limbah, persampahan dan lingkungan hidup melalui proses pembelajaran dan pembangunan yang partisipatif.
30. Pengendalian tata ruang yang berwawasan Lingkungan Hidup.
31. Peningkatan konservasi lingkungan hidup.

32. Peningkatan fasilitasi kerjasama antar daerah dan swasta dalam kontak-kontak dagang dan investasi.
33. Mengembangkan pembinaan terhadap pelaku usaha UMKM dan Koperasi, baik pembinaan kelembagaan, manajemen, akses permodalan maupun fasilitasi pemasaran.

4.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Penyusunan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD Kab. Magetan tahun 2017 harus mempertimbangkan aspek politik, yaitu perlunya dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan telaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai institusi wakil rakyat, agar diperoleh sinergitas program antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan DPRD (legislatif), sehingga produk hukum yang ditetapkan telah mengikat semua pemangku kepentingan.

Pokok-pokok pikiran DPRD pada Musrenbang tingkat Kabupaten Magetan dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Magetan tahun 2017, adalah sebagai berikut :

Permasalahan yang cukup mendasar dan perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan tahun 2017, diantaranya :

1. Belum optimalnya kinerja birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat;
2. Masih belum optimalnya iklim investasi dan usaha
3. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar
4. Jumlah kemiskinan dan pengangguran yang relatif tinggi dan juga rendahnya kualitas sdm tenaga kerja
5. Belum optimalnya daya saing dan daya jual obyek wisata
6. Belum optimalnya produktivitas pertanian,
7. Kurang tersedianya infrastruktur daerah, desa dan wilayah perbatasan yang menunjang pertumbuhan ekonomi.

Dengan mengenali permasalahan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2013 – 2018 dan potensi serta isu strategis pembangunan Kabupaten Magetan tahun 2017, maka pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Magetan dalam penyusunan RKPD tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Platform Bupati yang tertuang pada visi dan misi tersebut, tercipta masyarakat magetan yang sejahtera menjadi prioritas. Apalagi, pada tahun 2017 merupakan tahun ke-empat kepemimpinan Bupati Magetan, diharapkan perencanaan yang ditetapkan nantinya terus melakukan

- penajaman misi, artinya misi yang belum terealisasi untuk dilakukan pendalam dengan kebijakan dan meningkatkan program inovasi dan mampu menjadi pengungkit yang berbasis *multi-player effect*.
2. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, diharapkan pemerintah punya terobosan di bidang pendidikan, tidak saja pelajar yang mampu menguasai iptek, tetapi juga mampu mengamalkan agama, dan fasih membaca Al-Qur'an.
 3. Dalam rangka membangun pemerintahan yang baik dan bersih (*good govemence and clean goverment*) dibutuhkan SDM yang profesional, maka :
 - a. Pemerintah harus melakukan penataan organisasi birokrasi dengan menempatkan pejabat memiliki kemampuan, transparan dan akuntabel.
 - b. Peningkatkan pengawasan internal dan memberikan perlindungan hukum PNS yang melaksanakan tugas.
 4. Pembangunan pertanian dalam arti luas, diantaranya :
 - a. Mendorong produk olahan pertanian dengan masing-masing desa memiliki produk unggulan
 - b. Memperkuat produk olahan pertanian
 - c. Ektensifikasi lahan pertanian di desa-desa
 - d. Meningkatkan program perlindungan pertanian seperti ketersediaan sarana prasarana pertanian, dan penanganan pasca panen
 - e. pembangunan waduk atau embung dan jaringan irigasi untuk mendukung kecukupan air irigasi pertanian dan pengolahan tanah, perawatan, dan pasca panen, hal ini penting yang tidak boleh diabaikan.
 - f. Pemerintah untuk memfasilitasi dan mendorong tiap-tiap desa menelorkan satu produk unggulan yang punya daya saing
 5. Pembangunan pariwisata secara luas
 - a. Pariwisata merupakan tumpuan pemerintah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dan tumpuan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan. Maka dalam pengembangan pariwisata pemerintah mengadakan kerja sama dengan perhutani dalam rangka penataan, perluasan kawasan telaga wahyu, dengan mendatangkan konsultan, mengingat telaga wahyu telah dilaksanakan pematangan tanah, disamping itu perlu dukungan masyarakat untuk menciptakan wisata kebun buah dan lain-lain

- b. Pemanfaatan terminal ngerong dan pemandian ngerong untuk obyek wisata kerjasama dengan investor.
 - c. Penguatan pengusaha lokal bidang pariwisata dengan melibatkan UMKM
 - d. Pengembangan destinasi pariwisata dengan menggandeng konsultan pariwisata
6. Dalam rangka percepatan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi penanaman modal atau investor merupakan salah satu strategi yang perlu dilakukan pemerintah daerah. Maka pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas umkm dan koperasi yang kuat agar para investor regional dan nasional tertarik menanamkan modalnya di Magetan.
 7. Pembangunan infrastruktur salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan, juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Maka pemerintah daerah untuk melanjutkan perluasan jalan dan trotoar diperempatan atau tempat-tempat strategis dan perluasan jalan dengan pengaspalan badan jalan.
 8. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar diharapkan makin mudah bagi masyarakat, sehingga masyarakat semakin terjamin kesehatannya.
 9. Pengembangan industri kulit dengan dibuatnya lokasi yang tepat, serta pemerintah untuk memikirkan lokasi jalan sawo dengan tempat parkir yang memadai.
 10. Pengembangan dan pembinaan pasar desa yang sudah ada agar bisa tumbuh dan berkembang.
 11. Dengan kemajuan teknologi, diharapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pemilihan Bupati, Wakil Bupati cukup menggunakan kartu e-KTP.
 12. Meningkatkan manajemen pengelolaan aset daerah dengan baik

Penyusunan dan pelaksanaan anggaran pembangunan daerah harus berdasarkn anggaran berbasis kinerja, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas masing-masing unit kerja dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran.

4.4 Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah

4.4.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Tema dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional

Tahun 2017 adalah **“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”**.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector- sector strategis ekonomi domestic.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuar restorasi social Indonesia.

sedangkan sasaran Nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2017, sesuai dengan (RPJMN 2015-2019), antara lain sebagai berikut :

- a) Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen (*);
Dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 6,5 persen; Jawa-bali sebesar 7,1 persen; Nusa Tenggara sebesar 7,6 persen; Kalimantan sebesar 6,1 persen; Sulawesi sebesar 8,2 persen; Maluku sebesar 7,8 persen dan Papua sebesar 16,0 persen.
- b) Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 7,5-8,5 persen (*);
Dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah: Sumatera sebesar 8,8 persen; Jawa-bali sebesar 8,6 persen; Nusa Tenggara sebesar 15,1 persen; Kalimantan sebesar 5,4 persen; Sulawesi sebesar 9,1 persen; Maluku sebesar 12,0 persen dan Papua sebesar 25,1 persen.
- c) Pencapaian target tingkat pengangguran sebesar 5,2-5,5 persen (*);

Dengan sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah: Sumatera sebesar 5,0 persen; Jawa-bali sebesar 5,9 persen; Nusa Tenggara sebesar 3,4 persen; Kalimantan sebesar 4,2 persen; Sulawesi sebesar 4,5 persen; Maluku sebesar 5,4 persen dan Papua sebesar 3,4 persen.

d) Laju inflasi 4,0.

e) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,7

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2017 perlu diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan Nasional sebagai berikut:

a) Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari:

- revolusi mental;
- pembangunan pendidikan;
- pembangunan kesehatan;
- pembangunan perumahan dan permukiman.

b) Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari:

- kedaulatan pangan;
- kedaulatan energy dan ketenagalistrikan;
- kemaritiman dan kelautan
- pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

c) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari:

- pemerataan antarkelompok pendapatan;
- perbatasan negara dan daerah tertinggal;
- pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan

d) pengembangan konektivitas nasional.

Untuk mendukung pencapaian sasaran Nasional yang sudah ditetapkan, kebijakan pengalokasian anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan fungsi (*money follow function*), tetapi *money follow program prioritas*. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata. Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

4.4.2 Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyusun anggaran tahun 2017 menggunakan pendekatan perencanaan pembangunan daerah secara holistik-tematik, integratif dan spasial. Holistik-tematik artinya, program yang disusun harus menitikberatkan pada keseluruhan sebagai

satu kesatuan dan saling keterkaitan satu sama lain untuk memecahkan satu pokok permasalahan (tema), integratif artinya program harus terkoordinasi lintas SKPD terkait, saling menunjang dan mendukung, tidak tumpang tindih, tidak bekerja parsial atau sendiri-sendiri (tidak ego-sektoral) agar tujuan suatu program / kegiatan dapat tercapai sesuai tujuan pembangunan, serta spasial yang artinya pembangunan dilaksanakan dengan berdasar pada daya dukung sumber daya dan ruang/ wilayah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, arah kebijakan pembangunan daerah yang ditentukan dalam tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2017 adalah **“Pembangunan yang berkeadilan, berdaya saing dan berakhlak mulia dengan memperluas dan mempercepat pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik”**. Dari tema yang diusung tersebut dalam rangka arah pembangunan untuk memperluas dan mempercepat Jawa Timur menjadi provinsi industri.

Program prioritas pembangunan daerah Jawa Timur dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar (Pendidikan & Kesehatan), dengan sasaran pembangunan :
 - a. Peningkatan mutu pendidikan menengah, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan, utamanya peningkatan lembaga SMK dengan target rasio SMK : SMA menjadi 70% : 30% pada tahun 2019.
 - b. Peningkatan program Bantuan Operasional Sekolah Madrasah Diniyah (BOS MADIN).
 - c. Penurunan AKI dan AKB, penurunan HIV, TB, Malaria, DBD
 - d. Penurunan prevansi kurang gizi dan stunting (balita pendek)
 - e. Penataan jaminan kesehatan nasional (sistem rujukan)
 - f. Peningkatan kesehatan lingkungan
 - g. Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa (pasung)
 - h. Peningkatan kualitas taman posyandu
 - i. Pendayagunaan dan pemerataan tenaga kesehatan strategis
 - j. Menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di tingkat desa/ kelurahan melalui Ponkesdes.
 - k. Pengembangan dari POLINDES sebagai Jaringan Puskesmas dalam rangka mendekatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

2. Pengembangan kualitas SDM
 - a. Standarisasi Sumber Daya manusia tenaga terampil.

Pelatihan kualitas Sumber daya manusia berbasis kompetensi, melalui penyusunan kurikulum SMK menyesuaikan kebutuhan pasar dan kerjasama pelatihan dengan pihak ketiga.
 - b. Penguatan manajemen UMKM dengan memperbanyak TOT inkubator di seluruh Kabupaten/ Kota.
 - c. Pembangunan dan pengembangan SMK mini

3. Pengurangan Kemiskinan & Pengangguran
 - a. Pengentasan kemiskinan melalui JALIN MATRA (jalan Lain menuju mandiri dan sejahtera), Penanggulangan Feminisasi kemiskinan (PFK), Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2), dan Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
 - b. Pelatihan kualitas Sumber daya manusia berbasis kompetensi, melalui penyusunan kurikulum menyesuaikan kebutuhan pasar dan kerjasama pelatihan dengan pihak ketiga
 - c. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bekerjasama dengan KODAM V Brawijaya dan TNI-AL LANTAMAL V.

4. Pengembangan Industri dan Perdagangan
 - a. Pembinaan IKM Paripurna
 - Pengendalian Harga Bahan Pokok (4 Komoditi Bapak – 78 Pasar)
 - Peningkatan Standarisasi Industri (2.400 IKM)
 - Peningkatan Perdagangan Antar Daerah (26 KPD)
 - Peningkatan Industri Berbasis SDA (3.430 IKM)
 - Penataan Struktur Industri (2.035 Ha)
 - Pengembangan SISKAPERBAPO (116 Pasar)
 - b. Pengembangan industri primer, yaitu industri pengolah bahan baku utamanya bahan baku hasil pertanian.
 - c. Penyediaan skema pembiayaan melalui perbankan, dengan konsep pemberian pinjaman dengan bunga kompetitif kepada BPR jatim dan Bank jatim bagi UMKM sektor primer
 - d. Pengendalian Inflasi, melalui :
 - penguatan kelembagaan, dengan meningkatkan intensitas pengendalian harga, peningkatan koordinasi dan penguatan TPID di Kabupaten/ Kota.

- penguatan dan penataan produksi, distribusi dan konektivitas, utamanya pengendalian harga dan ketersediaan barang ketika hari besar/ konsumsi tinggi.
 - regulasi dan monitoring, melalui operasi pasar, pemantuan dan siaran pers saat tekanan inflasi tinggi
 - pengadaan kajian, analisis dan informasi tentang isu strategis inflasi Jatim.
 - Pengendalian ekspektasi, melalui pengembangan SISKAPERBAPO
- e. Penyediaan dan penataan kawasan Industri Jatim, seperti di Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Gresik, Lamongan, Tuban, Banyuwangi, Madiun, Kota Malang, Mojokerto, Bangkalan, Jombang.
5. Pengembangan Koperasi dan UMKM
- Penumbuhan lembaga keuangan mikro, melalui penguatan Koperasi wanita (kopwan) dan lembaga keuangan mikro berbasis fungsional, seperti Kopwan Syariah.
6. Peningkatan Kedaulatan pangan
- Pemantapan Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional, dengan
- Pembangunan infrastruktur pertanian saluran irigasi dan Perencanaan pembangunan bendungan/ waduk, yaitu waduk Semantok – Nganjuk, Lesti 3 – Malang, Bagong dan Kampak di Trenggalek.
 - Optimalisasi lahan dan air di Daerah Aliran Sungai, yaitu DAS bengawan Solo, Brantas, Welang – Rejoso, Pekalen Sampeyan, Baru – Bajulmati, Madura.
 - Peningkatan peternakan sapi potong melalui inseminasi buatan
 - Orientasi spasial, dengan pengendalian laju konversi lahan pertanian melalui percepatan penyusunan Perda LP2B di seluruh Kabupaten/ Kota.
7. Peningkatan Infrastruktur
- Peningkatan infrastruktur dalam rangka konektivitas (udara, laut, darat) Provinsi dan nasional :
- Peningkatan kualitas bandara baru, seperti bandara bawean (Gresik), bandara Masalembo dan Kangean di Sumenep.
 - Pembangunan konektivitas laut dengan pembangunan dermaga dan peningkatan fasilitas pelabuhan
 - Pembangunan konektivitas transportasi darat :

- Pembangunan kebinamargaan, meliputi pembangunan jalan tol, Jalan Lintas Selatan (di Tulungagung dan Blitar), akses bandara dan pelabuhan, jalan lingkar di Batu dan Selingkar Wilis
- Rehabilitasi jalan dan jembatan Provinsi (1.421 Km)
- Pengembangan Sistem Informasi di 19 lokasi Jembatan Timbang
- Pengadaan dan Pemasangan Early Warning System (EWS)
- Pembangunan sarana air bersih di daerah rawan air di Kab. Blitar, Madiun, Magetan, Nganjuk, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Lamongan, Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Probolinggo, Situbondo, Gresik)
- Pembangunan spam regional di Umbulan dan Mojo – Lamong.

8. Kemaritiman dan Kelautan

Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, dengan :

- Pemulihan sumberdaya ikan melalui under water restocking laut di Banyuwangi, Situbondo, Tuban serta Kab & Kota Probolinggo
- Perbaikan sumberdaya habitat di laut di Banyuwangi, Situbondo, Tuban serta Kab & Kota Probolinggo
- Pemberian bantuan sarana alat penangkapan ikan
- Pembangunan dan penyempurnaan pelabuhan perikanan di Pelabuhan Popoh dan Pancer.

9. Harmonisasi Sosial

Pemantapan wawasan kebangsaan antisipasi perkembangan gerakan kelompok masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila dengan fasilitasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) dan sinergitas TNI/ Polri dengan tokoh agama dan masyarakat serta pemerintah daerah dalam koordinasi Forkopimda dan optimalisasi fungsi Babinsa, Babinkamtibmas dan Pemerintah Desa.

4.4.3 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Magetan

Sedangkan Upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Magetan, dalam pelaksanaan program pembangunan daerah tahun 2017 agar mencapai hasil yang maksimal, dilaksanakan melalui 8 program prioritas sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan keunggulan wilayah Kabupaten Magetan yaitu pendidikan, pertanian, pariwisata, industri, perdagangan, kesehatan, infrastruktur dan pengentasan

kemiskinan, atau disingkat dengan akronim DITATA INDAH plus INSANI, dengan titik berat pada sektor pertanian.

1. Bidang Pendidikan

diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasana pendidikan serta peningkatan kualitas mutu pendidikan dan kemudahan akses layanan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, melalui program kegiatan prioritas :

- Relokasi SD Magetan kompleks (2,3,4) ke SD unggulan (lanjutan)
- Rehabilitasi dan pemeliharaan gedung sekolah pendidikan dasar (SD & SMP)
- Bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu
- Peningkatan kualitas pendidik non-PNS

2. Bidang Pertanian

diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian serta penguatan produk olahan pertanian yang mempunyai keunggulan kompetitif, didukung pembangunan pertanian berbasis agrowisata, melalui program kegiatan prioritas :

- Penyediaan bibit unggul dan penanganan pasca panen
- Penyediaan sarana/prasarana pertanian seperti jalan usaha tani (JUT), jaringan irigasi tersier (JIT), alat mekanisasi pertanian
- Pembangunan/ pemeliharaan sumur-sumur P2AT dan embung pertanian
- Pemberian bantuan ternak serta pembangunan sarana dan prasana perikanan.
- Pelaksannan penghijauan, utamanya di lahan-lahan kritis.
- Pembinaan UMKM dalam mengembangkan produk olahan hasil pertanian.

3. Bidang Pariwisata

diarahkan pada penataan kawasan wisata sarangan untuk memberikan kenyamanan pengunjung wisata, mengembangkan event-event dan destinasi wisata baru serta diperkuat dengan pengembangan agrowisata, melalui program kegiatan prioritas :

- pengembangan obyek wisata baru di kawasan ngerong seperti waterboom dan pusat oleh-oleh
- pengembangan telaga wahyu & waduk gonggang
- pengembangan obyek agrowisata dan desa wisata guna mendukung Magetan menuju kota agropolitan

4. Bidang Industri dan Perdagangan

diarahkan untuk pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk memperlancar arus distribusi barang serta ekspansi pasar, melalui program kegiatan prioritas :

- Pengembangan kawasan pasar sayur sebagai pusat perdagangan (meliputi pembukaan akses baru, revitalisasi, dan relokasi pasar sayur)
- Pengembangan olahan produk lokal unggulan, misal : janggelan, kelinci, dll

5. Bidang Kesehatan

diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata untuk seluruh penduduk, khususnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kelas 3 untuk masyarakat miskin, serta peningkatan kapasitas rumah sakit umum daerah, melalui program kegiatan prioritas:

- Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan
- Rehabilitasi gedung RSUD sayidiman dan pembangunan ruang rawat inap penyakit paru
- Rehabilitasi puskesmas dan jaringannya
- Mewujudkan program kabupaten layak anak

6. bidang infrastruktur

diarahkan untuk menyediakan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan infrastruktur penumbuh daya saing agrobisnis, melalui program kegiatan prioritas :

- Pembangunan lanjutan twinroad Maospati – Sukomoro
- Peningkatan jalan kabupaten, jalan antar kecamatan dan antar desa.
- Pembukaan akses jalan baru pasar sayur
- Pembangunan gedung Sekretariat Daerah di eks hotel semeru
- Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan sarana dan prasarana persampahan
- Rehabilitasi dam, saluran air dan jaringan irigasi pengairan

7. pengentasan kemiskinan

diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin serta pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di desa, melalui program kegiatan prioritas :

- Pelatihan kewirausahaan dan pemberian bantuan bagi UKM
- Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin

- Bantuan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH)
- Pemberian jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

Sementara itu, titik ungkit pembangunan tahun 2017 diarahkan untuk mendukung peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama usaha olahan produk pertanian melalui pengembangan pembinaan terhadap pelaku usaha UMKM, pengembangan jaringan pemasaran UMKM melalui fasilitasi promosi dan kerjasama dengan BUMD/ BUMN maupun swasta, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pada pusat-pusat perdagangan.

Selain Program DITATA INDAH plus INSANI yang menjadi prioritas pembangunan Kab. Magetan, hal mendasar yang tetap menjadi perhatian adalah pembangunan bidang aparatur (birokrasi), sebagai unsur pelaksana pembangunan daerah. Tanpa didukung birokrasi yang berkualitas, pelaksanaan program-program prioritas pembangunan daerah tidak akan berjalan lancar, dan pencapaian target pembangunan sulit dicapai. Pembangunan birokrasi pemerintahan meliputi peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana pemerintahan serta sistem tata kelola pemerintahan.

Secara rinci hubungan antara sasaran, strategi, arah kebijakan dengan Bidang urusan dan program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut:

TABEL 4.2
SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KAB MAGETAN

No	Bidang urusan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
1	Bidang Pertanian	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperhatikan kebijakan ekonomi regional, nasional dan global	Mengembangkan usaha pertanian terpadu berbasis agrobisnis	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan) Program peningkatan kesejahteraan petani Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan Program peningkatan produksi hasil peternakan Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Program pengembangan budidaya perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
2	Bidang Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Menguatkan sektor pariwisata yang didukung sektor pertanian	Program pengembangan destinasi pariwisata

No	Bidang urusan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
		lokal dengan memperhatikan kebijakan ekonomi regional, nasional dan global	berwawasan lingkungan	Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan kemitraan pariwisata
3	Bidang Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperhatikan kebijakan ekonomi regional, nasional dan global	Menyusun perencanaan pembangunan yang selaras dengan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah dengan mengarusutamakan green economy	Program perencanaan pembangunan ekonomi
4	Bidang Perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperhatikan kebijakan ekonomi regional, nasional dan global	Mengembangkan pusat-pusat perdagangan dengan mengutamakan pedagang tradisional	Program pembinaan pedagang kali lima dan asongan Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
5	Bidang Industri	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperhatikan kebijakan ekonomi regional, nasional dan global	Mengembangkan industri yang mengarah kepada pengolahan hasil pertanian dan produk unggulan lainnya	Program pengembangan industri kecil dan menengah Program peningkatan kemampuan teknologi industri Program pengembangan sentra-sentra industri
6	Bidang Ketahanan Pangan	Terwujudnya stabilitaspangan dan energi utama	Melakukan pemantauan stok dan distribusi pangan serta menyediakan stok komoditas dan kebutuhan pokok	Program pengembangan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan Program penganekaragaman dan keamanan pangan
7	Bidang UMKM	Meningkatkan kegiatan investasi untuk mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal	Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha UMKM dan koperasi, baik pembinaan kelembagaan, manajemen, akses permodalan maupun fasilitasi pemasaran	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
8	Bidang Pengentasan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka	Mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan PMKS Memberikan bimbingan dan ketrampilan bagi pencari kerja untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru yang menyerap tenaga kerja Meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan dalam rangka menyiapkan peserta didik menjadi wirausaha baru Melakukan pembinaan pemerintahan dan kelembagaan desa serta memberikan bantuan stimulan untuk menumbuhkan swadaya masyarakat	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program pembinaan anak terlantar Program peningkatan kesempatan kerja Program pendidikan menengah Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program wilayah terpadu antar desa Program peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah desa
9	Bidang Pendidikan	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Memantapkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun (termasuk pendidikan inklusif) dan meningkatkan kualitas pendidikan usia dini melalui penyediaan sarana, prasarana, serta tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas	Program pendidikan anak usia dini Program wajib belajar pendidikan dasar Program pendidikan menengah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan

No	Bidang urusan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
			Menyelenggarakan pendidikan non formal serta menuntaskan pemberantasan buka aksara	Program management pelayanan pendidikan Program pendidikan non formal
10	Bidang Kesehatan	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan melalui penyediaan sarana, prasarana, peralatan kesehatan dan obata-obatan serta tenaga kesehatan yang kompeten dan memadai. menyempurnakan pelaksanaan jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin	Program upaya kesehatan masyarakat Program obat dan perbekalan kesehatan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Program pemberdayaan sumberdaya kesehatan Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Pustu dan jaringannya Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
11	Bidang lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas permukiman yang layak dan sehat	Pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi mencemari lingkungan Melakukan pemeliharaan dan perluasan RTH publik dengan melibatkan peran swasta dalam menyediakan RTH publik dan privat serta menerapkan regulasi tentang ketentuan luasan RTH privat	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Program peningkatan pengendalian polusi Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
12	Bidang Infrastruktur Bina Marga dan Cipta Karya	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi yang aman, nyaman dan memadai	Menyediakan fasilitas jalan, jembatan dan pendukungnya yang berkualitas, aman dan nyaman bagi pengendara kendaraan bermotor, tidak bermotor maupun pejalan kaki Membangun sistem drainase yang meminimalisir genangan air Menyediakan penerangan jalan umum secara optimal Menyediakan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan sesuai standar kebutuhan Meningkatkan standar kualitas layanan angkutan	Program peningkatan jalan dan jembatan Program pembangunan jalan dan jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan Program pembangunan turap/talud/bronjong Program pembangunan infrastruktur pedesaan Program peningkatan sarana dan prasarana kebina margaan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan dan pelayanan angkutan Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

No	Bidang urusan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
13	Bidang Infrastruktur Pengairan	Meningkatnya kualitas, kuantitas dan jangkauan jaringan irigasi	Menyediakan prasarana penyedia dan penampung air baku Melakukan pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta pembinaan terhadap petani pemakai air	Program penyediaan dan pengelolaan air baku Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Arah kebijakan pembangunan tahun 2017 yang merupakan tahun keempat dari perodesasi RPJMD Kab. Magetan tahun 2013 – 2018 adalah “mendorong produk olahan pertanian dengan meningkatkan kapasitas UKM dan koperasi untuk mendatangkan investasi regional dan nasional”. Meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), terutama usaha olahan produk pertanian melalui pengembangan pembinaan terhadap pelaku usaha UMKM, pengembangan jaringan pemasaran UMKM melalui fasilitasi promosi dan kerjasama UMKM.

Program prioritas yang ditetapkan adalah dalam upaya mencapai arah kebijakan yang telah ditentukan, sehingga ditetapkan target capaian kinerja pembangunan daerah dalam RKPD 2017 sebagaimana dalam tabel berikut :

TABEL 4.3
TARGET CAPAIAN KINERJA RKPD KAB. MAGETAN TAHUN 2017

URUSAN	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANNGUNG JAWAB
		RPJMD TAHUN KE-4 (TAHUN 2017)	RKPD 2017	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Pertumbuhan ekonomi	6,94		
	PDRB per kapita ADHB (Rp. juta)	20,787		
	PDRN perkapita ADHK (Th. 2000 Rp. juta)	7,089		
	Angka kemiskinan	7,91		
	Angka pengangguran terbuka	2,77		
Pendidikan	IPM	76,58		
	Angka melek huruf	99,55	99,55	Dinas Pendidikan
	Angka rata-rata lama sekolah	11 thn	11 thn	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi kasar :			
	- Anak usia dini	53,76%	53,76%	Dinas Pendidikan
	- SD/MI	111,61	111,61	Dinas Pendidikan
	- SMP/MTs	101,35	101,35	Dinas Pendidikan
	- SMA/SMK/MA	97,5	97,5	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni :			
	- SD/MI	99,66	99,66	Dinas Pendidikan
	- SMP/MTs	94,38	94,38	Dinas Pendidikan
	- SMA/SMA/SMK/MA	79,85	79,85	Dinas Pendidikan
	Angka putus sekolah :			
- SD/MI	0,02	0,02	Dinas Pendidikan	
- SMP/MTs	0,03	0,03	Dinas Pendidikan	
- SMA/SMK/MA	0,11	0,11	Dinas Pendidikan	
Kesehatan	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	23	23	Dinas Kesehatan
	Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	14	14	Dinas Kesehatan
	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	102	102	Dinas Kesehatan
	Angka usia harapan hidup	72	72	Dinas Kesehatan

URUSAN	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANNGUNG JAWAB	
		RPJMD TAHUN KE-4 (TAHUN 2017)	RKPD 2017		
	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	32	32	Dinas Kesehatan	
	Persentase balita gizi buruk	<1%	<1%	Dinas Kesehatan	
	Prosentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	88	88	Dinas Kesehatan	
	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kelahiran terlatih	90	90	Dinas Kesehatan	
Kebudayaan	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	2	2	Dinas Parbudpora	
Pemuda dan olah raga	Jumlah klub olah raga	28	28	Dinas Parbudpora	
	Jumlah gedung olah raga	30	30	Dinas Parbudpora	
Pendidikan	Ruang kelas kondisi baik :				
	- SD/MI	82,45%	82,45%	Dinas Pendidikan	
	- SMP/MTs	95%	95%	Dinas Pendidikan	
	- SMA/SMK/MA	96%	96%	Dinas Pendidikan	
	Angka putus sekolah				
	- SD/MI	0,02	0,02	Dinas Pendidikan	
	- SMP/MTs	0,03	0,03	Dinas Pendidikan	
	- SMA/SMK/MA	0,11	0,11	Dinas Pendidikan	
	Angka kelulusan				
	- SD/MI	100%	100%	Dinas Pendidikan	
	- SMP/MTs	100%	100%	Dinas Pendidikan	
	- SMA/SMK/MA	100%	100%	Dinas Pendidikan	
	Angka melanjutkan				
	- Dari SD/MI ke SMP/MTs	99,55%	99,55%	Dinas Pendidikan	
	- Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	82,45%	82,45%	Dinas Pendidikan	
	Guru yang memiliki kualifikasi S1/D4	95%	95%	Dinas Pendidikan	
	Jumlah gedung SMP/MTs yang memiliki Lab. IPA	88,45%	88,45%	Dinas Pendidikan	
	Kesehatan	Persentase balita gizi buruk	0,46	0,46	Dinas Kesehatan
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	90	90	Dinas Kesehatan
		Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS	224	224	Dinas Kesehatan
		Proporsi kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	88	88	Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare	100	100	Dinas Kesehatan	
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	Dinas Kesehatan	
	Cakupan Penemuan AFP per 100.000 penduduk < 15 tahun	≥ 2	≥ 2	Dinas Kesehatan	
	Cakupan Penemuan dan Penanganan pneumonia balita	100	100	Dinas Kesehatan	
	Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria	0	0	Dinas Kesehatan	
	Angka kejadian malaria per 1000 penduduk	<1	<1	Dinas Kesehatan	
	Prevalensi HIV/AIDs (%) dari total populasi	<0,5	<0,5	Dinas Kesehatan	
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100	Dinas Kesehatan	
	Rasio dokter per satuan penduduk	0,3	0,3	Dinas Kesehatan	
	Rasio tenaga medis persatuan penduduk			Dinas Kesehatan	
	Perawat	0,84	0,84	Dinas Kesehatan	
	Bidan	0,55	0,55	Dinas Kesehatan	
	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100	100	Dinas Kesehatan	
	Cakupan Desa/kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100	100	Dinas Kesehatan	
	Cakupan Desa Siaga Aktif	83	83	Dinas Kesehatan	
	Cakupan kunjungan bayi	90	90	Dinas Kesehatan	
	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95	95	Dinas Kesehatan	
	Rumah Sakit Umum Daerah				
	Gawat Darurat				
	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman	
	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 jam	24 jam	RSUD Dr. Sayidiman	
	Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD	ATLS & ACLS (Dokter 100%) BTLS & BCLS (Perawat 100%)	ATLS & ACLS (Dokter 100%) BTLS & BCLS (Perawat 100%)	RSUD Dr. Sayidiman	

URUSAN	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
		RPJMD TAHUN KE-4 (TAHUN 2017)	RKPD 2017	
	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	ADA	(Tim ADA (Tim Disaster RS)	RSUD Dr. Sayidiman
	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	4 menit	4 menit	RSUD Dr. Sayidiman
	Kepuasan Pelanggan	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	Kematian pasien ≤ 24 jam	2/1000	2/1000	RSUD Dr. Sayidiman
	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	90%	90%	RSUD Dr. Sayidiman
	Rawat Jalan			
	Dokter Spesialis pemberi pelayanan di Poliklinik	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	Ketersediaan Pelayanan	K. Saraf K.Paru K.Dalam K.Bedah K.Anak K.Mata K.Kebidanan K. Gigi dan Mulut K. Kulit & Kelamin K. THT K. DOTS K. VCT K. Umum	K. Saraf K.Paru K.Dalam K.Bedah K.Anak K.Mata K.Kebidanan K. Gigi dan Mulut K. Kulit & Kelamin K. THT K. DOTS K. VCT K. Umum	RSUD Dr. Sayidiman
	Jam buka Pelayanan	07.30 s/d 12.30 Setiap Hari Kerja kecuali Jum'at: 08.00 - 11.00 WIB	07.30 s/d 12.30 Setiap Hari Kerja kecuali Jum'at: 08.00 - 11.00 WIB	RSUD Dr. Sayidiman
	Waktu tunggu di rawat jalan	± 20 menit	± 20 menit	RSUD Dr. Sayidiman
	Kepuasan Pelanggan			RSUD Dr. Sayidiman
	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	95%	95%	RSUD Dr. Sayidiman
	b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	Rawat inap			
	Pemberi Palayanan di Rawat Inap	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	Dokter Penanggung Jawab Pasien Rawat Inap	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	Jam Visite Dokter Spesialis	07.30-14.00	07.30-14.00	RSUD Dr. Sayidiman
	Kejadian Infeksi Pasca Operasi	0	0	RSUD Dr. Sayidiman
	Kejadian Infeksi Nosokomial	0	0	RSUD Dr. Sayidiman
	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	Kematian pasien > 48 jam	0,25%	0,25%	RSUD Dr. Sayidiman
	Kejadian Pulang Paksa	1%	1%	RSUD Dr. Sayidiman
	Kepuasan Pasien	90,00%	90,00%	RSUD Dr. Sayidiman
	Rawat Inap TB:			RSUD Dr. Sayidiman
	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	75%	75%	RSUD Dr. Sayidiman
	Bedah Sentral			
	Waktu tunggu operasi elektif	1 hari	1 hari	RSUD Dr. Sayidiman
	Waktu tunggu operasi cito	30 menit	30 menit	RSUD Dr. Sayidiman
	Kejadian Kematian di meja operasi	0%	0%	RSUD Dr. Sayidiman
	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	Komplikasi anaestesi karena overdosis, reaksi anaestesi dan salah penempatan endotracheal tube	0%	0%	RSUD Dr. Sayidiman
	Persalinan dan Perinatologi			

URUSAN	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANANGUNG JAWAB
		RPJMD TAHUN KE-4 (TAHUN 2017)	RKPD 2017	
	Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. 0.076% b. 0.0196% c. 0%	a. 0.076% b. 0.0196% c. 0%	RSUD Dr. Sayidiman
	Pemberi pelayanan persalinan normal	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	60%	60%	RSUD Dr. Sayidiman
	Pemberi pelayanan persalinan dengan operasi	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	Kemampuan menangani BBLR (\leq 2500 gr)	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	20%	20%	RSUD Dr. Sayidiman
	Keluarga Berencana:			RSUD Dr. Sayidiman
	a. Presentase KB (Vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten (dr SpOG, dr SpB, dr SpU, dr umum terlatih)	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	b. Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh bidan terlatih	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	Kepuasan Pelanggan	80%	80%	RSUD Dr. Sayidiman
	<u>Intensif</u>			
	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	0%	0%	RSUD Dr. Sayidiman
	Pemberi pelayanan Unit Intensif	100% 75%	100% 75%	RSUD Dr. Sayidiman
				RSUD Dr. Sayidiman
	<u>Radiologi</u>			
	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	45 menit	45 menit	RSUD Dr. Sayidiman
	Pelaksana Ekspertisi	92%	92%	RSUD Dr. Sayidiman
	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	0,70%	0,70%	RSUD Dr. Sayidiman
	Kepuasan Pelanggan	80%	80%	RSUD Dr. Sayidiman
	<u>Laboratorium Patologi Klinik</u>			
	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	135 mnt	135 mnt	RSUD Dr. Sayidiman
	Pelaksana Ekspertisi	Dokter Sp. PK.	Dokter Sp. PK.	RSUD Dr. Sayidiman
	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	Kepuasan pelanggan	90%	90%	RSUD Dr. Sayidiman
	<u>Rehabilitasi Medik</u>			
	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	0%	0%	RSUD Dr. Sayidiman
	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	Kepuasan Pelanggan	85%	85%	RSUD Dr. Sayidiman
	<u>Farmasi</u>			
	Waktu tunggu pelayanan			RSUD Dr. Sayidiman
	a. Obat Jadi	25 menit	25 menit	RSUD Dr. Sayidiman
	b. Obat Racikan	45 menit	45 menit	RSUD Dr. Sayidiman
	Tidak adanya Kejadian Kesalahan Pemberian Obat	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	Kepuasan Pelanggan	79%	79%	RSUD Dr. Sayidiman
	Penulisan resep sesuai dengan formularium	96%	96%	RSUD Dr. Sayidiman
	<u>PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)</u>			
	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	55%	55%	RSUD Dr. Sayidiman
	Tersedia APD di setiap instalasi/ departement	60%	60%	RSUD Dr. Sayidiman
	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/ HAI (Health Care Associated Infections) di RS (minimum 1 parameter)	50%	50%	RSUD Dr. Sayidiman
	<u>Gizi</u>			
	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman

URUSAN	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
		RPJMD TAHUN KE-4 (TAHUN 2017)	RKPD 2017	
	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	17%	17%	RSUD Dr. Sayidiman
	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	<u>Transfusi Darah</u>			
	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100% terpenuhi	100% terpenuhi	RSUD Dr. Sayidiman
	Kejadian reaksi transfusi	0%	0%	RSUD Dr. Sayidiman
	<u>Pelayanan GAKIN</u>			
	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	<u>Rekam Medis</u>			
	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	95%	95%	RSUD Dr. Sayidiman
	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	7 menit	7 menit	RSUD Dr. Sayidiman
	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	14 menit	14 menit	RSUD Dr. Sayidiman
	<u>Limbah Pengelolaan</u>			
	Baku mutu limbah cair	20,8% 15	67% 6,94	20,8% 67% 15 6,94 RSUD Dr. Sayidiman
	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	<u>Administrasi dan Manajemen</u>			
	Tindak Lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	93%	93%	RSUD Dr. Sayidiman
	Kelengkapan Laporan Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	55%	55%	RSUD Dr. Sayidiman
	Cost Recovery	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	1 jam	1 jam	RSUD Dr. Sayidiman
	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	<u>Ambulance/ Mobil Jenazah</u>			
	Waktu Pelayanan ambulance/mobil jenazah	24 jam	24 jam	RSUD Dr. Sayidiman
	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/mobil jenazah di Rumah Sakit	30 menit	30 menit	RSUD Dr. Sayidiman
	Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	Sesuai ketentuan daerah	Sesuai ketentuan daerah	RSUD Dr. Sayidiman
	<u>Pemulasaran Jenazah</u>			
	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaran jenazah	1 jam 50 menit	1 jam 50 menit	RSUD Dr. Sayidiman
	<u>Laundry</u>			
	Tidak Adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	<u>PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT</u>			
	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	30 menit	30 menit	RSUD Dr. Sayidiman
	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
	Peralatan Laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Pekerjaan Umum	Prosentase jalan kabupaten kondisi baik	79,54%	79,54%	Dinas PU BMCK

URUSAN	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANNGUNG JAWAB
		RPJMD TAHUN KE-4 (TAHUN 2017)	RKPD 2017	
	Jumlah jembatan kondisi baik	233	233	Dinas PU BMCK
	Rasio jaringan irigasi kondisi baik	71,75	71,75	Dinas PU Pengairan
Perumahan	Rumah tangga pengguna air bersih	70%	70%	Dinas PU BMCK
	Rumah tangga bersanitasi	98%	98%	Dinas PU BMCK
	Prosentase rumah layak huni	100%	100%	Dinas PU BMCK
	Prosentase permukiman layak huni	100%	100%	Dinas PU BMCK
	Persentase luas kawasan kumuh	0,66	0,66	Dinas PU BMCK
Penataan Ruang	Dokumen RTRW	Ada	Ada	Bappeda
	Dokumen RDTRK	16	16	Bappeda
	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	15%	15%	Dinas PU BMCK
Perencanaan pembangunan	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	Bappeda
Perhubungan	Load factor	0,56	0,56	Dishubkominfo
	Jumlah uji kir angkutan umum	1450	1450	Dishubkominfo
	Prosentase uji kir angkutan umum	91,70	91,70	Dishubkominfo
	Prosentase pemasangan rambu lalu lintas	80,40	80,40	Dishubkominfo
	Prosentase pemasangan marka jalan	22,39	22,39	Dishubkominfo
	Penerangan jalan umum	75%	75%	Dishubkominfo
Lingkungan hidup	Persentase penanganan sampah perkotaan	85%	85%	BLH
	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	24%	24%	BLH
	Luas lahan kritis/lahan kritis tertangani	3.314,05	3.314,05	
Kependudukan dan catatan sipil	Prosentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	100	100	Dispendukcapil
	Presentase penduduk berakta kelahiran	70	70	Dispendukcapil
	Presentase anak berakte kelahiran	98,90	98,90	Dispendukcapil
	Persentase keluarga ber KK	100	100	Dispendukcapil
	Rasio KDRT	0,10%	0,10%	Badan PP & KB
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	Badan PP & KB
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	88	88	Badan PP & KB
	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100%	100%	Badan PP & KB
Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Rasio akseptor KB	74,62	74,62	Badan PP & KB
	Cakupan peserta KB aktif	74,62	74,62	Badan PP & KB
	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	28%	28%	Badan PP & KB
	Anmetneed kebutuhan Keluarga berencana (KB) yang tidak terpenuhi	11%	11%	Badan PP & KB
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	77%	77%	Badan PP & KB
	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	77%	77%	Badan PP & KB
Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	4,45%	4,45%	Dinsos Nakertrans
	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya	4,32%	4,32%	Dinsos Nakertrans
Ketenagakerjaan	Angka partisipasi angkatan kerja	69,96%	69,96%	Dinsos Nakertrans
	Tingkat pengangguran terbuka	3,1	3,1	Dinsos Nakertrans
	Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif	55,11%	55,11%	Dinsos Nakertrans
	Persentase koperasi aktif	84	84	Dinkop & UKM
Koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah UKM non BPR/KLM	1.187	1.187	Dinkop & UKM
	Jumlah BPR/LKM	164	164	Dinkop & UKM
Penanaman modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1	1	Bag. Adm. Perekonomian
	Jumla nilai investasi berskala lokal (non PMDN/PMA)	142.000.000.000	142.000.000.000	Bag. Adm. Perekonomian
	terselenggaranya promosi peluang penanaman modal	37 kl	37 kl	Bag. Adm. Perekonomian
Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	7	7	Dinas Parbudpora

URUSAN	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANNGUNG JAWAB	
		RPJMD TAHUN KE-4 (TAHUN 2017)	RKPD 2017		
Kepemudaan dan olah raga	Jumlah organisasi pemuda aktif	289	289	Dinas Parbudpora	
	Jumlah kegiatan/ kompetisi olah raga	30	30	Dinas Parbudpora	
Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	Persentase LSM, Ormas, dan OKP yang dibina	100	100	Bakesbangpol	
	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	6	6	Bakesbangpol	
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Peringkat kinerja penyelenggaraan otda	<50	<50	Bag. Adm. Pemeirntahan Umum	
	Hasil evaluasi Lakip	CC	CC	Bag. Ortala	
	Hasil predikat pemeriksaan/ pengawasan pengelolaan keuangan daerah	WTP	WTP	Inspektorat	
	Skor Indeks Kepuasan masyarakat	74	74	Bag. Ortala	
	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	200	200	BKD	
	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional	200	200	BKD	
	Prosentase pejabat yang mengikuti fit and proper test	750	750	BKD	
	Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar/ ijin belajar	1000	1000	BKD	
	Rasio Poskamling per desa/ kelurahan	6,30%	6,30%	Kantor Sat Pol PP	
	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)	0,01%	0,01%	Kantor Sat Pol PP	
	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban, ketentraman, keindahan)	90%	90%	Kantor Sat Pol PP	
	Rasio penegakan perda/ jumlah pelanggaran perda	97%	97%	Kantor Sat Pol PP	
	Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat siaga bencana terlatih (orang)	1.920	1.920	BPBD	
	Ketahanan pangan	Ketersediaan energi dan protein perkapita	60%	60%	BKP
	Penguatan cadangan pangan	65%	65%	BKP	
	Skor pola pangan harapan	85%	85%	BKP	
	Pemberdayaan masyarakat desa	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	207	207	Bapermas & Pemdes
		Rata - rata jumlah kelompok binaan PKK	252	252	Bapermas & Pemdes
Statistik	Buku kabupaten dalam angka	Ada	Ada	Bappeda	
	Buku PDRB kabupaten magetan	Ada	Ada	Bappeda	
	Kecamatan dalam angka	18	18	Bappeda	
kearsipan	Prosentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	96	96	Kantor Arpus	
Komunikasi dan informatika	Jumlah pemberitaan melalui				
	- Media massa	230	230	Bag. Humas & Protokol	
	- Media luar ruang	60	60		
	Prosentase SKPD yang menyediakan data di website resmi	100%	100%		
	Jumlah pertunjukan rakyat	6	6	Bag. Humas & Protokol	
	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat dan telecenter	9	9	Dishubkominfo	
Perpustakaan	Jumlah perpustakaan	820	820	Kantor Arpus	
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	28.000	28.000	Kantor Arpus	
	Koleksi buku yang tersedia	76.000	76.000	Kantor Arpus	
Kelautan dan perikanan	Budidaya ikan (ton)	1,720.9	1,720.9	Disnakan	
	Konsumsi ikan (Kg/Kapita/ th)	19.13	19.13	Disnakan	
	Pembudidaya ikan (orang)	2,75	2,75	Disnakan	
	Jumlah unit pembenihan (UPR)	51	51	Disnakan	
	Produksi Perikanan Tangkap (PUD) (ton)	39.54	39.54	Disnakan	
Pertanian	Jumlah produksi hasil pertanian				
	- Padi (kw)	3.860.000	3.860.000	Dinas Pertanian	
	- Jagung (kw)	779.000	779.000	Dinas Pertanian	
	- Kedelai (kw)	69.000	69.000	Dinas Pertanian	
	- Tebu (kw)	562.000	562.000	Dinas Pertanian	
	Jumlah produksi peternakan				

URUSAN	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANNGUNG JAWAB
		RPJMD TAHUN KE-4 (TAHUN 2017)	RKPD 2017	
	- Sapi (ekor)	188.500	188.500	Disnakan
	- Kambing (ekor)	47.000	47.000	Disnakan
	- Ayam (ekor)	8.000.000	8.000.000	Disnakan
	- Telur (Kg)	18.500.000	18.500.000	Disnakan
Kehutanan	Jumlah produksi hasil hutan (kayu jati, m3)	1.600	1.600	Dinas Hutbun
	Kerusakan Kawasan Hutan	5	5	Dinas Hutbun
	Luas kawasan hutan	6.452	6.452	Dinas Hutbun
Energi dan sumber daya mineral	Jumlah titik pemasangan energi alternatif terbarukan (biogas)	94	94	Bag. Adm. SDA
Pariwisata	Angka kunjungan wisata	818.149	818.149	Dinas Parbudpora
	Jumlah PAD sektor wisata (Rp ribu)			Dinas Parbudpora
Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	4	4	Dinas Perindag
	persentase pasar tradisional kondisi baik	80%	80%	Dinas Perindag
Perindustrian	Pertumbuhan industri	15.749	15.749	Dinas Perindag
	Cakupan bina kelompok pengrajin	50	50	Dinas Perindag
Ketransmigrasian	Jumlah transmigran ditempatkan (KK)	85	85	Dinsosnakertrans

Kondisi perekonomian Kabupaten Magetan tidak bisa terlepas dari kondisi perekonomian nasional. Berdasarkan kondisi pertumbuhan perekonomian nasional yang mengalami pelambatan di berbagai sektor, mempengaruhi target capaian kinerja utama pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan tahun 2017.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan nasional yang mulai membaik, dan pencapaian pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun 2016 sebesar 4,92 persen, dan diproyeksi semakin meningkat di kuartal II, III dan IV, maka Pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dipatok diangka 5,3%. Kondisi tersebut secara signifikan mempengaruhi target indikator asumsi ekonomi makro nasional lainnya, yaitu Inflasi menjadi 4,0 plus minus 1%, target pembangunan dengan indikator tingkat pengangguran menjadi di kisaran 5,2 – 5,5%, angka Kemiskinan diturunkan menjadi 9,0 – 10,0%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di level 70,1.

Berdasarkan asumsi kondisi perekonomian nasional tahun 2016 diatas, dan dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan Kab. Magetan tahun 2015, maka Target capaian kinerja utama pada RKPD tahun 2017 yang merupakan tahun ke-4 RPJMD mengalami penyesuaian dibandingkan dengan target capaian kinerja tahun keempat RPJMD Kab. Magetan tahun 2013 – 2018, yaitu angka pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, pengangguran terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia.

Selain itu, penyesuaian terjadi karena penetapan target capaian kinerja utama pada RKPD tahun 2017 yang merupakan tahun ke-4 RPJMD masih menggunakan standart perhitungan tahun dasar 2000, sedangkan

saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) telah menggunakan Standart Nasional Account (SNA) dengan tahun dasar 2010, sehingga target capaian kinerja utama RKPD tahun 2017 menjadi sebagai berikut :

TABEL 4.4
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN KINERJA RKPD KAB. MAGETAN TAHUN 2017

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN KE-4 (TAHUN 2017)	CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET CAPAIAN KINERJA RKPD 2017	KETERANGAN
Pertumbuhan ekonomi	6,94	5,15	5,3	Pengaruh kondisi perekonomian nasional, capaian tahun 2015 Kab. Magetan, dan penyesuaian penggunaan standart baru perhitungan tahun dasar 2010.
PDRB per kapita ADHB (Rp. juta)	20,787	22,19	23,44	
PDRN perkapita ADHK (Th. 2000 Rp. juta)	7,089			
Tingkat inflasi	-	4,89	< 5%	
Angka kemiskinan	7,91	11,8	11	
Angka pengangguran terbuka	2,77	6,05	5,8	
IPM	76,58	71,39	71,68	

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH

Penyusunan rencana program dan kegiatan RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2017 lebih diarahkan pada program-program prioritas daerah dan pencapaian target-target indikator kinerja yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2013 – 2018), dan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Perundang-Undangan. Program prioritas pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Magetan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD), dengan ketentuan sebesar 10% Dana perimbangan setelah dikurangi DAK, ditambah bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa dengan ketentuan sebesar 10% dari pajak dan retribusi daerah.
2. Pengalokasian anggaran untuk mengakomodir usulan Musrenbang Kecamatan minimal 500 juta rupiah tiap Kecamatan.
3. Pelayanan jaminan kesehatan masyarakat (BPJS Pusat dan BPJS Daerah).
4. Pengalokasian dana JKK (jaminan Keselamatan kerja) dan JKM (Jaminan Kematian) bagi PNS.
5. Pembangunan dan peningkatan Sarana dan Prasarana pendidikan bagi PAUD, TK, SD, dan SMP.
6. Peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan masyarakat, yaitu RSUD dr. Sayidiman, dan puskesmas beserta jaringannya
7. Penyelesaian pembangunan jalan Twin road Maospati – Sukomoro.
8. Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Kabupaten dan jembatan.
9. Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan antar desa (usulan Musrenbang).
10. Pembangunan Kantor Sekretariat Daerah di eks hotel semeru.
11. Pengalokasian anggaran untuk Pilkada tahun 2018.
12. Penyertaan modal PDAM, BPR UMKM Jatim dan BPR Syariah Magetan,
13. Pemberian Pinjaman daerah (Penyangga Pupuk, Bongkar Ratoon, Lembaga Pembeli Gabah, Sapi Kereman dan Betina).

Berikut ini disajikan rekapitulasi Belanja Langsung RKPD Tahun 2017 untuk setiap SPKD.

TABEL 5.1
REKAPITULASI PAGU ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TIAP SKPD TAHUN 2017

NO	SKPD	PAGU INDIKATIF TAHUN 2017
1	DINAS PENDIDIKAN	19.372.385.000
2	DINAS KESEHATAN	95.808.560.040
3	RSUD dr. SAYIDIMAN	66.919.930.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA CIPTA KARYA	187.234.210.000
5	DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN	21.817.160.000
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.510.000.000
7	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.066.880.000
8	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	10.057.240.000
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3.116.475.000
10	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	4.452.079.827
11	DINAS SOSIAL, TENGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.560.000.000
12	DINAS KOPERASI DAN UKM	3.261.000.000
13	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	1.605.000.000
14	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	6.358.300.000
15	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.940.000.000
16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.135.000.000
17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.800.000.000
18	SEKRETARIAT DPRD	20.527.551.250
19	SEKRETARIAT DAERAH	
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	1.580.000.000
	BAGIAN HUKUM	960.000.000
	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	1.000.000.000
	BAGIAN UMUM	12.980.000.000
	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	1.375.000.000
	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	1.565.520.000
	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.250.000.000
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.550.000.000
	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM	745.000.000
20	SEKRETARIAT KORPRI	606.000.000
21	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.205.000.000
22	INSPEKTORAT	2.148.772.000
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	4.938.500.000
24	DINAS PENDAPATAN DAERAH	5.635.000.000
25	BADAN PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	2.720.000.000
26	KANTOR ARSIP DAN PEPUSTAKAAN	925.000.000
27	DINAS PERTANIAN	14.749.500.000
28	BADAN KETAHANAN PANGAN	2.482.500.000
29	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	5.845.580.000
30	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	6.848.950.000
31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9.461.870.000
32	KECAMATAN MAGETAN	360.000.000,00
	Kelurahan Magetan	419.929.000,00

	Kelurahan Selosari	429.766.000,00
	Kelurahan Tambran	420.353.000,00
	Kelurahan Kepolorejo	430.881.000,00
	Kelurahan Kebonagung	420.440.000,00
	Kelurahan Tawanganom	426.949.000,00
	Kelurahan Bulukerto	417.948.000,00
	Kelurahan Mangkujayan	417.237.000,00
	Kelurahan Sukowinangun	427.701.000,00
33	KECAMATAN PANEKAN	400.000.000,00
	Kelurahan Panekan	424.413.000,00
34	KECAMATAN PLAOSAN	360.000.000,00
	Kelurahan Plaosan	414.796.000,00
	Kelurahan Sarangan	436.489.000,00
35	KECAMATAN PONCOL	400.000.000,00
	Kelurahan Alastuwo	417.237.000,00
36	KECAMATAN PARANG	335.000.000,00
	Kelurahan Parang	419.001.000,00
37	KECAMATAN LEMBEBYAN	400.000.000,00
	Kelurahan Lembeyan Kulon	427.382.000,00
38	KECAMATAN TAKERAN	360.000.000,00
	Kelurahan Takeran	427.674.000,00
39	KECAMATAN KAWEDANAN	400.000.000,00
	Kelurahan Kawedanan	421.548.000,00
	Kelurahan Sampung	420.228.000,00
	Kelurahan Rejosari	437.439.000,00
40	KECAMATAN MAOSPATI	360.000.000,00
	Kelurahan Maospati	427.434.000,00
41	Kelurahan Mranggen	415.208.000,00
	Kelurahan Kraton	423.999.000,00
	KECAMATAN BARAT	400.000.000,00
	Kelurahan Tebon	419.701.000,00
42	Kelurahan Mangge	428.074.363,00
	KECAMATAN KARANGREJO	360.000.000,00
	Kelurahan Karangrejo	423.424.000,00
43	Kelurahan Manisrejo	417.303.000,00
	KECAMATAN SUKOMORO	400.000.000,00
	Kelurahan Tinap	422.025.000,00
44	KECAMATAN KARTOHARJO	360.000.000,00
	KECAMATAN KARAS	400.000.000,00
45	KECAMATAN NGARIBOYO	400.000.000,00
46	KECAMATAN NGUNTORONADI	400.000.000,00
47	KECAMATAN SIDOREJO	400.000.000,00
48	KECAMATAN BENDO	400.000.000,00
49	Kelurahan Bendo	427.248.000,00
JUMLAH		566.985.356.000,00

Sedangkan Program dan kegiatan SKPD secara lengkap dan rinci tertuang dalam buku lampiran RKPD tahun 2017 yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen ini.

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan RKPD Tahun 2017 ini dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan daerah, menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait demi mewujudkan arah dan tujuan pembangunan sesuai RPJMD Kab. Magetan, selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun 2017, sebagai dasar dalam penyusunan Renja dan RKA-SKPD, serta menjadi pedoman penyusunan APBD Tahun 2017.

Hal-hal lain yang secara substansial terjadi perubahan pada tahun berjalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2017, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan tetap berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002